



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR: 171 TAHUN 2019**

**T E N T A N G
PENUNJUKAN PENELITIAN KELOMPOK, PENANGGAP UTAMA DAN MODERATOR
DENGAN KATEGORI PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA**

- Menimbang :**
1. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan meningkatkan kualitas penelitian institusi IAIN Palangka Raya Tahun 2019 maka dipandang perlu menunjuk tim penelitian Kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional melalui surat keputusan;
 2. Mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan penelitian yang dimaksud.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keppres RI Nomor. 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
 3. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
 6. Perpres Republik Indonesia Nomor. 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
 7. KMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;
 8. Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/16684 tentang Rektor IAIN Palangka Raya Periode 2019-2023;
 9. PMA Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;
 10. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 11. Pedoman Penelitian Dosen IAIN Palangka Raya nomor: 212 tahun 2016;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
 13. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019.
- Memperhatikan :**
1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2019.
 2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun akademik 2019.
 3. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya nomor: : 058 tahun 2019 tentang Panduan penelitian kompetitif bagi dosen,

laboran, pustakawan dan tenaga fungsional lainnya melalui pendanaan BOPTN Diktis IAIN Palangka Raya tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PENELITIAN KELOMPOK, PENANGGAP UTAMA DAN MODERATOR DENGAN KATEGORI PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2019
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk tim penelitian kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional di lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2019 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Menugaskan kepada nama dimaksud untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional sesuai dengan pedoman operasional yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- Ketiga : Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian dimaksud dikoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK);
- Keempat : Keperluan biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-025.04.2.426273/2019 tanggal 05 Desember 2018 dan Petunjuk Operasionalnya (PO) serta bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 12 APRIL 2019

Rektor,



Tembusan Yth:

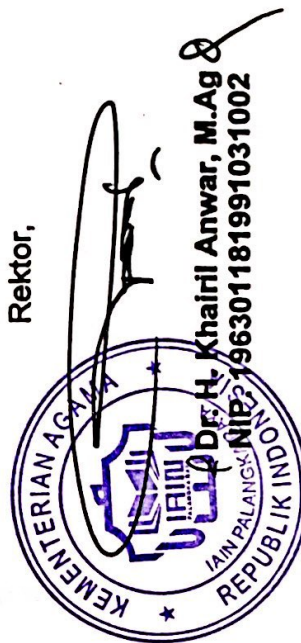
1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
11. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya .

Nomor : 171 Tahun 2019
Tanggal : 12 April 2019
Tentang : Penunjukan Penelitian Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional di Lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2019

No	Nama	Judul / Penanggung Utama dan Moderator	Gol	Vol	Satuan	Jumlah Dana
1.	Dr. Dakhoir, MHI Jefry Tarantang, MHI	Persepsi bankir terhadap hukum riba (pendekatan fikih wasathiyah iqtishadiyah)	IV III	1 Penelitian	Rp. 38.650.000,-	Rp. 38.650.000,-
2.	Dr. Miftahul Huda, M.Ag	Penanggap seminar proposal Penanggap seminar hasil Coaching Clinic	IV	1 Proposal 1 Laporan 1 Laporan	Rp. 150.000 Rp. 850.000 Rp. 150.000	Rp 150.000 Rp. 850.000 Rp. 150.000
3.	Sabanudin Ahmad, MH	Moderator	Non pns	2 OK	Rp. 100.000	Rp. 200.000
TOTAL					Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 12 APRIL 2019

Rektor,



**PERSEPSI BANKIR TERHADAP HUKUM BUNGA BANK
(PENDEKATAN FIKIH WASATHIYAH *IQTISHAD* IYAH)**

**HASIL
PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL**



Oleh:

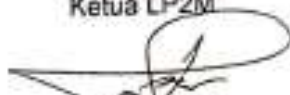
**AHMAD DAKHOIR
JEFRY TARANTANG**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
1441 H/2019 M**

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL RISET

Judul Penelitian	: Persepsi Bankir Terhadap Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyyah)
Bidang Ilmu	: Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Penelitian	: Penelitian Lapangan dan Pustaka (field and Library reseach)
Pendekatan	: Kualitatif-Empiris Normatif
Nama Peneliti	: Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI (Ketua Tim Peneliti) Jefry Tarantang, S.Sy. SH, MH (Anggota)
Telah diseminarkan Hasil Penelitian	: Pada tanggal 29 September 2019 dengan Penguji Utama Bapak Dr. Miftahul Huda, M.Ag
Waktu Penelitian	: 7 Bulan (maret – September)
Biaya	: Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta rupiah)
Sumber Dana	: DIPA IAIN Palangka Raya Tahun 2019
Dasar Kegiatan	: Sk Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama Republik Indonesia Nomor: 5459 Tahun 2018 tentang petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada PTKIN Tahun 2019

Mengetahui
Ketua LP2M



Ajahari, M.Ag

NIP. 19710302 199803 1 004

Palangka Raya, Desember 2019
Ketua Tim Peneliti



Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI
NIP. 19820707 200604 1 003

Disahkan Oleh
Rektor IAIN Palangka Raya



H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 196301181991031002

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya melakukan penelitian yang berjudul, **"Persepsi Bankir Terhadap Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyyah)"**, adalah benar-benar karya sendiri dan bukan hasil plagiarism/ karya orang lain yang tidak sesuai dengan kode etik penulisan ilmiah.

Apabila penelitian ini dikemudian hari terdapat kekeliruan dan ketidaksesuaian dengan pernyataan tersebut diatas, maka sepeneuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Desember 2019

Ketua Tim Peneliti



Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI
NIP. 19820707 200604 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini menguraikan fenomena kegelisahan beberapa bankir di Indonesia terhadap bunga bank. Kegelisahan tersebut menggiring bankir baik konvensional maupun syariah pada sikap ekstrim seperti keputusan pegawai untuk berhenti atau pindah bekerja ke bank syariah, menganggap bahwa posisinya sudah benar dan menganggap bankir konvensional merupakan pekerjaan haram. Dua pemahaman dan sikap inilah yang melatari penulis tertarik untuk menganalisis dan menemukan bagaimana membangun konsep fikih yang toleran dan moderat dalam dunia perbankan dan keuangan Islam. Paper ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif, dengan metode pendekatan propetik dan pendekatan fikih toleransi atau fikih wasathiyah dalam bidang perbankan dan keuangan Islam. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori maqasid al-syariah al-iqtishadiyyah. Hasil paper ini menyimpulkan: pertama, bahwa kegelisahan pegawai bank konvensional disebabkan karena faktor pemahaman dan interpretasi bahwa bank yang menggunakan sistem bunga merupakan sistem riba an sich dan riba hukumnya haram. Kedua, bahwa pemahaman dan sikap ekstrimisme terlihat seperti berhenti bekerja secara mendadak, menghilang tanpa alasan apapun, perubahan cara berpakaian, mudah mengharamkan sesuatu, dan akhirnya berhenti bekerja di bank konvensional. Sementara sikap bankir syariah menganggap bahwa yang dipraktikkan bank syariah telah bebas dari praktik riba, maysir, gharar dan lain-lain. Untuk membangun paradigma toleransi terhadap sikap-sikap tersebut, yaitu dengan pengembangan literasi ontologis keuangan syariah khususnya tentang posisi bunga bank dan tujuan perbankan dan keuangan dalam lapangan mu'amalah yang lebih toleran, dan moderat (wasathiyah). Selanjutnya yaitu dengan melakukan reinterpretasi makna dan konteks bahwa bunga bank tidak identik dengan riba, dan mengembangkan dua nilai dasar yaitu kehalalan aqadnya dan dampak pemerataan dan keadilan ekonomi sebagai tujuan akhirnya (maqasid al-syariah al-iqtishadiyyah).

Kata Kunci: *Persepsi, Bunga Bank, Fikih Wasathiyah Iqtishadiyyah*

ABSTRACT

This research describes the phenomenon the anxiety of some bankers in Indonesia towards bank interest. This anxiety led bankers both of conventional and sharia to extreme attitudes such as the decision of employees to stop working or move to work in Islamic banks, assuming that his position is correct and considers conventional bankers to be illegitimate work. These two understandings and attitudes underlie the authors interested in analyzing and discovering how to build a tolerant and moderate fiqh concept in the world of Islamic banking and finance. This paper uses a type of qualitative-descriptive research, with a propetic approach method and fiqh tolerance approach or fiqh wasathiyah in the field of Islamic banking and finance. The theory used in this paper is the theory of maqasid al-sharia al-iqtishadiyyah. The results of this research conclude: first, the anxiety of conventional bank employees is caused by factor of understanding and interpretation that bank that uses the interest system is usury system and usury is illegal. Second, that understanding and attitude of extremism can be seen as stopping work suddenly, disappearing without any reason, changing how to dress, easily forbid something, and finally stop working in conventional banks. While the attitude of Islamic bankers considers that what is practiced by Islamic banks has been free from the practice of usury, maysir, gharar and others. To build a tolerance paradigm towards these attitudes, namely by developing the ontological literacy of Islamic finance, especially regarding the position of bank interest and banking and financial goals in the field of mu'amalah which is more tolerant, and moderate (wasathiyah). Furthermore, by reinterpreting the meaning and context that bank interest is not identical with usury, and developing two basic values, namely the halal aqad and the impact of equity and economic justice as the ultimate goal (maqasid al-sharia al-iqtishadiyyah).

Keywords: *Perception, Bank Interest, Fiqh Wasathiyah Iqtishadiyyah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“PERSEPSI BANKIR TERHADAP HUKUM BUNGA BANK (PENDEKATAN FIKIH WASATHIYAH IQTISHADIIYAH)”**. Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membina dan menciptakan kader-kader Muslim melalui pendidikan risalah Nabi sehingga menjadikannya pahlawan-pahlawan yang membela agama dan negaranya.

Tersusunya laporan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang benar-benar ahli dengan bidang penelitian sehingga sangat membantu penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang turut mendukung dan berpartisipasi dalam penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bertujuan untuk membangun dalam kesempurnaan penelitian ini. Akhirnya, penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih khususnya bagi penulis.

Palangka Raya, Oktober 2019

Penulis,

AHMAD DAKHOIR

JEFRY TARANTANG

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB I KAJIAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Kerangka Teori.....	10
1. Teori <i>Maqashid Syariah</i>	10
2. Teori Hermeneutika Double Movement.....	15
3. Teori <i>Wasathiyah</i>	17
C. Kerangka Pikir.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian	20
B. Pendekatan Penelitian.....	20
C. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Hukum.....	20
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21

E. Analisis Bahan Hukum.....	22
F. Sistematika Penulisan.....	22
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	24
A. Persepsi Bankir Terhadap Hukum Bunga Bank di Perbankan.....	24
1. Praktek riba dalam lalu lintas keuangan dan perbankan	26
a. Riba dalam transaksi utang piutang.....	29
b. Riba dalam transaksi jual beli	30
2. Praktik bunga dalam dunia perbankan	35
3. Opini Tentang Bankir dan Bunga Bank dalam Dunia Kontemporer.....	39
a. Opini Pegawai Bank Adalah Pemakan Riba	40
b. Opini Pegawai bank Adalah Orang Fasik	42
4. Pemahaman Bankir Mengenai Hukum Bunga Bank.....	47
5. Persepsi dan Sikap Bankir Terhadap Hukum Bunga Bank ...	49
B. Pembangunan Fikih <i>Wasathiyah Iqtishadiyah</i> Terhadap Hukum Bunga Bank di Perbankan	55
1. Bunga Bank dalam Sistem Keuangan Moneter.....	58
2. Interpretasi Moderat dan Telaah Ulang <i>Maqashid Syariah</i> Tentang Larangan Riba	74
3. Prinsip <i>Wasathiyah</i> dalam Pengembangan Fikih Toleran dan Moderat di Bidang Keuangan.....	81
a. Prinsip <i>Tawasuth</i> di Bidang Keuangan Islam	85
b. Prinsip <i>Tawazun</i> di bidang Keuangan Islam	86

	c. Prinsip <i>Syura</i> di Bidang Keuangan Islam	90
	d. Prinsip <i>Aulawiyah</i> di Bidang Keuangan Islam	92
	e. Prinsip <i>Tahadhdhur</i> di Bidang Keuangan Islam	92
	4. Konstruksi Baru Fikih <i>Wasathiyah Iqtishadiyah</i> dan fikih <i>Wasathiyah Maliyah</i>	94
BAB V	PENUTUP.....	100
	A. Kesimpulan.....	100
	B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu badan yang bergerak di bidang intermediasi dan jasa keuangan, sudah sewajarnya apabila menginginkan adanya imbalan (profit) atas jasa yang disediakan. Melalui imbalan tersebut bank akan mampu mengembangkan diri dan menjamin eksistensi di tengah-tengah para nasabahnya. Hanya saja, imbalan tersebut yang kemudian disebut dengan istilah “bunga” dalam prakteknya terkesan mengeksploitasi nasabah, khususnya dalam sistem kredit. Di mana setiap pinjaman kredit pasti disertai dengan persentase bunga, baik bunga modal maupun bunga jatuh tempo. Dengan demikian, kesan yang timbul dengan praktek tersebut, bahwa bank sudah menjadi salah satu wadah yang menjalankan praktek riba, karena kata “riba” dalam bahasa Arab menurut al-Asymawy, senantiasa diidentikkan dengan sesuatu yang bertambah, baik itu berasal dari harta yang dihalalkan atau yang diharamkan.¹

Esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Sementara riba (bunga) pada hakekatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya ditolong bukan dieksploitasi dan memaksa hasil usaha agar selalu positif. Hal ini bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang sangat peduli dengan kelompok-kelompok sosio-ekonomi yang lebih rendah agar kelompok ini tidak dieksploitasi oleh orang-orang kaya (pemilik dana). Sebab ajaran ekonomi Islam mengemban misi *humanisme*, tatanan sosial dan menolak adanya ketidakadilan dan kezaliman yang mata rantainya berefek pada kemiskinan.²

¹Muhammad Syarif Hasyim, *Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*, Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 1, April 2008, h. 46.

²Ummi Kalsum, *Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)*, Jurnal Al-‘Adl Vol. 7, No. 2, Juli 2014, h. 68.

Menurut sistem ekonomi konvensional, pinjaman dengan sistem bunga akan dapat membantu ekonomi masyarakat dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Klaim tersebut telah menjadi keyakinan kuat para kaum kapitalis. Tetapi, keyakinan-keyakinan tersebut dibantah oleh Allah dalam Alquran surah Ar-Rum ayat 39 yang artinya: “Apa yang kamu berikan (berupa pinjaman) dalam bentuk riba agar harta manusia bertambah, maka hal itu tidak bertambah di sisi Allah” (QS. ar-Rum: 39). Ayat ini menyampaikan pesan moral, bahwa pinjaman (kredit) dengan sistem bunga tidak akan membuat ekonomi masyarakat tumbuh secara agregat dan adil. Pandangan Alquran ini secara selintas sangat kontras dengan pandangan kaum kapitalis. Mereka menyatakan bahwa pinjaman dengan sistem bunga akan meningkatkan ekonomi masyarakat, sementara menurut Allah, pinjaman dengan sistem bunga tidak membuat ekonomi tumbuh dan berkembang, karena riba secara empiris telah menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian, khususnya bila ditinjau dari perspektif makro.³

Sebaliknya sistem ekonomi konvensional yang banyak digugah tidak hanya ekonom-ekonom muslim tetapi juga tokoh-tokoh non muslim sendiri. Sumber penyebab timbulnya permasalahan kemanusiaan menurut para pakar ekonomi terletak pada sistem ekonomi yang tidak peduli dengan prinsip persamaan (*equality*), pemerataan (*equity*), kurang mengedepankan kemanusiaan (*humanity*) serta nilai-nilai agama (*religious values*). Salah satu penghalang terbesar bagi tercapainya keadilan yang merata (penyebab timbulnya ketidakadilan, *inequity*) adalah sistem riba (bunga). Jadi mustahil keadilan dapat tercipta tanpa mengeleminasi bunga dari habitat perekonomian dan menegakkan sistem perekonomian yang bebas dari segala macam bentuk riba yang melahirkan model perilaku *homo economicus* dengan memegang prinsip *homo homini lupus*, yakni perilaku yang mengebiri dan mengabaikan nilai-nilai moral dan agama serta mementingkan perlindungan atas hak-hak

³Marwini, *Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Jurnal Az Zarqa', Vol. 9, No. 1, Juni 2017, h. 2.

perorangan (*utilitarian individualism*) sementara mengabaikan kepentingan bersama.⁴

Pengharaman riba (bunga atau rente) telah menjadi salah satu isu yang paling banyak didiskusikan di kalangan muslim. Ini adalah konsekuensi dari persepsi bahwa bunga bank adalah riba, maupun karena sifat dominan dari bunga dalam sistem perbankan saat ini. Ada dua pandangan utama mengenai riba. *Pertama*, banyak muslim yang percaya bahwa interpretasi riba seperti terdapat dalam fiqih (hukum Islam) adalah interpretasi yang tepat karenanya harus diikuti. Interpretasi ini mengandaikan bahwa setiap tambahan yang ditetapkan dalam suatu transaksi pinjaman adalah riba. Bagi yang lain, pengharaman riba dipahami dalam kaitannya dengan eksploitasi atas orang-orang yang relatif berlebihan. Sedangkan pandangan *kedua*, mengatakan bahwa interpretasi riba dalam literatur fiqih tidak memadai dan tidak mempertimbangkan tujuan moral dari pengharaman riba seperti yang dijelaskan atau dipahami dalam Alquran dan hadis.⁵

Adanya pemahaman mengenai bunga bank yang dianggap riba dalam praktek bank konvensional menimbulkan kegelisahan bagi karyawan bank atau bankir di bank konvensional. Begitu juga dalam praktek bank syariah muncul klaim yang menyatakan bahwa praktek bank syariah bebas dari praktek riba.⁶ Kegelisahan tersebut juga dikemukakan oleh beberapa karyawan bank konvensional yang mengaku gelisah dan memilih untuk berhenti bekerja (*resign*) pada bank konvensional yang dipahaminya melakukan praktek riba.⁷ Padahal dalam konstruksi fiqih masih terdapat perbedaan mengenai hukum riba dalam melihat hukum praktek bunga di bank konvensional.

⁴Ummi Kalsum, *Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)*, Jurnal Al-'Adl Vol. 7, No. 2, Juli 2014, h. 68.

⁵Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, diterjemahkan dari buku asli berjudul "Islamic Banking and Interest: A Study of Riba And Its Contemporary Interpretation" oleh Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2006, h. 20.

⁶Wawancara dengan MF, FZ, AS dan RK yang merupakan karyawan (bankir) bank syariah di Palangka Raya pada tanggal 6 Agustus 2018 .

⁷Wawancara dengan AK, DM, MT dan EF yang merupakan karyawan (bankir) bank konvensional di Palangka Raya pada tanggal 28 Agustus 2018 .

Pemahaman bankir dalam memaknai makna riba dalam praktek perbankan mengalami perbedaan persepsi dan menjadi fenomena yang berkembang di kalangan bankir bank konvensional, bahkan berhenti mencari pekerjaan lain, dan bankir bank syariah menganggap pekerjaan bankir konvensional haram. Hal ini telah memunculkan persepsi dan sikap beragam para bankir bank di era modern dalam memahami makna bunga dan riba.

Bertolak dari latar belakang tersebut peneliti berupaya melakukan elaborasi mendalam mengenai persepsi bankir terhadap hukum bunga dan riba di perbankan. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengembangkan pembangunan fikih *wasathiyah iqtishadiyah* terhadap hukum bunga bank di perbankan, serta mengkaji lebih komprehensif dengan cara meneliti masalah tersebut dengan judul “persepsi bankir terhadap hukum bunga bank (pendekatan fikih *wasathiyah iqtishadiyah*).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi bankir terhadap hukum bunga bank di perbankan?
2. Bagaimana pembangunan fikih *wasathiyah iqtishadiyah* terhadap hukum bunga bank di perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Persepsi bankir terhadap hukum bunga bank di perbankan.
2. Pembangunan fikih *wasathiyah iqtishadiyah* terhadap hukum bunga bank di perbankan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai persepsi bankir terhadap hukum bunga bank (pendekatan fikih *wasathiyah iqtishadiyah*);
 - b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran hukum lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan;
 - c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
- a. Sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, khususnya persepsi bankir terhadap hukum bunga bank (pendekatan fikih *wasathiyah iqtishadiyah*);
 - b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah hukum Islam bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
 - c. Sebagai bahan pertimbangan bagi para teoritis dan praktisi hukum mengenai persepsi bankir terhadap hukum bunga bank (pendekatan fikih *wasathiyah iqtishadiyah*).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang orisinalitas penelitian ini, sangat penting untuk mengkaji terlebih dahulu beberapa pemikiran dan penelitian terkait. Sepengetahuan penulis hanya sedikit peneliti yang mengkaji tentang persepsi bankir terhadap hukum bunga bank (pendekatan fikih *wasathiyah iqtishadiyah*), sebagai berikut:

Pertama yaitu penelitian Ummi Kalsum, Jurnal Al-‘Adl Vol. 7, No. 2, Juli 2014 dengan judul “riba dan bunga bank dalam islam (analisis hukum dan dampaknya terhadap perekonomian umat)” dengan hasil penelitian bahwa hukum riba dalam Alqur’an dengan tegas dinyatakan haram. Esensi pelarangan riba (*usurios*) dalam Islam berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moral dan kemanusiaan sebab esensi pelarangan riba adalah penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan. Sementara status hukum bunga bank ada perbedaan pendapat para pakar baik pakar hukum Islam maupun pakar ekonomi Islam. Hal ini dilatarbelakangi adanya perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat tentang riba dan apakah bunga termasuk kategori riba atau tidak? Ada dua pendapat; *pertama*, menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fiqh bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba (Q.s. al-Baqarah [2]: 130. Dan *kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba karena yang dinyatakan pada Q.s al-Baqarah [2]:130 riba harus bersifat berlipat ganda (tidak wajar). Terakhir, dampak bunga terhadap perekonomian, diantaranya: akan menyebabkan krisis keuangan, terjadinya *decoupling* antara sektor riil dan sektor moneter dan akan menyebabkan terjadinya konglomerasi kekayaan dan kesenjangan ekonomi.⁸

⁸Ummi Kalsum, *Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)*, Jurnal Al-‘Adl Vol. 7, No. 2, Juli 2014, h. 81.

Kedua adalah penelitian Marwini, dalam Jurnal Az Zarqa', Vol. 9, No. 1, Juni 2017 dengan judul "kontroversi riba dalam perbankan konvensional dan dampaknya terhadap perekonomian," dengan hasil penelitian bahwa, secara garis besar, riba adalah tambahan atau kelebihan yang ditentukan antara kreditur dan debitur. Dalam aspek hukumnya, terkait dengan bunga bank, ulama berbeda pendapat, yang penulis klasifikasikan menjadi tiga: (1) Ulama yang melihat pada segi dampaknya, *riba nasi'ah* adalah haram tak terkecuali bunga bank. (2) Bunga bank adalah haram jika berlipat ganda. Akan tetapi bunga bank yang ada saat ini adalah boleh karena tidak sama dengan praktek riba yang ada pada zaman Jahiliyyah pra Islam. (3) Bunga bank atau riba haram jika eksploitatif. Islam memberi solusi dalam penghapusan riba dengan sistem perbankan syariah. Karena dampak sistem ekonomi ribawi sangat membahayakan perekonomian. Dampak tersebut adalah: *Pertama*, sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di dunia sepanjang sejarah. Sistem ekonomi ribawi telah membuka peluang para spekulan untuk melakukan spekulasi yang dapat mengakibatkan fatalitas ekonomi banyak negara. Sistem ekonomi ribawi menjadi puncak utama penyebab tidak stabilnya nilai uang (*carrency*) sebuah negara. *Kedua*, di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstant, sehingga yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. *ketiga*, suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi dan terciptanya pengangguran. *Keempat*, teori ekonomi makro juga mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. *Kelima*, sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan Negara negara berkembang kepada *debt trap* (jebakan hutang) yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokoknya. Dengan fakta tersebut, maka benarlah yang mengatakan bahwa sistem ekonomi ribawi tidak menumbuhkan ekonomi masyarakat, tapi justru menghancurkan sendi-sendi perekonomian negara, bangsa dan masyarakat secara luas. Sistem ekonomi ribawi juga merupakan

penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam.⁹

Ketiga adalah penelitian Abdul Mujib, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2, No. 1, 2017 dengan judul “realitas sistem perbankan syariah dan ekonomi islam,” dengan hasil penelitian bahwa pemikiran ekonomi Islam lahir dari kenyataan bahwa Islam adalah suatu sistem yang diturunkan oleh Allah SWT kepada seluruh manusia untuk menata seluruh aspek kehidupannya dalam seluruh ruang dan waktu. Konsep ekonomi Islam bisa dijadikan pilihan alternatif untuk mengatasi dampak krisis global karena konsep ekonomi yang dianggap tidak mampu lagi mengatasi segala permasalahan yang timbul sebagai dampak dari krisis ekonomi global. Pemerintah harus melihat ekonomi syariah dalam konteks penyelamatan ekonomi nasional. Sehubungan dengan itu, pembentukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) perlu kembali diwujudkan dengan memasukkan para pakar ekonomi syariah di dalamnya. Ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan ketangguhannya di masa krisis dan lagi pula dalam praktek perekonomian di Indonesia selama ini, Indonesia sudah menerapkan dual system, yakni konvensional dan sistem ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan lembaga perbankan dan keuangan. Maka, dengan dengan penerapan sistem ekonomi Islam dalam krisis ekonomi global yang melanda ekonomi dunia, negara akan jauh lebih stabil dan tentunya jauh lebih adil. Mudharat dan bahaya sistem ekonomi liberal telah terbukti nyata di berbagai belahan dunia. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa sistem ekonomi Islam adalah solusi dan terapi mujarab krisis ekonomi dunia serta solusi terbaik atas kegagalan ekonomi liberal untuk kesejahteraan yang adil dan merata.¹⁰

⁹Marwini, *Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Jurnal Az Zarka', Vol. 9, No. 1, Juni 2017, h. 16-17.

¹⁰Abdul Mujib, *Realitas Sistem Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2, No. 1, 2017.

Keempat adalah penelitian Sehani, Jurnal Al-Iqtishad, Edisi 13 Vol. 1 tahun 2017 dengan judul “analisis persepsi dan preferensi masyarakat pesantren terhadap bank syariah (studi pada masyarakat pesantren di kota pekan baru)” dengan hasil penelitian bahwa Persepsi masyarakat pesantren terhadap bank syariah di kota Pekanbaru adalah baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil frekuensi penelitian melalui uji statistik yang telah dilakukan oleh peneliti dimana sebagian besar masyarakat pesantren di kota Pekanbaru yang dijadikan sampel dalam penelitian ini menyatakan setuju terhadap tiap butir soal yang peneliti ajukan untuk mewakili variabel persepsi. Preferensi masyarakat pesantren terhadap bank syariah di kota Pekanbaru baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil frekuensi penelitian melalui uji statistik yang dilakukan oleh peneliti dimana sebagian besar masyarakat pesantren di kota Pekanbaru yang dijadikan sampel dalam penelitian ini menyatakan antara setuju setiap butir soal yang peneliti ajukan untuk mewakili variabel preferensi.¹¹

Kelima yaitu penelitian Moh. Indra Bangsawan, Jurnal Law and Justice Vol. 2, No. 1 April 2017, dengan judul “eksistensi ekonomi islam (studi tentang perkembangan perbankan syariah di indonesia),” dengan hasil penelitian bahwa peranan agama di Indonesia memiliki andil yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dinyatakan secara jelas dalam pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sila pertama “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Salah satunya adalah peran perbankan syariah yang memiliki tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan, kebersamaan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi Perbankan di Indonesia mengalami tren untuk pergeseran preferensi investasi dari konvensional ke saham Syariah

¹¹Sehani, *Analisis Persepsi dan Preferensi Masyarakat Pesantren Terhadap Bank Syariah (Studi pada Masyarakat Pesantren di Kota Pekan Baru)*, Jurnal Al-Iqtishad, Edisi 13 Vol. 1 tahun 2017, h. 17.

sejak krisis keuangan. Mulai dari krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 dan krisis keuangan global 2006-2009. Kehadiran Perbankan syariah menjadi pelengkap sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia sampai pada Tahun 2015 telah mengalami tren penurunan dikarenakan komitmen pemerintah masih dilihat kurang, minimnya sosialisasi tentang perbankan syariah serta tingkat literasi dan inklusi masih kurang. Untuk menghadapi hal tersebut perlu kiranya dilakukan upaya yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Islam dan Perbankan Syariah pada khususnya melalui regulasi yang tidak membatasi peran serta masyarakat, masifikasi gerakan pengenalan Perbankan Syariah dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat dengan mengedepankan ketaatan terhadap Syariah. Sampai dengan Tahun 2019 terdapat 14 (dua belas) Bank Umum Syariah (BUS).¹²

Dari beberapa penelitian di atas, sepengetahuan penulis belum ada yang meneliti secara spesifik persepsi bankir terhadap hukum bunga bank (pendekatan fikih *wasathiyah iqtishadiyah*), sehingga sangat tepat penulis meneliti hal tersebut.

B. Kerangka Teori

1. Teori *Maqashid Syariah*

Hukum Islam dalam konsep normatif maupun aplikatif bertujuan untuk mewujudkan dan selaras dengan tujuan hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, ketentraman dan kesejahteraan. Adapun *maslahah* adalah kemanfaatan atau kebaikan. Secara etimologis, *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan hukum. Hukum Islam dalam konsep normatif maupun aplikatif harus mampu mewujudkan dan selaras dengan tujuan hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, ketentraman dan kesejahteraan. Adapun *maslahah* adalah kemanfaatan

¹²Moh. Indra Bangsawan, *Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia)*, Jurnal Law and Justice Vol. 2, No. 1 April 2017, h. 33.

atau kebaikan. Menurut Asmawi,¹³ teori *maslahat* ternyata melalui reformulasi oleh para ulama ahli *ushul* sepanjang sejarah hukum Islam. Tentu saja dalam perjalanan sejarah tersebut terdapat dinamika pemikiran dalam formulasi teori *maslahat*. *Maslahat* dikemukakan oleh beberapa tokoh atau pakar hukum dengan rumusan substansi yang berbeda namun dalam tataran urgensi *maslahah* mereka bersepakat sepenuhnya bahwa teori *maslahah* merupakan teori *multi-fungsi* dalam berbagai masalah dalam dimensi hukum.

Tokoh-tokoh pencetus teori *maslahah* diantaranya adalah Iman al-Ghazali (w. 505 H). Secara etimologis, makna *genuine* teori *maslahah* diungkapkan oleh al-Ghazali bahwa *maslahah* adalah mewujudkan kemanfaatan dan menyingkirkan kemudharatan.¹⁴ Al-Ghazali mengkatagori *maslahah* dalam 3 tingkat yaitu *daruriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan skunder) dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Masing-masing tingkat kebutuhan tersebut disempurnakan lagi dengan perumusan objek atau sasaran 3 tingkat *maslahah* yang dikenal dengan *ushul al-khamsah* (5 prinsip dasar jaminan) yaitu *hifdzu al-din*, *hifdzu al-nafs*, *hifdzu al-'aql*, *hifdzu al-nasl* dan *hifdzu al-mal*. Lima prinsip ini kemudian disempurnakan lagi oleh Shihab al-Din dengan menambahkan *hifdzu al-'ird* (kehormatan).¹⁵ Teori *mashlahah* yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali, bahwa teks-teks al-Qur'an dan Sunnah Nabi sengaja dihadirkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan adalah tujuan dari aturan-aturan Islam. Imam al-Ghazali menyebutnya dengan istilah *maqasid syar'iyyah* (tujuan hukum Islam).¹⁶

¹³ Asmawi, *Teori Maslahah dan Relevansinya dengan PerUndang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag. RI, 2010), hlm. 35.

¹⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min Ilmi al-Ushul, Tahqiq wa Tahliq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1997), Juz ke-I, hlm. 416-417.

¹⁵ Shihab al-Din al-Qarafy, *Syarah Tanqih al-Fushul fi Ihtisar al-Mahsul fi Usul*, (Mesir: Maktabah al-Khairiyah, tth), hlm. 89.

¹⁶ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min Ilmi al-Ushul, Tahqiq wa Tahliq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1997), Juz ke-I, hlm. 281.

Maslahah menurut Izz al-Din Abd al-Salam (w. 660 H), adalah kebaikan, kemanfaatan dan kebajikan. Najm al-Din al-Thufy sebagaimana dikutip oleh Asmawi,¹⁷ dalam hal ini berpendapat lebih ekstrim lagi. Ia lebih mengedepankan teori maslahat dari pada nash (teks al-Qur'an atau Hadis) dalam hal *mu'amalah* (hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya). Hanya saja pendapat Najm al-Din al-Thufy ini kemudian dikomentari oleh sebagian pakar hukum, bahwa yang dimaksudkan mengedepankan teori maslahat dari pada nash (teks al-Qur'an atau Hadis), adalah manakala maslahat tersebut dihadapkan dengan nash yang *zhanny*. Adapun nash yang *qoth'i* menurutnya harus tetap didahulukan, dalam arti maslahat tidak boleh bertentangan dengan nash.

Selanjutnya, *maslahah* menurut al-Buti adalah manfaat yang dituju Syari' (pemegang otoritas Syari'ah) untuk hamba-Nya, yaitu mencakup lima hal, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Sementara manfaat adalah kenikmatan.¹⁸ Menurut al-Buti, sebuah *maslahah* dapat dinilai sebagai *maslahah* hakiki adalah jika memenuhi lima *dlowabith*, yang pertama berkaitan dengan penyingkapan makna universal *maslahah* tersebut, sementara empat yang lain membatasinya dengan cara dihubungkan dengan dalil-dalil syar'i yang spesifik. Lima *dlowabith* tersebut adalah:

- a. *Maslahah* haruslah berkisar dalam lingkup tujuan syari'.
- b. Tidak bertentangan dengan al-Quran.
- c. Tidak bertentangan dengan as-Sunnah.
- d. Tidak bertentangan dengan al-Qiyas.
- e. Tidak mengabaikan *maslahah* yang lebih urgen.¹⁹

¹⁷ Asmawi, *Teori Maslahah dan Relevansinya dengan PerUndang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag. RI, 2010), hlm. 36.

¹⁸ Said Ramadan al-Buti, *Dawabith al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, wa al-Dar al-Muattahidah, 2000), hlm. 69.

¹⁹ Muhammad Mahrus Ali, "Studi Maslahah dalam Perspektif Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti," dalam: <http://amial-ahgaff.blogspot.com/2013/01/studi-maslahah-dalam-perspektif-dr.html>. Di akses pada tanggal 14 maret 2014.

Pandangan tentang *maslahah* selanjutnya, sebagaimana dicetuskan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah,²⁰ bahwa hukum islam sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang dan kemaslahatan. Jika tidak sesuai dengan prinsip tersebut, berarti itu bukan hukum islam. Penelitian yang mencengangkan atas nash al-Qur'an dan Hadis diuraikan oleh Thohir ibn al-'Asyur.²¹ Dalam penelitian tersebut bahwa substansi nilai-nilai kemaslahatan memang menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan bahwa doktrin hukum islam atau syariah senantiasa diliputi oleh *hikmah* dan *illat* yang bermuara pada *maslahah*. Sehingga *maslahah* dapat menjadi sumber hukum dalam menyelesaikan masalah hukum.

Pandangan *maslahah* juga dicetuskan oleh Yusuf al-Qardhawi,²² bahwa *maslahah* juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang hukum, baik muamalah maupun ibadah *mahdhah*. Urgensi *maslahah* juga dirumuskan oleh Allal al-Fasy,²³ bahwa titik beranjak bagi perumusan hukum syariah dan kaidah-kaidah syariah disebabkan oleh adanya *illat* dan *hikmah* hukum. Padahal untuk menggali *illat* dan *hikmah* hukum tidak ada instrumen lain yang paling tepat selain nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam *maslahah*. Teori *maslahah* selanjutnya dirumuskan dalam buku berjudul *al-Muwafaqat* karya al-Syatibi. Menurut al-Syatibi, *maslahah* merupakan teori universal yang tak terbatas. Teori *maslahah* dapat menyebar pada semua prinsip-prinsip dasar dan satuan-satuan kasus dalam hukum islam, sehingga relevansi *maslahah* cukup diperhitungkan dalam sumber hukum islam.²⁴ Selain tokoh-tokoh pencetus teori *maslahah* di

²⁰ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), Juz. III, hlm. 5.

²¹ Thohir ibn al-'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Tunis: Dar Suhnun, Kairo: Dar al-Islam, 2006), hlm. 12.

²² Yusuf al-Qardhawi, *Madkhal li Dirasat al-Syariah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 58.

²³ Allal al-Fasy, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, (Rabat: Maktabah al-Wihdah al-'Arabiyah, tth), hlm. 138.

²⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth), Jilid I, Juz II, hlm. 42.

atas, adalah Mustafa Ahmad al-Zarqa'.²⁵ Ia menyebutkan bahwa sesungguhnya esensi *maslahah* adalah segala sesuatu yang berkontribusi bagi perwujudan dan pemeliharaan 5 prinsip dasar (5 *maslahah* sebagai pelengkap sebagaimana pendapat al-Ghazali) yang diukur bertingkat-tingkat sesuai bobot kebutuhan manusia (katagori *maslahah daruriyyat*, *maslahah hajiyyat* dan *maslahah tahsiniyyat*).

Inti teori *maslahah* untuk menganalisis dan memaknai masalah hukum, bahwa *maslahah* merupakan unsur utama bangunan hukum Islam yang mengikat unsur-unsur terkait lain. Kemaslahatan adalah inti substansi dari hukum Islam. Kehidupan manusia di dunia yang seharusnya, tercipta menurut ajaran dan hukum Islam untuk kemaslahatan umat. Pada dasarnya premis hukum dalam teori *maslahah* dapat ditegakkan dalam aplikasi syariah dengan metode induksi, baik secara tema umum dalam syariat maupun dalam paparan tentang *illat* hukum dari berbagai perintah secara terinci, contoh Al-Qur'an menjelaskan bahwa alasan diperintahkannya, mandi wajib, puasa, dan jihad masing-masing adalah demi kebersihan, keshalehan dan lenyapnya kedzaliman.

Menurut Asmawi,²⁶ teori maslahat ternyata melalui reformulasi oleh para ulama ahli *ushul* sepanjang sejarah hukum Islam. Tentu saja dalam perjalanan sejarah tersebut terdapat dinamika pemikiran dalam formulasi teori maslahat. Maslahat dikemukakan oleh beberapa tokoh atau pakar hukum dengan rumusan substansi yang berbeda namun dalam tataran urgensi *maslahah* mereka bersepakat sepenuhnya bahwa teori *maslahah* merupakan teori *multi-fungsi* dalam berbagai masalah dalam dimensi hukum.

Inti teori *maslahah* untuk menganalisis dan memaknai masalah hukum, bahwa *maslahah* merupakan unsur utama bangunan hukum Islam yang mengikat unsur-unsur terkait lain. Kemaslahatan adalah inti substansi

²⁵ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Istislah wa al-Masalih al-Mursalah fi Syariah wa Ushuli Fiqhiha*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1988), hlm. 41-43.

²⁶ Asmawi, *Teori Maslahah dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag. RI, 2010, h. 35.

dari hukum Islam. Kehidupan manusia di dunia yang seharusnya, tercipta menurut ajaran dan hukum Islam untuk kemaslahatan umat. Pada dasarnya premis hukum dalam teori *maslahah* dapat ditegakkan dalam aplikasi syariah dengan metode induksi, baik secara tema umum dalam syariat maupun dalam paparan tentang *illat* hukum dari berbagai perintah secara terinci.

Berdasarkan uraian teori *maqashid syariah* dan *maslahah* maka teori tersebut untuk menganalisis dan menjelaskan persepsi bankir terhadap hukum riba. Teori ini sangat tepat jika digunakan untuk menganalisis tujuan dan hakikat dari pembangunan fikih *wasathiyah iqtishadiyah* terhadap hukum bunga bank di perbankan.

2. Teori Hermeneutika *Double Movement*

Teori hermeneutika dalam penelitian ini terbatas pada penggunaan teori gerak ganda (*double movement*) yang dikemukakan Fazlur Rahman. Menurut teori gerak ganda, konsep ekonomi syari'ah yang dikembangkan adalah dalam rangka menuju *falakh* (keberuntungan) sebagai tujuan ekonomi Islam. Pada zaman modern ini, situasinya ternyata berbeda, implementasi ekonomi syari'ah yang seharusnya dilakuakn dengan kejujuran dan keadilan justru jauh dari harapan. Begitu pula dengan implementasi ekonomi syari'ah di Indonesia. Guna menganalisis masalah tersebut, teori gerak ganda sangat bermanfaat untuk membedah praktik ekonomi syari'ah di perbankan selama ini. Apakah sistem ekonomi syari'ah pada skim-skim akad yang dilaksanakan di perbankan syari'ah selaras dengan prinsip-prinsip kejujuran di dalamnya.

Ruang lingkup hermeneutika dapat dikategorikan kepada penafsiran kitab suci, sebagai pemahaman *linguistic*, pemahaman eksistensial serta sebagai sistem interpretasi.²⁷ Untuk menjawab dan menemukan makna ekonomi syari'ah, memerlukan pendekatan teks, maupun konteks dalam teori hermeneutika *double movement* Fazlur

²⁷Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Sejarah-Filsafat & Metode Tafsir*, Malang: UB Press, 2011, h. 82-87.

Rahman. Selain itu, peneliti juga menerapkan teori *double movement* Fazlur Rahman untuk melihat secara langsung praktik ekonomi syariah yang muncul dalam konteks sosial Nabi Muhammad SAW saat itu, kemudian diterapkan dalam penerapan ekonomi syari'ah pada konteks saat ini.²⁸

Gerak pertama teori *double movement* yaitu menggali informasi dalam ruang lingkup teks dan konteks lahirnya sebuah prinsip ekonomi dari penerepan “ekonomi syari'ah” di masa lalu, termasuk praktik kegiatan ekonomi di masa Nabi Muhammad SAW. Jelajah kesejarahan ini dilakukan untuk melihat potret *social setting* ekonomi syari'ah di masa lampau serta untuk menemukan pengaruh-pengaruh situasional yang melatari lahirnya konstruksi bermu'amalah waktu itu. Setelah memperoleh informasi dan telaah di masa lampau, selanjutnya peneliti harus kembali melihat pada situasi dan kondisi di masa sekarang melalui gerak kedua.

Gerak kedua berguna untuk memotret dan membandingkan penerapan ekonomi syariah dalam situasi saat ini. dalam gerak kedua penelitian akan mencoba menerapkan konstruksi penerapan ekonomi syariah di masa lalu kepada konstruksi penerapan ekonomi syariah di masa sekarang. Apakah konstruksi penerapan ekonomi syariah di masa lalu

²⁸Dalam memahami dan menafsirkan sumber utama Islam dalam hal ini Al-qur'an, Rahman menggunakan teori *double movement* (gerak ganda). Hubungan yang dialektis antara dua unsur yang terdapat dalam Al-qur'an yaitu wahyu ketuhanan yang suci di satu sisi dan sebagai sejarah kemanusiaan yang profane di sisi yang lain. Dua unsur inilah yang menjadi tema sentral metode Rahman. Permasalahannya ada pada bagaimana cara mendialogkan antara dua sisi tersebut agar nilai-nilai kewahyuan bisa selalu sejalan dengan sejarah umat manusia. Gerak pertama pada teori Rahman menghendaki adanya memahami makna Al-quran dalam konteks kesejarahannya baik secara spesifik dimana kejadian itu berlangsung (mikro) maupun secara global bagaimana kondisi sekitar kejadian itu pada umumnya (makro). Dari sini bisa diambil pemahaman yang utuh tentang konteks normatif dan historis suatu ayat, maka timbullah istilah *legal specific (practic temporal)* dan moral ide (*normative universal*). Kemudian gerak Kedua yang dilakukan adalah upaya untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai sistematis dan umum dalam konteks penafsiran pada era kontemporer yang tentunya mensyaratkan sebuah pemahaman yang kompleks terhadap suatu permasalahan. Disini terlihat keberanjakan Rahman dari metodologi *ushul fiqh* lama yang cenderung literalistik dan menurutnya perlunya penguasaan ilmu-ilmu bantu yang bersifat kealaman maupun humaniora agar para penafsir terhindar dari pemahaman yang salah. Fazlur Rahman, *Islam And Modernity: Transformation of An Intellectual Tradition*, Chicago And London: The University of Chicago Press, 1982, h. 5. Lihat Mohamed Imran Mohamed Taib, *Fazlur Rahman (1919-1998): Perintis Tafsir Kontekstual*, Singapore: The Reading Group, 2007, h. 9-10. Lihat Abdul Halim, “Menimbang Paradigma Kontemporer Metode Pemikiran Hukum Islam,” Makalah, 2004, h. 6.

masih relevan dan memenuhi rasa keadilan jika diterapkan di masa sekarang dengan situasi yang berbeda. Melalui gerak kedua inilah teks, konteks tidak cukup untuk menjustifikasi cara ber-ekonomi sehingga masih diperlukan kontekstualisasi ekonomi syariah melalui penerapan ekonomi syariah di masa sekarang.

3. Teori *Wasathiyah*

Wasathiyah adalah sebuah kerangka berpikir, bersikap dan bertindak laku yang ideal, penuh keseimbangan dan proposional dalam syariat Islam dan seharusnya tertanam dalam pribadi muslim. Arus *wasathiyyah* secara teoritik dipopulerkan oleh Yusuf Qardhawi, seorang cendekiawan muslim terkenal asal Mesir yang hijrah ke Doha Qatar. Namun, beliau sendiri mengakui, *wasathiyah* bukanlah ide asli dari beliau, melainkan sebuah prinsip dasar yang melandasi semua ajaran Islam, baik aqidah, syariah maupun akhlak.²⁹ Lebih dari itu kalau kita cermati tatanan alam semesta yang rapi, tertib dan serba teratur ini akan kita temukan bahwa semuanya telah Allah desain berdasarkan pilar *wasathiyah*, keseimbangan dan keserasian.

Dalam Al-quran umat Islam disebutkan dalam surah al-Baqarah: 143, sebagai *ummatan wasatha*, umat yang ideal, penuh keseimbangan dan menegakkan keadilan. Selanjutnya ayat ini dijelaskan oleh ayat lainnya dalam surat Ali Imrah: 110 bahwa maksud *ummatan wasatha* adalah *khaira ummah* (umat terbaik). Karenanya, hampir semua ahli tafsir sepakat bahwa *wasathiyah* mengandung makna yang terbaik, yang ideal, yang seimbang, yang proposional.

Allah swt berfirman:

Demikian Kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat

²⁹Abu Amar. "Pendidikan Islam Wasathiyah ke-Indonesia-an." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 2.1 (2018): 18-37.

berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. (al-Baqarah: 143)

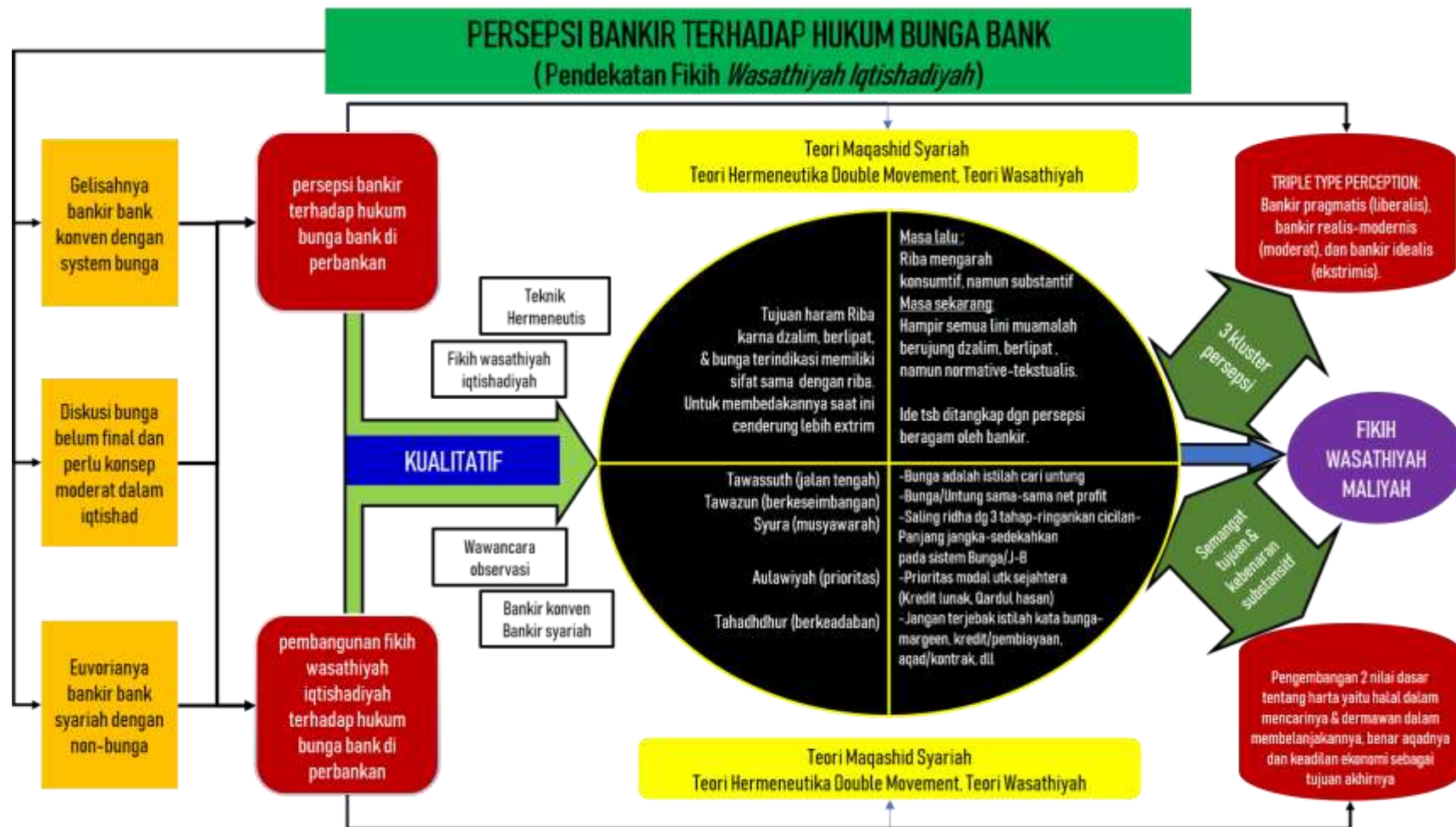
Sedangkan moderat hanya merepresentasikan posisi-tempat di antara dua ujung yang bertentangan. Moderat mencerminkan sikap kompromi dengan jalan *win-win solution*, dan dengan demikian kaum oportunis sering menjadikan moderat sebagai pilihan untuk lari dari wilayah yang jelas menuju wilayah yang abu-abu.

Maka jelas tidak tepat jika *wasathiyah* diindentikkan dan dipadankan dengan moderat. Moderat berasal dari bahasa Inggris, *moderate* artinya selalu menghindari diri dari perilaku yang ekstrim atau sikap yang identik dengan mengambil jalan tengah. *Wasathiyyah* mempunyai kandungan makna esensial yang lebih komprehensif, lebih luas dari sekadar moderat, kerana keterikatannya dengan syariat Islam. Sikap ini mestinya sudah melekat pada diri setiap muslim dan siapa saja yang ingin menjadi perekat umat. Tidak fanatik sambil terus belajar dan mendalami agama serta menghindari perdebatan kontraproduktif tentang masalah *khilafiyah ijtihadiyah*.³⁰

C. Kerangka Pikir

Untuk memudahkan penulis mengkaji penelitian ini maka disusun kerangka pikir mengenai persepsi bankir terhadap hukum bunga bank (pendekatan fikih *wasathiyah iqtishadiyah*) yang terbagi ke dalam beberapa pikiran, yaitu penulis melakukan elaborasi mengenai persepsi bankir terhadap hukum riba, dan kemudian melakukan analisis hukum mengenai pembangunan fikih *wasathiyah iqtishadiyah* terhadap hukum bunga bank di perbankan. Lebih lanjut penulis ilustrasikan dalam kerangka pikir berikut:

³⁰Syukree Langputeh, & Depi Fitriani. "Implementasi Pendidikan Perdamaian (Peace Education) Dalam Rangka Transformasi Konflik Di Thailand Selatan." (2017). h. 53.



Skema Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian persepsi bankir terhadap hukum bunga bank (pendekatan fikih *wasathiyah iqtishadiyah*) merupakan penelitian hukum empiris-normatif. Penelitian hukum empiris dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*field research*) adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan.

Adapun penelitian hukum normatif menggunakan bahan-bahan hukum berupa Alquran dan sunnah. Dalam penelitian ini seorang peneliti selalu mendasarkan pemikirannya pada aturan sumber hukum sebagai bahan hukum utama penelitian. Penelitian atas bahan-bahan hukum seperti Alquran dan hadis sebagai bahan hukum normatif.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian persepsi bankir terhadap hukum bunga bank (pendekatan fikih *wasathiyah iqtishadiyah*) berfokus pada persepsi hukum riba yang akan dianalisis dengan pendekatan utama fikih moderat dibidang ekonomi islam. Selain itu, penelitian juga di dukung dengan pendekatan kontekstual ekonomi syariah, pendekatan filosofis (*philosophical approach*)³¹ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³²

C. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Hukum

Bahan hukum empiris berupa data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber primer, yakni bankir. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara sesuai dengan permasalahan yang diteliti

³¹Pendekatan filsafat hukum berusaha mengungkapkan hakikat hukum dengan menemukan landasan terdalam dari keberadaan hukum sejauh yang mampu dijangkau akal budi manusia. Lihat Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 47.

³²Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian hukum untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 94.

persepsi bankir terhadap hukum riba (pendekatan fikih *wasathiyah iqtishadiyah*). Sumber hukum sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.³³

Adapun bahan hukum normatif yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bahan, yakni bahan primer, sekunder dan tertier. Bahan primer meliputi sumber hukum Islam yaitu Alquran dan hadis, serta pemikiran ulama. Selain sumber primer tersebut, sebagai bahan pendukung digunakan pula sumber sekunder dan tertier. Sumber sekunder yaitu karya-karya atau teori-teori yang membahas sumber primer, seperti, ketentuan hukum terkait, serta pemikiran para pakar. Adapun sumber tersier yaitu hal-hal yang mendukung sumber primer dan sekunder seperti, kamus dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum empiris berupa data lapangan dari hasil wawancara terhadap informan dan responden. Kemudian dipadukan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder disesuaikan dengan isu hukum dan pendekatan yang telah ditetapkan. Pengumpulan bahan hukum melalui pendekatan kontekstual ekonomi syariah, yang relevan dengan isu hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum memfokuskan studi pustaka dengan melacak seluruh dokumen utuh Alquran dan hadis yang terkait tema penelitian. Pendekatan konseptual atau *conseptual approach* yang lebih esensial dilakukan adalah penelusuran buku-buku hukum (*treaties*) yang di dalamnya banyak terkandung konsep-konsep hukum,³⁴ dan pendekatan filosofis untuk mengkaji tujuan dan hakikat yang terkait dengan persepsi bankir terhadap hukum bunga bank (pendekatan fikih *wasathiyah iqtishadiyah*).

Bahan hukum yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif dan deduktif. Disebut deskriptif karena dalam penelitian menggambarkan

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2008, h. 12.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 194-196.

objek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, cermat dan mendalam terhadap kajian penelitian. Adapun metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Mengenai hal ini, penulis akan membahas persepsi bankir terhadap hukum riba secara umum terlebih dahulu. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan persepsi bankir terhadap hukum bunga bank (pendekatan fikih *wasathiyah iqtishadiyah*).

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif-preskriptif. Kualitatif artinya mengukur dan menguji data dengan konsep teori. Dimana, dengan metode ini diharapkan memperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Sedangkan preskriptif artinya memberikan ketentuan terhadap persepsi bankir terhadap hukum bunga bank (pendekatan fikih *wasathiyah iqtishadiyah*).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab penting, yaitu Bab I tentang pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian.

Bab II tentang Kajian Pustaka, terdiri dari Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, dan Kerangka Pikir. Teori yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori *maqasid Syariah*, teori *hermeneutika double movement* Fazlur Rahman, teori *wasathiyah*, konsep *wasathiyah iqtishadiyah*, konsep aqad dalam muamalah, dan konsep bank.

Bab III tentang Metode Penelitian terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Bahan Hukum dan Sumber Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Hukum, dan Sistematika Penulisan.

Bab IV tentang Pembahasan dan Analisis terdiri dari Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba di Perbankan, dan Pembangunan Fikih *Wasathiyah Iqtishadiyah* Terhadap Hukum bunga bank di Perbankan. Pada sub bagian pertama yaitu tentang persepsi bankir akan membahas tentang praktek riba dalam lalu lintas keuangan dan perbankan, riba dalam transaksi utang

piutang, riba dalam transaksi jual beli, praktik bunga dalam dunia perbankan, opini Tentang Bankir dan Bunga bank dalam dunia kontemporer, opini pegawai bank adalah pemakan riba, opini pegawai bank adalah orang fasik, pemahaman Bankir mengenai Hukum Bunga Bank, persepsi dan Sikap Bankir Terhadap Hukum Bunga Bank. Adapun pada sub bagian kedua yaitu tentang pembangunan Fikih Wasathiyah akan menguraikan tentang bunga bank dalam Sistem Keuangan Moneter, interpretasi Moderat dan Telaah Ulang *Maqashid Syariah* tentang larangan riba, prinsip wasathiyah dalam pengembangan fikih moderat di bidang keuangan.

Bab V tentang Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Persepsi Bankir Terhadap Hukum Bunga Bank di Perbankan

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mendefinisikan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sehingga lembaga perbankan merupakan intisari dari sistem keuangan dari setiap negara.

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan.³⁵ Bank melayani kebutuhan pembiayaan, melancarkan sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Menurut *Black's Law Dictionary* bank dirumuskan:³⁶

An institution, usually incorporated, whose business to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes.

Selanjutnya Pierson memberikan definisi bank adalah “*bank is a company which accept credit, but didn't give credit.*”³⁷ Teori Pierson ini menyatakan bahwa bank dalam operasionalnya hanya bersifat pasif saja, yaitu hanya menerima titipan uang saja.³⁸

³⁵ Dari aspek bahasa Bank berasal dari kata Italia “*banca*” yang berarti *bance*, yaitu suatu bangku tempat duduk. Bangku inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi *Bank*. Bank termasuk perusahaan *industri jasa* karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Lihat Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 13

³⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 7.

³⁷ Terjemah bebas: bank adalah badan usaha yang menerima kredit tetapi tidak memberikan kredit.

³⁸ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 1.

Berbeda dengan pendapat di atas, G.M. Berryn Stuart memiliki pendapat sendiri tentang bank. Menurutnya, “*bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to the other, eventhough they should supply the new money.*”³⁹ Selanjutnya B.N. Ajuha mengemukakan bank adalah *bank provided means by which capital is transferred from those who cannot use it profitably to those who can use it productively for the society as whole Bank provided which channel to invest any risk and at a good rate of interest.*⁴⁰ Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik.⁴¹

Selanjutnya H. Malayu S.P. Hasibuan memberikan pengertian bahwa bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, bukan hanya mencari keuntungan saja. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa bank adalah badan yang mempunyai tugas utama melakukan penghimpunan dana dari pihak ketiga dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa bank memiliki tugas menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) ke pihak yang kekurangan dana (*defisit*).⁴² Dari sudut legal, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan Pasal 1 huruf (a), menyatakan:⁴³ ”Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”. Sementara itu Undang-undang Nomor 7

³⁹ Terjemah bebas: Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam.

⁴⁰ Terjemah bebas: bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat.

⁴¹ Malayu S.P. Hasibuan, Op., Cit., hlm 2.

⁴² Arthesa Ade dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT. Indeks, 2006), hlm. 5.

⁴³ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, Bab I, Pasal 1 huruf (a).

Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (1), menyebutkan,⁴⁴ bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan Pasal 1 ayat (2), mengatakan: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".⁴⁵

Adapun bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perbankan Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

1. Praktek Riba dalam Lalu Lintas Keuangan dan Perbankan

Menurut syariah (hukum Islam), memakan riba termasuk salah satu dosa besar. Namun pada praktiknya masih banyak masyarakat yang bingung dengan praktik riba tersebut dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang terkait dengan transaksi perbankan. Riba menurut bahasa berarti lebih (bertambah). Adapun menurut syara' berarti akad yang

⁴⁴ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bab I, Pasal 1 ayat (1).

⁴⁵ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (2).

terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya. Riba secara bahasa bermakna tambahan atau meminta kelebihan uang dari nilai awal. Secara lebih spesifik lagi riba adalah meminta tambahan uang dari pinjaman awal baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Dalam hal ini pinjam meminjam atau jual beli tersebut masuk kategori transaksi yang haram.⁴⁶

Secara etimologis, bunga dalam *The American Heritage Dictionary of the English Language* didefinisikan sebagai *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*. Definisi senada dapat ditemukan dalam *Oxford English Dictionary* diartikan sebagai *money paid for use of money lent (the principal) or for forbearance of a debt, according to a fixed ratio (rate per cent)*. Dalam *the Legal Encyclopedia for Home and Business* didefinisikan sebagai *compensation for use of money which is due*.¹³ Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dalam persentase dari uang yang dipinjamkan atau sejumlah uang yang dijumlahkan atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal yang dinyatakan dengan persentase dan kaitanya dengan suku bunga.⁴⁷

Secara sederhana bunga adalah balas jasa atas pemakaian dana dalam perbankan disebut dengan bunga. Dalam rangka balas jasa/ bunga kepada penyalpin (penabung), maka bank akan meminjamkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha (bukan modal awal) untuk Investasi, Modal Kerja, maupun Perdagangan. Atas keuntungan usaha yang diperoleh debitur dengan memakai/ mempergunakan kredit dari bank, maka debitur menunjukkan tindakan yang terpuji dengan memberikan balas jasa/ bunga atas pemakaian dana tersebut kepada

⁴⁶Asma Nur Lailal Fahriyah. *Bunga bank dalam perspektif DR. KH MA Sahal Mahfudh*. Diss. UIN Walisongo, 2018. h. 7.

⁴⁷Nurhadi, *Bunga Bank antara Halal dan Haram*, Jurnal Nur El-Islam, Vol. 2, No. 2, Oktober 2017, h. 54.

bank yang bersangkutan. Selisih bunga yang diterima bank dari debitur dengan bunga yang dibayarkan kepada penyimpan dana di Bank, itulah yang menjadi keuntungan Bank, inilah yang dipergunakan membiayai operasional bank secara keseluruhan.⁴⁸

Dalam terminologi dan pandangan Kristen, pada umumnya pengambilan bunga seperti dalam dunia perbankan adalah dilarang. Mereka merujuk masalah pengambilan bunga kepada Kitab Perjanjian Lama yang juga diimani oleh orang Kristen. St. Basil (329 - 379) yang menganggap bahwa mereka yang memakan bunga sebagai orang yang tidak berperikemanusiaan.⁴⁹ Sebab, mengambil bunga adalah mengambil keuntungan dari orang yang memerlukan. Bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan. Mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Keinginan atau niat untuk mendapat imbalan melebihi apa yang dipinjamkan adalah suatu dosa. Bunga harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam pandangan agama Nasrani, harga barang yang ditinggikan untuk penjualan secara kredit juga merupakan bunga yang terselubung.⁵⁰

Bunga bank dalam kajian hukum (fikih) Islam, merupakan masalah kontemporer yang melahirkan dua paradigma cara berijtihad yang berbeda dalam menentukan status hukumnya, apakah termasuk riba yang diharamkan atau bukan? yaitu paradigma tekstual dan kontekstual. Perbedaan yang mendasar antara kedua paradigma tersebut adalah cara melihat *illat* (sebab adanya hukum) pengharaman riba sebagai hukum asal. Paradigma tekstual memahami *illat* pengharaman riba terletak pada adanya tambahan, sebagaimana makna yang dikandung oleh kata riba itu sendiri dan berdasarkan konfirmasi nas,

⁴⁸*Ibid.*, h. 54-55.

⁴⁹Hady Sutjipto, "Teori Bunga Dalam Perspektif Filsafat Ilmu" *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 1.1 (2017). h. 82.

⁵⁰Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana, 2010. h. 70.

bahwa hanya modal pokok yang dapat diambil, sehingga apabila illat itu terdapat di bunga bank, maka bunga bank tersebut adalah riba, dan hukumnya adalah haram. Kelompok paradigma kontekstual memahami nas dari pengharaman riba secara konteks, yaitu adanya unsur zulm atau eksploitasi yang terjadi pada waktu diharamkannya riba. Sehingga kondisi tersebut bila dijumpai pada pemberlakuan bunga bank, barulah bunga bank itu dikategorikan sebagai riba yang status hukumnya jelas, yaitu haram. Kelompok ini melihat bahwa apa yang terjadi di bunga bank tidak ada unsur zulm atau eksploitasi, sehingga mereka menetapkan bahwa bunga bank tidak termasuk riba, dan hukumnya boleh (halal).⁵¹

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi 2, yaitu riba dalam transaksi utang piutang (untuk transaksi pinjam meminjam), dan riba dalam praktik jual beli.

a. Riba dalam Transaksi Utang Piutang

Riba dalam transaksi utang piutang terdiri dari dua bentuk. Yaitu riba qardh dan riba jahiliyah. Riba Qardh, yaitu sejumlah kelebihan tertentu yang diminta oleh pihak yang memberi utang terhadap yang berutang saat mengembalikannya.⁵² Misalnya si A bersedia meminjamkan si B uang sebesar Rp. 300.000, asalkan si B bersedia mengembalikannya sebesar Rp. 325.000.

Adapun riba Jahiliyah, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya tepat waktu. Misalnya si A meminjam Rp. 1.000.000 kepada si B dengan janji waktu setahun pengembalian utangnya. Setelah jatuh temponya, si A belum bisa mengembalikan utangnya kepada si B. Maka B mau menambah jangka waktu pengembalian utang, asalkan si A bersedia memberi tambahan

⁵¹Muhammad Syarif Hasyim, *Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*, Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 1, April 2008, h. 56-57.

⁵²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani, 2001. h. 65.

dalam pembayaran utangnya. Sehingga tanggungan utang si A menjadi berlipat ganda.⁵³

b. Riba dalam Transaksi Jual Beli

Riba dalam transaksi jual beli, terdiri dari dua macam yaitu riba fadhl dan riba nasi'ah. Riba Fadhl, yaitu jual beli dengan cara tukar barang sejenis namun dengan kadar atau takaran yang berbeda untuk tujuan mencari keuntungan. Misalnya cincin emas 24 karat seberat 5 gram ditukar dengan emas 24 karat namun seberat 4 gram. Kelebihannya itulah yang termasuk riba.⁵⁴

Adapun riba Nasi'ah, (riba karena adanya penundaan), adalah riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada transaksi jual beli dengan tukar menukar barang baik untuk satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya. Misalnya membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah buah-buahan tersebut besar atau layak dipetik.⁵⁵

Dari segi konteks atau *illat*, pengharaman riba dalam Alquran adalah karena adanya faktor *zulm*, yaitu memungut tambahan utang dari pihak-pihak yang seharusnya ditolong. Sementara konteks bank adalah niaga (*tijarah*) untuk mencari keuntungan bersama antara pihak yang punya modal (investor), pihak yang membutuhkan modal (debitur/pengusaha), dan pihak perbankan sebagai mediator dan penyedia jasa. Sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan tolong menolong antara si kaya dan si miskin, melainkan upaya kerjasama dalam mengembangkan modal dengan menjadikan bank sebagai mediator antara penabung, pengusaha dan bank. Karena itu, aspek aniaya (ketidakadilan) di sini amat kecil kemungkinan terjadi

⁵³Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana, 2010.

⁵⁴Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*. Mediakita, 2011.

⁵⁵M. Nur Rianto Al Arif, "Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis." (2012), h. 12.

sebab masing-masing pihak telah saling rela dan mengetahui hak serta kewajibannya masing-masing.⁵⁶

Dengan konsep seperti itu, akhirnya mereka sampai kepada satu kesimpulan bahwa antara riba dengan bunga bank memiliki konteks dan esensi yang berbeda. Riba dianggap kelebihan yang diambil dari pinjaman yang ditujukan untuk keperluan konsumtif, sedangkan bunga bank adalah kelebihan atas pinjaman yang ditujukan dalam rangka, kebutuhan produktif. Dengan analisis seperti itu, penganut paradigma ini mengharuskan mereka, meninggalkan *qiyâs* dan lebih memilih mengambil metode *istihsân* sebagai dasar untuk sampai kepada suatu konklusi hukum yang dianggap lebih tepat untuk dijalankan. Di antara tokoh dan ahli hukum Islam yang menganut paradigma kontekstual dalam menilai permasalahan bunga bank adalah Munawir Syadzali, Quraish Shihab, Umar Shihab dan M. Dawam Raharjo (masing-masing adalah ulama fikih dan cendekiawan muslim Indonesia). Demikian pula, Fazlur Rahman, Mahmoud Syaltout, dan Mustafa Ahmad al-Zarqa'.⁵⁷

Menurut Munawir Syadzali dalam (Maula, 2004:38-39), bank adalah suatu lembaga yang terhormat, dan bunga adalah suatu mekanisme bank untuk pengelolaan peredaran uang masyarakat. Anggota masyarakat yang memiliki modal dapat bahkan dihibau untuk menitipkan uangnya yang tidak digunakan untuk jangka waktu tertentu. Kemudian bank meminjamkannya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan modal usaha, untuk jangka waktu tertentu pula. Adapun yang meminjam dana tersebut umumnya, untuk keperluan modal usaha, bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Maka berdasarkan prinsip "jangan ada pihak yang dirugikan", tidaklah adil bila, pihak pemilik modal (penabung) yang telah kehilangan hak untuk mempergunakan modalnya dalam jangka waktu tertentu dan

⁵⁶Muhammad Syarif Hasyim, *Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*, Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 1, April 2008, h. 53.

⁵⁷*Ibid.*

juga, pihak bank yang menjadi perantara tidak mendapat imbalan atau kompensasi dari pengorbanan dan jasanya itu. Memang, dapat pula, peminjam dana itu gagal dan merugi dalam usahanya, tetapi pada umumnya masyarakat menerima, dengan baik (rela) dan merasa diuntungkan oleh sistem bunga yang sehat dalam perbankan. Justru dengan penetapan besarnya presentasi bunga yang akan diterima bagi pemilik modal dan besarnya presentasi bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam menjadikan keduanya, yakin akar kerjasama tersebut.⁵⁸

Sejalan dengan hal di atas, Umar Shihab menyebutkan bahwa ada empat alasan mengapa bunga bank dihalalkan. *Pertama*, jumlah bunga yang dipungut dan diberikan pihak bank kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan riba yang berlaku pada zaman jahiliyah; *kedua*, pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank atau nasabahnya memperoleh keuntungan besar atau sebaliknya tidak akan merasa dirugikan salah satunya dengan pemberian bunga; *ketiga*, tujuan pengambilan kredit dari debitur pada zaman jahiliyah adalah untuk konsumtif, sedangkan sekarang untuk tujuan produktif; dan. *keempat*, adanya kerelaan antara kedua pihak yang bertransaksi. Atas dasar itulah, tidak sepantasnya bunga bank diharamkan, sebab meskipun identik dengan riba, tetapi tujuan dan metode pelaksanaannya jauh berbeda dari apa yang dipraktikkan pada masa Jahiliyah yang telah diharamkan dalam Alquran. Oleh karena itu, bunga bank lebih tepat dianalogikan "dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka (*an taradin*).⁵⁹

Begitu pula, pendapat Raharjo (1996:612-613) bahwa bank sebenarnya adalah modus untuk melaksanakan lembaga *bay'* (jualbeli), *tijarah* (niaga) secara suka rela, dan pencegahan sifat riba, yang *ad'afan muda'afah*. Sehingga dalam operasionalnya, minimal sebagai perantara, bank membutuhkan komisi, yang pengaturannya

⁵⁸*Ibid.*, h. 54.

⁵⁹*Ibid.*

ditentukan dan dipantau oleh pemerintah melalui Bank Central. Dengan demikian, bank adalah jalan keluar dari praktek riba karena unsur yang mengharamkan riba, yaitu mengandung paksaan, berlipat ganda dan adanya syarat yang memberatkan, seperti tingkat bunga yang terlampau tinggi, telah hilang dengan adanya peraturan perbankan dan campur tangan pemerintah dalam memantau dan menetapkan aktivitas perbankan.⁶⁰

Meskipun pernyataan di atas tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa bunga bank adalah halal, tetapi dengan mengakui eksistensi bank sebagai jalan keluar dari praktek riba, mengindikasikan bahwa sebetulnya ia dapat mentolerir keberadaan bunga bank. Tetapi sungguhpun demikian, ia tetap menghargai bagi mereka yang tetap berkeyakinan bahwa, bunga bank adalah riba, dan pembentukan “bank-bank yang berbasis syari’ah” di Indoneisa sebagai alternatif untuk menghindari riba, serta usaha untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat akan lembaga perbankan dalam kehidupannya.⁶¹

Tampaknya, pendirian Raharjo di atas sejalan dengan pandangan Mustafâ Ahmad al-Zarqâ’, guru besar hukum Islam dan hukum perdata Universitas Syiria. Selain masih mentolerir eksistensi bunga bank karena darurat, ia juga memberi alternatif dan mendukung keberadaan bank syari’ah. Menurut dia, sistem perbankan yang kita terima sekarang ini merupakan realitas yang tak dapat dihindari. Karena itu umat Islam boleh bermuamalah dengan bank konvensional itu atas pertimbangan dalam keadaan darurat. Akan tetapi umat Islam harus berusaha mencari jalan keluar dengan mendirikan bank tanpa sistem bunga untuk menyelamatkan umat Islam dari cengkraman bank bunga (bank konvensional).⁶²

Lain halnya dengan Mahmoud Syaltout dalam Salam (2003:93) yang mengemukakan bahwa kemajuan peradaban manusia telah

⁶⁰*Ibid.*, h. 54-55.

⁶¹*Ibid.*, h. 54.

⁶²*Ibid.*, h. 55.

menimbulkan aktivitas perekonomian baru dan jenis transaksi baru (bank). Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang baik menurut tuntutan *shara'*, yaitu tidak ada praktek eksploitasi, maka hal itu dapat dibenarkan. Dengan pertimbangan seperti itu, di sinilah pentingnya menilai aspek moral sebagai unsur pelarangan riba. Sebab sedih rasanya bila mengabaikan bentuk riba yang bagaimanakah menurut sejarah yang dilarang, mengapa Alquran mencelanya, sebagai perbuatan keji dan kejam, mengapa menganggapnya sebagai tindakan eksploitatif, dan apa sebenarnya fungsi bunga bank pada saat ini.⁶³

Berdasarkan analisis dan pandangan kelompok kontekstual di atas, ada kecenderungan menilai pengertian riba yang diharamkan dari kaca mata konteksnya (kondisi *riil*), yaitu adanya unsur eksploitasi. Hal ini didasarkan pada beberapa riwayat ahli tafsir klasik dan modern yang mereka pegangi. Selain itu, pertimbangan kondisi riil bahwa keberadaan bank sekarang ini merupakan kebutuhan atau *maslahat al-'ammah wa aldaulah*, banyak orang tertolong dan teruntungkan dibanding dengan orang yang teraniaya dengan keberadaannya. Walaupun demikian, sebagian mereka tetap mendukung akan keberadaan sistem perbankan alternatif yang menggunakan sistem syari'ah sebagai upaya pengembangan sistem perbankan dan menghargai aspirasi mayoritas kaum muslim. Dengan demikian, dari dua peta paradigma di kalangan ulama fikih Islam tersebut di atas, titik perbedaan atau *mahal al-nizâ'* (utamanya) terletak pada pemakaian *illat* riba dalam menilai hukum bunga bank sehingga konklusi yang dihasilkan pun juga berbeda. Namun demikian, pada prinsipnya, semuanya sepakat bahwa riba adalah bentuk muamalah yang tidak dapat ditolerir.⁶⁴

2. Praktik Bunga dalam Dunia Perbankan

Disadari atau tidak, praktik riba banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yang terkait dengan bunga bank. Bunga bank

⁶³*Ibid.*

⁶⁴*Ibid.*, h. 56.

adalah keuntungan yang diambil oleh bank dan biasanya ditetapkan dalam bentuk persentase seperti 5% atau 10% dalam jangka waktu bulanan atau tahunan terhitung dari jumlah pinjaman yang diambil nasabah.

Bunga bank digunakan oleh bank-bank konvensional sedangkan bank syariah biasanya menggunakan istilah margin keuntungan. Bagi bank konvensional, bunga bank menjadi tulang punggung untuk menanggung biaya operasional dan menarik keuntungan. Selain itu bunga bank memiliki beberapa manfaat bagi bank dan nasabah seperti berikut ini:

Pertama, bunga pinjaman merupakan balas jasa yang diberikan nasabah kepada bank atas produk bank yang dibeli nasabah. Bunga Pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada nasabah oleh bank khusus untuk nasabah yang memiliki pinjaman di bank, contohnya adalah bunga kredit. *Kedua*, bunga simpanan adalah harga yang harus dibayar bank kepada nasabah (yang memiliki simpanan), selain itu bunga juga merupakan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (bagi nasabah yang memperoleh pinjaman). Bunga Simpanan, yaitu bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Contohnya adalah bunga tabungan dan bunga deposito.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank konvensional. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman saling mempengaruhi satu sama lainnya. Ketika bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

Bunga bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Riba bisa saja terjadi pada pinjaman yang bersifat konsumtif, maupun pinjaman yang bersifat produktif. Dan pada hakikatnya riba dalam bunga bank memberatkan peminjam.

Meskipun hukum bunga bank sudah jelas, namun interpretasi tentang bunga masih menuntut para pemikir dan beberapa organisasi

masyarakat islam memberikan pandangan masing-masing. Majelis Tarjih Muhammadiyah misalnya, menurut lembaga ini, hukum tentang bunga bank dan riba dijelaskan bahwa Riba hukumnya haram dengan nash sharih Alqur'an dan As-Sunnah. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Adapun bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytabihat (masih samar-samar, belum jelas hukumnya sehingga butuh penelitian lebih lanjut).⁶⁵

Selanjutnya adalah Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama. Menurut lembaga yang berfungsi dalam memberikan fatwa atas permasalahan umat ini, hukum bank dengan praktek bunga di dalamnya sama seperti hukum gadai. Terdapat 3 pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini yaitu: pertama, hukumnya haram, sebab termasuk utang yang dipungut secara rentenir. Kedua, hukumnya adalah Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad atau perjanjian kredit. Ketiga, hukumnya adalah Syubhat (tidak tentu halal haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya. Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram.⁶⁶

Guna menghindari praktek riba pada bunga bank konvensional maka saat ini di Indonesia sudah mulai banyak Bank Syariah sebagai pilihan umat Islam untuk bertransaksi sesuai syariah Islam. Pada praktiknya, sebagai pengganti sistem bunga tersebut, maka bank Islam menggunakan berbagai macam cara yang digunakan dalam akad kredit dan tentunya bersih dan terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur riba. Diantaranya yaitu melalui system wadiah, yaitu titipan uang atau barang dan surat berharga atau deposito. Selanjutnya melalui akad

⁶⁵Aminadin, Encang, and Khoirussoleh Al Bahri. "Penerapan Hukum Islam Terhadap Proses Transaksi di Perbankan Syari'ah." *AL MUNAZHZHARAH* 1.1 (2017): 56-75.

⁶⁶Abdul Salam, "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 3.1 (2016): 77-108.

Mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal dengan pelaksana atas dasar perjanjian *profit and loss sharing*. Selanjutnya melalui akad Musyarakah yang berarti persekutuhan. Kedua belah pihak yang berpartisipasi mengelola usaha patungan ini dan menanggung untung ruginya bersama atas dasar perjanjian tersebut. System lainnya adalah melalui akad Murabahah, yaitu jual beli barang dengan tambahan harga (margin keuntungan) atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Selanjutnya ada pula melalui prinsip Qardh Hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah yang baik, terutama nasabah yang punya deposito di bank Islam.

Bank Islam juga menggunakan modal yang terkumpul untuk investasi langsung dalam berbagai bidang usaha yang menguntungkan. Sistem investasi ini biasanya menggunakan imbal balik dalam bentuk bagi hasil sebagai pengganti praktek bunga bank yang selama ini terjadi.

Tabel Perbandingan Sistem Bunga dan Bagi Hasil

Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah modal yang dipinjamkan	Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan nasabah untung atau rugi	Tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

Eksistensi bunga diragukan oleh beberapa kalangan	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil
---	---

Manajemen keuangan di dunia perbankan, ada beberapa factor yang memengaruhi perlunya suku bunga., yaitu sebagai berikut: pertama, faktor kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Kedua, faktor persaingan. Dalam merebut dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan persaingan. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% per tahun, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikan diatas bunga pesaing, misalnya 17% per tahun. Ketiga, factor kebijakan pemerintah. Dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat menentukan batas minimal atau maksimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun pinjaman. Dengan ketentuan batas minimal atau maksimal bunga simpanan maupun pinjaman tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Keempat, adalah factor target laba yang diinginkan. Target laba yang diinginkan merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, pihak bank harus hati-hati dalam menentukan persentase laba. Kelima adalah factor jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, halaman ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko dimasa mendatang. Demikian pula, sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif rendah.

Keenam adalah faktor kualitas jaminan. Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh dengan jaminan sertifikat deposito bunga

pinjaman akan lebih rendah jika dibandingkan dengan jaminan sertifikat tanah. Ketujuh, factor reputasi perusahaan. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil. Kedelapan, factor produk yang kompetitif. Maksudnya adalah produk yang dibiayai kredit tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

Kesembilan adalah faktor hubungan baik. Biasanya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua, yaitu nasabah primer dan nasabah sekunder. Pengholongan ini didasarkan kepada keaktifan dan loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Kesepuluh adalah faktor jaminan pihak ketiga. Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko-risiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya pihak yang memberikan jaminan *bonafide*, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, sehingga bunga yang dibebankan pihak berbeda.⁶⁷

3. Opini Tentang Bankir dan Bunga Bank dalam Dunia Kontemporer

Bunga bank dalam paradigma kontemporer dan postmodern memiliki wajah yang berbeda. Berbagai pemikiran tentang hukum bunga bank menjadi lebih realistis. Munculnya opini seperti itu, tentu muncul dan berasal dari pemikiran seorang muslim yang memahami islam dalam koridor yang lebih rasional. Memang benar, dalam Alqur'an diajarkan bahwa seorang muslim itu harus masuk ke dalam islam secara kaffah atau menyeluruh, akan tetapi kita harus memposisikan diri sebagai makhluk yang hidup di zaman ini dengan konsep ibadah yang tetap berkiblat kepada Alquran, dan Hadits, serta ijma'.

⁶⁷Zainul Arifin, *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012. h. 90.

Masalah ibadah merupakan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT, sedangkan masalah muamalah merupakan hubungan horizontal antara kita dengan makhluk lain di muka bumi ini. Dalam bermuamalah, kita juga hidup bukan dinegara yang menganut pemerintahan yang berbasis islam sehingga kehidupan muamalah pun seharusnya memiliki konteks tersendiri.

Ada beberapa point penting yang memperlihatkan bagaimana eksistensi sifat dan sikap masyarakat yang lebih tendensius dan ekstrim dalam memahami masalah bunga bank.

a. Opini Pegawai Bank Adalah Pemakan Riba

Ada beberapa pemikiran tentang hukum bunga bank dan pegawai bank adalah Pemakan Riba. Gaji bank merupakan 99% adalah riba dan toleransi 1% yang berasal dari administrasi yang dianggap sedikit halal. Pandangan seperti ini tidak hanya muncul dari para beberapa bankir konvensional yang terkejut dengan system ekonomi Syariah yang baru, namun juga banyak di tulis di blog dan situs-situs secara bebas dan terbuka luas. Pemikiran dan mainset seperti ini tentu saja akan memberikan efek tidak baik bagi pemahaman islam itu sendiri.⁶⁸

MUI memang telah mengeluarkan Fatwa No. 01 tahun 2004 tentang Bunga (Interest) yang menyatakan bahwa bunga yang diterapkan pada Bank merupakan tambahan dan masuk dalam kategori riba, dan riba adalah haram. Konsep dharurat/hajat hanya berlaku pada wilayah/daerah yang belum memiliki kantor/jaringan lembaga keuangan syariah, sehingga jika diwilayahnya sudah terdapat Bank Syariah maka haram hukumnya bertransaksi di Bank konvensional (pemahaman).⁶⁹

Fatwa itupun menjadi polemik dalam berbagai lapisan, NU menganggap ini menjadi sebuah khilafiyah karena masih terdapat

⁶⁸Imroatul Qoriah, *Analisis Terhadap Pertimbangan dan Dasar Hukum Hasil Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Mengenai Keharaman Bunga Bank*. Diss. Universitas Sebelas Maret, 2010. h. 9.

⁶⁹Rifka Abadi, "pegawai bank merupakan pemakan riba dan fasik benarkah?," dalam <https://www.kompasiana.com/rifkadejavu/55920c8baa23bd482aaa2299/pegawai-bank-merupakan-pemakan-riba-dan-fasik-benarkah?page=all>. Di akses tanggal 10 September 2019.

perbedaan pendapat dari ulama, dan Muhammadiyah pada 3 April 2010 mengeluarkan Fatwa tentang haramnya bunga Bank, dan dilanjutkan dengan surat dari PP Muhammadiyah ke PW untuk menjadikan Bank Syariah yang berada di wilayahnya menjadi tempat mentransaksikan keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, bunga bank ternyata masih menjadi polemik apakah bunga bank termasuk riba atau tidak, hingga saat ini masih belum memiliki titik temu yang kuat.

Bayangkan saja, jika semua orang berpikiran sempit sesuai tulisannya fatwa, atau blog atau situs-situs atau pemikiran beberapa bankir yang masih “galau” tentang hukum bunga bank tersebut, bayangkan apa yang terjadi di kalangan masyarakat. Semua orang tua akan menyuruh anaknya berhenti menjadi pegawai Bank, semua istri atau suami akan meminta pasangannya berhenti menjadi pegawai Bank, semua anak-anak akan merengek agar orang tuanya berhenti bekerja sebagai pegawai bank karena mereka tidak mau ikut memakan harta riba.

Opini lain yang berkembang tentang bunga bank adalah apakah pegawai bank merupakan pekerjaan halal. Pertanyaan seperti ini marak sekali menjadi buah pikir dan keresahan para bankir. Bagi sebagian bankir bank konvensional, berpendapat bahwa bekerja di bank konvensional adalah pekerjaan haram dan seyogyanya menjauhi dari pekerjaan seperti itu.

Tidak hanya itu, ada beberapa tokoh muda yang dijadikan rujukan berfikir tentang bunga bank, yang menyatakan bahwa pekerjaan apa di Indonesia ini yang tidak bersentuhan dengan Riba seperti PNS, Pegawai swasta, medis, teknik dan segala pekerjaan lainnya bergesekan dengan Riba, karena instrumen yang di gunakan masih berbau konvensional dan terkadang berbau korupsi di beberapa pekerjaan dan sudah bisa dipastikan akan bersentuhan dengan praktik riba.

b. Opini Pegawai Bank Adalah Orang Fasik

Pandangan sinis tentang keberadaan pegawai bank atau bankir konvensional yang paling ekstrim adalah pegawai bank adalah orang fasik. Pengertian fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Pandangan atau pemikiran seperti ini tentu saja seolah menjadikan diri kita sebagai orang yang bisa memberikan penilaian terhadap profil keislaman orang lain. Yang lebih parah lagi, pemikiran seperti itu di tambah dengan bagaimana dengan hukum meminjam dana di Bank. Beberapa bankir berpendapat bahwa bank sejatinya bukan solusi bagi masalah keuangan masyarakat. Justru bank adalah penyakit bagi masyarakat. Apapun nama dan labelnya, baik konvensional maupun Syariah.

Pemikiran dan sikap bankir yang memandang bahwa bank adalah sesuatu yang baru dan representasi riba secara mutlak, tentu mencoba berharap bahwa kita bisa kembali hidup di zaman Rasulullah yang tidak ada bank, tidak ada jalan raya, tidak ada website, tidak ada PNS, dan yang ada hanya baitul mall, transportasi hanya dengan berjalan kaki dan naik unta, dakwah dilakukan hanya dari rumah ke rumah dan tempat ibadah, menulis hanya diatas daun lontar, menggosok gigi dengan siwak dan lainnya.⁷⁰

Para ulama, bahkan kaum Muslim, sesungguhnya sepakat tentang haramnya riba, karena di dalam alqur'an hal itu disebutkan secara jelas dan pasti. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. al-Baqarah [2]: 275). Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang definisinya dan bunga bank saat ini apakah termasuk dalam katagori riba, sehingga merekapun berbeda pendapat tentang praktik "bank konvensional", khususnya menyangkut bunga bank. Karena itu, ada

⁷⁰Bayu Imantoro, "hukum riba dan bunga bank antara pendapat yang mengharamkan dan membolehkan-serta-solusi berpegang pada pendapat jumhur ulama" dalam <https://www.kompasiana.com/bayuimantoro/54fff46ca3331152635100d2/hukum-riba-dan-bunga-bank-antara-pendapat-yang-mengharamkan-dan-membolehkan-serta-solusi-berpegang-pada-pendapat-jumhur-ulama>. Di akses tanggal 9 september 2019.

ulama yang membolehkan masalah bunga ini dengan alasan bukan riba, dan ada juga yang menilainya riba. Kita mengetahui banyak praktik perbankan dengan aneka jasa yang ditawarkannya. Bila Anda berpendapat bahwa suatu bank melakukan transaksi atas dasar riba, kemudian hati dan pikiran kita cenderung mengharamkan secara mutlak, maka dalam hal ini bekerja dan membantu terselenggaranya praktik riba itu, apa pun bentuknya, adalah haram. Rasulullah saw bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat beliau Abu Juhaifah, “Allah mengutuk pemakan riba dan pemberinya, penulisnya, dan kedua saksinya.” Karena itu, jika bank itu hanya menawarkan jasa atas dasar riba itu saja, maka tentu saja keterlibatan pegawainya bekerja di sana juga dinilai haram.

Namun jika pandangan ini masih diragukan tentang hukumnya karena perbedaan pendapat ulama seperti tergambar di atas maka dalam keadaan seperti itu pun sebaiknya kita mencari tempat bekerja yang lain, kecuali jika Anda tidak mendapatkan tempat kerja lain yang dapat menutupi kebutuhan hidup Anda dan keluarga. Ini, sekali lagi, jika bank itu hanya menawarkan jasa atas dasar riba. Bila ada jasa lain yang ditawarkannya, dan jasa tersebut tidak haram, maka ini berarti bank tersebut mencampurkan antara uang halal dan uang haram. Pencampuran uang halal dan haram ini membuka peluang untuk dibenarkannya bekerja di sana, apalagi jika uang tersebut tidak dapat dipisahkan.⁷¹

Pandangan ini selaras dengan pemikiran Mufti Mesir, Syaikh Jad al-Haq, bahwa setelah mengutip kaidah-kaidah yang dikemukakan oleh ulama bermazhab Hanafi dan sementara ulama Syafi’i, beliau berkesimpulan bahwa apabila aktivitas satu bank bercampur antara yang halal dan yang haram, maka dalam keadaan ini tidak ada halangan untuk bekerja di sana.⁷²

⁷¹Quraish Shihab, “Soal riba: Gaji karyawan bank tidak halal,” dalam <https://makassar.tribunnews.com/2015/06/12/soal-riba-gaji-karyawan-bank-tidak-halal-ini-kata-quraish-shihab?page=2>.

⁷²Jad al-Haq, *Buhuts wa Fatawa Islamiyah fi Qadhaya Mu’ashirah* (jilid II), tt, h. 746.

Para ulama, baik ulama salaf (mazhab empat) maupun ulama kontemporer, semua sepakat akan keharaman riba. Bahkan ulama yang membolehkan bunga bank, juga mengharamkan riba. Pendapat tersebut tertuang dalam Al-Mabsut juz 14 halaman 36, Al-Syarh al-Kabir juz 3 halaman 226, Nihayatul Muhtaj juz 4 halaman 230, Al-Mughni juz 4 halaman 240, Al-Tafsir al-Wasit juz 1 halaman 513.⁷³

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat ulama bukan soal hukum keharaman riba, melainkan soal hukum bunga bank. Ulama yang mengharamkan bunga bank menganggap bahwa bunga bank termasuk riba, sedangkan ulama yang membolehkannya meyakini bahwa ia tidak termasuk riba.

Dalam kegiatan bank konvensional, terdapat dua macam bunga: Pertama, bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti jasa giro, bunga tabungan, atau bunga deposito. Bagi pihak bank, bunga simpanan merupakan harga beli. Kedua, bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank, seperti bunga kredit. Bagi pihak bank, bunga pinjaman merupakan harga jual.

Bunga simpanan dan bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Selisih dari bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan merupakan laba atau keuntungan yang diterima oleh pihak bank.⁷⁴

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum bunga bank. Pertama, sebagian ulama, seperti Yusuf Qardhawi, Mutawalli Sya'rawi, Abu Zahrah, dan Muhammad al-Ghazali, menyatakan bahwa

⁷³Husnul Haq, "Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bunga Bank" dalam <https://islam.nu.or.id/post/read/92420/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank>. Di akses tanggal 9 september 2019.

⁷⁴Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2017. h. 503-504.

bunga bank hukumnya haram, karena termasuk riba. Pendapat ini juga merupakan pendapat forum ulama Islam, meliputi: Majma' al-Fiqh al-Islamy, Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Adapun dalil diharamkannya riba adalah firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 275: yang artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Dan hadits Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah: Dari Jabir, ia berkata: “Rasulullah saw melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya.” Ia berkata: “Mereka berstatus hukum sama.” (HR. Muslim, nomor 2994).⁷⁵

Kedua, sebagian ulama kontemporer lainnya, seperti syaikh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Syaltut, menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma' al-Buhus al-Islamiyyah tanggal 23 Ramadhan 1423 H, bertepatan tanggal 28 November 2002 M.

Mereka berpegangan pada firman Allah swt Surat an-Nisa' ayat 29 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

Pada ayat di atas, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, menggasab, dan dengan cara riba. Sebaliknya, Allah menghalalkan hal itu jika dilakukan dengan perniagaan yang berjalan dengan saling ridha. Karenanya, keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran keuntungan di awal, sebagaimana yang terjadi di bank, dibenarkan dalam Islam.

⁷⁵Yusuf Qaradhawi, *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*, Kairo: Dar al-Shahwah, h. 5-11; Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga.

Di samping itu, mereka juga beralasan bahwa jika bunga bank itu haram maka tambahan atas pokok pinjaman itu juga haram, sekalipun tambahan itu tidak disyaratkan ketika akad. Akan tetapi, tambahan dimaksud hukumnya boleh, maka bunga bank juga boleh, karena tidak ada beda antara bunga bank dan tambahan atas pokok pinjaman tersebut.

Di dalam fatwa Majma' al-Buhus al-Islamiyyah disebutkan: "Sesungguhnya menginvestasikan harta di bank-bank yang menentukan keuntungan atau bunga di depan hukumnya halal menurut syariat, dan tidak apa-apa."⁷⁶

Pada Munas 'Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992, terdapat tiga pendapat tentang hukum bunga bank: Pertama, pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram. Kedua, pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh. Ketiga, pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya syubhat. Meski begitu, Munas memandang perlu untuk mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam.

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa hukum bunga bank merupakan masalah khilafiyah. Ada ulama yang mengharamkannya karena termasuk riba, dan ada ulama yang membolehkannya, karena tidak menganggapnya sebagai riba. Tetapi mereka semua sepakat bahwa riba hukumnya haram.

Terhadap masalah khilafiyah seperti ini, prinsip saling toleransi dan saling menghormati harus dikedepankan. Sebab, masing-masing kelompok ulama telah mencurahkan tenaga dalam berijtihad menemukan hukum masalah tersebut, dan pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda.

Karenanya, seorang Muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya. Jika hatinya mantap

⁷⁶Ali Ahmad Mar'i, *Buhus fi Fiqhil Mu'amalat*, Kairo: Al-Azhar Press, halaman 134-158; Asmaul Ulama al-ladzina Ajazu Fawaidal Bunuk; *Fatwa Majma' Buhuts al-Islam bi Ibahati Fawaidil Masharif*.

mengatakan bunga bank itu boleh maka ia bisa mengikuti pendapat ulama yang membolehkannya. Sedangkan jika hatinya ragu-ragu, ia bisa mengikuti pendapat ulama yang mengharamkannya. Rasulullah saw bersabda, yang artinya: “Kebaikan adalah apa saja yang menenangkan hati dan jiwamu. Sedangkan dosa adalah apa yang menyebabkan hati bimbang dan cemas meski banyak orang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebaikan.” (HR. Ahmad).

4. Pemahaman Bankir Mengenai Hukum Bunga Bank

Pemikiran dan pandangan tentang bunga bank memang masih beragam dan belum masih memiliki kesatuan pandangan. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa kemajuan ekonomi syariah dapat mengurangi gangguan stabilitas nilai tukar. Ia menilai gangguan stabilitas ini bagian dari ekonomi riba. Sebagai contoh, Perry mengatakan bahwa peningkatan suku bunga acuan *7-Day Reverse Repo Rate* 50 basis poin (bps) dilakukan untuk mengatasi serangan spekulasi dari global yang membuat stabilitas nilai tukar rupiah terganggu.⁷⁷ Oleh karena itu beliau menyatakan :

“Kalau bisa membuat ekonomi syariah makin maju di Indonesia, mestinya kebutuhan untuk melakukan intervensi atau menaikkan suku bunga bisa dikurangi.”

Perry juga mengajak semua pihak terkait untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam perekonomian syariah. Ia menyoroti banyaknya negara yang penduduknya bukan mayoritas Islam namun ekonomi syariahnya lebih maju dari Indonesia, misalnya Thailand dan Australia lewat industri makanan halal. Lebih lanjut, Perry mengatakan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) harus mampu menjalankan

⁷⁷Lihat dalam <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/06/30/pb3syk377-perry-ekonomi-syariah-kurangi-gangguan-nilai-tukar>. Di akses tanggal 11 september 2019.

strategi nasional pengembangan ekonomi keuangan syariah sebagai arus baru pengembangan ekonomi di Indonesia.⁷⁸

Langkah yang bisa dilakukan terkait strategi nasional tersebut antara lain memajukan industri ekonomi halal dalam suatu jejaring yang terus berkembang, baik melalui basis pesantren atau asosiasi pengusaha. Kemudian, Perry juga mengatakan mengenai perlunya pengembangan perbankan dan keuangan syariah sekaligus instrumen keuangan syariah. Seperti pengembangan riset, edukasi, wirausaha, dan kampanye *halal life style* di Indonesia.

Sementara itu, MUI pusat juga memiliki pandangan sendiri tentang bunga bank ini. Dalam konteks historis, di tengah kontroversi fatwa bunga bank haram pada 2003, KH Ma'ruf Amin yang berada di luar kota mendapat beragam tanggapan dari berbagai media baik melalui telepon dari stasiun TV. Sebagai tokoh di balik lahirnya fatwa tersebut, Ma'ruf tentu saja menanggapi dengan baik. Beliau merasa itulah kesempatan baginya untuk menjelaskan kepada publik tentang latar lahirnya fatwa tersebut. Menurut Kiai Ma'ruf, fatwa bunga haram bukan milik pribadinya tapi hasil ijtima ulama 100 ulama. Yusuf Qardawi pun sudah mengharamkan bunga bank. Itu sudah menjadi keputusan ulama seluruh dunia.⁷⁹

Ikhwal fatwa haram bunga bank diawali dengan fatwa Dewan Syariah nasional MUI pada 2000, bahwa bunga bank tidak sesuai syariah dan dinyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia masih bersifat darurat. Tiga tahun kemudian, dalam sebuah seminar di Surabaya Ma'ruf sebagai Ketua Komisi Fatwa mengungkapkan bahwa MUI akan segera mengeluarkan fatwa bunga haram. Di tengah pro-kontra menyikapi pernyataan tersebut, MUI menggelar rakernas pada 14-16 Desember 2003. Hasilnya, bunga bank adalah haram.

⁷⁸ Lihat https://www.antaranews.com/berita/722751/perry-ekonomi-syariah-kura_ngi_gangguan-nilai-tukar. Di akses tanggal 10 september 2019.

⁷⁹Anif Punto Utomo, KH Ma'ruf Amin Penggerak Umat Pengayom Bangsa. Jakarta: Sinergi Aksara, 2018. h. 34.

Ketua Umum MUI KH Sahal Mahfudz melihat fatwa tersebut selanjutnya mengklarifikasi bahwa fatwa tersebut belum final, belum menjadi keputusan MUI. Sekretaris MUI Din Syamsudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif, dan Ketua Lajnah Bahtsul Masail NU Masdar F Mas'udi termasuk yang menolak keputusan komisi fatwa tersebut. Sementara Cendekiawan muslim Nurcholish Madjid menilai bunga bank tidak haram karena tidak ada unsur eksploitasi di dalamnya.⁸⁰

Di luar kalangan ulama dan cendekiawan, para akademisi dan praktisi perbankan ikut menyuarakan keberatan. Bank Indonesia lewat Kepala Biro Syariah Harisman dan Kepala Litbang BI Mulya Siregar mengungkapkan kekhawatiran akan terjadi rush di bank konvensional bila fatwa tersebut diberlakukan. Sebab bagi hasil bank syariah saat itu lebih besar ketimbang bunga deposito bank konvensional, sehingga lebih menarik sebagai tempat menyimpan dana. Di sisi lain, bila terjadi perpindahan dana besar-besaran, bank syariah tidak siap. Sebab perbandingan dana yang dihimpun terhadap pembiayaan yang tadinya di atas 80% bisa merosot drastis karena dana yang datang begitu cepat tidak segera tersalurkan.⁸¹

Namun semua pemikiran dan protes tersebut, tidak membuat Ma'ruf Amin berubah sikap. Dengan tenang dia menyatakan apa yang dikhawatirkan BI tak akan terjadi. Akhirnya, pada 3 Januari 2004 fatwa bunga haram itu resmi menjadi fatwa MUI. Setelah enam tahun berjalan, Muhammadiyah pun mengeluarkan fatwa haram bunga bank. Cuma NU yang sampai sekarang masih menempatkan bunga bank sebagai khilafiyah.⁸²

5. Persepsi dan Sikap Bankir Terhadap Hukum Bunga Bank

Berdasarkan pembahasan di atas, ternyata pandangan bankir beragam. Hal ini tentu banyak dilatarbelakangi oleh pengetahuan dan

⁸⁰Wawancara dengan AN anggota Dewan Syariah Nasional MUI, di Jakarta.

⁸¹Wawancara dengan YA staf BI Institute Jakarta.

⁸²Wawancara dengan NH salah satu staf bagian Fatwa Dewan Syariah nasional MUI bertempat di Kantor MUI Jakarta.

pendidikan masing-masing bankir dalam memandang masalah bunga bank. Berdasarkan fenomena tersebut juga, dalam perspektif penulis, type bankir paling tidak dapat dikategorikan dalam ada 3 bentuk, yaitu bankir pragmatis, bankir realis-modernis (moderat), dan bankir fundamentalis. Tiga type bankir millennial tersebut memiliki respon dan persepsi yang berbeda dalam memahami bunga bank.

Cara berfikir pragmatis dalam dunia filsafat identik dengan paham-paham yang dikembangkan oleh Charles Sanders Peirce, William James dan John Dewey. Tokoh-tokoh inilah yang mengembangkan paham pragmatisme dalam dunia filsafat. Menurut mereka, pragmatisme adalah aliran yang mengajarkan mengenai kebenaran, dan apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan yang akibat-akibatnya yang bermanfaat. Pragmatism berasal dari kata *pragma* (bahasa Yunani) yang bermaksud fakta, benda, sesuatu yang dibuat, kejadian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pragmatis ialah bersifat praktis dan berguna bagi umum yang bersifat mengutamakan manfaat. Pragmatisme dari aspek teknikal ialah teori menjelaskan maksud dan kebenaran melalui aplikasi ide atau kepercayaan kepada tindakan yang mempunyai kesan praktikal.⁸³ Pragmatisme lebih menumpukan kepada suatu usaha-usaha untuk menyatukan ilmu pengetahuan dan filsafat agar filsafat menjadi ilmiah dan berguna bagi kehidupan praktis manusia.

Berdasarkan relevansi pola pikir pragmatism tersebut, type bankir pragmatis merupakan type pertama dalam menyikapi bunga bank. Bankir pragmatis memiliki pemikiran bahwa sesuatu tambahan apapun yang muncul dari sebuah proses pinjam meminjam dan jual beli merupakan sebuah keuntungan dari proses bisnis. Perbankan yang merupakan sebuah lembaga berbadan hukum perusahaan tentu menjadikan bisnis dan keuangan sebagai tujuan akhir yaitu net profit.

⁸³Nurul Izzati, "Pragmatisme", dalam https://prezi.com/dthlwotpfbza/pragmatis_me/. Di akses tanggal 2 oktober 2019.

Sikap dan type bankir pragmatis memahami bunga bank bukan sebagai praktik ribawi. Bankir pragmatis dari sisi cara berfikir tidak memiliki kegelisahan apalagi bertindak untuk berhenti bekerja dari lembaga perbankan. Menurut bankir pragmatis, bunga dan riba adalah bagian dari sebuah proses yang terus mencari bentuk, dan sebuah keniscayaan yang terpisah dari riba.

Menurut paham pragmatisme, type bankir pragmatis memiliki 3 ciri utama. Pertama, dilihat dari sisi *fiqrah* (pemikiran dan ide), bankir pragmatis tidak menanyakan hal-hal yang bersifat normatif. Kedua, dilihat dari sisi *harakah* (gerakan) adalah anti terhadap absolutisme, bankir pragmatis tidak memandang bahwa riba atau bunga adalah sebuah transaksi bebas dan berdasarkan kebenaran relatif, bergantung kepada dan antara kedua belah pihak yang bersepakat, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ketiga, dilihat dari sisi *amaliyah* (perbuatan nyata) atau implementatifnya, bankir pragmatis memiliki sikap anti dualisme, yang mencampur dua model perilaku bankir. Cara pikir, Gerakan atau tindakan, serta sikap bankir pragmatis tidak “*mendua*”, mereka tetap kokoh pada prinsip bahwa operasional perbankan baik pada bank konvensional dan bank Syariah berorientasi bisnis yang membawa kemanfaatan besar bagi pertumbuhan ekonomi.

Sikap dan persepsi yang kedua adalah sikap dan type bankir yang lebih realistis-modernis. Realisme adalah suatu sikap/pola pikir yang mengikuti arus. Individu yang realistis cenderung bersikap mengikuti lingkungannya dengan mengabaikan beberapa/semua nilai kebenaran yang dia yakini. Realisme tumbuh secara perlahan dalam jiwa dan pikiran seseorang. Realismepun tidak hanya terbatas pada individu, tapi juga pada level-level di atasnya hingga ke tingkat negara. Nilai-nilai realisme yang mempengaruhi individu pada umumnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan materi. Namun tidak tertutup kemungkinan juga pada hal-hal lain seperti budaya politik, norma religi (sistem kepercayaan) dan banyak hal-hal lainnya.

Bankir realis-modernis adalah type bankir kedua dalam menyikapi bunga bank. Menurut paradigma bankir realis-modernis pengambilan keuntungan melalui bunga bank konvensional dan mengambil keuntungan berlebih seperti di bank Syariah (dari hasil jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan jasa), sama-sama merupakan sesuatu yang dilarang. Oleh karena itu, bekerja di bank konvensional maupun di bank Syariah sama saja bagi bankir realis-modernis.

Type bankir yang lebih mengedepankan bahwa akad dalam transaksi keuangan baik dalam bank konvensional maupun bank Syariah adalah sebuah proses yang belum final, maka bankir realis ini tetap memiliki kegelisahan dan terfikir untuk berhenti dari bank konvensional atau bank Syariah ketika ada hal atau perilaku dzalim. Sikap ini lahir dari sebuah persepsi bahwa kezaliman dan mengambil keuntungan sepihaklah yang menjadi ukuran haram tidaknya sebuah pekerjaan. Bankir realis-modernis lebih memilih prinsip-prinsip dan nilai-nilai substantif mengenai bunga bank atau mengambil berlebih di perbankan syariah. Namun demikian bankir realis-modernis masih dapat berfikir realistis, karena semua membutuhkan proses.

Sikap dan cara berfikir seperti ini dalam terminology islam moderat (*wasathiyah*) akan melahirkan sikap toleransi, *tasamuh*, lebih dewasa dan lebih tidak gegabah. Bankir toleran senantiasa akan melihat bunga bank dan mengambil keuntungan dari jual beli lebih terlihat dan terukur dari sisi kemaslahatan terhadap umat secara luas, dan tidak parsial.

Selanjutnya adalah type bankir idealis, yaitu tipe bankir yang memandang hukum bunga lebih fundamentalis yaitu menempatkan prinsip syariat islam yang bersumber pada Al-quran dan Sunnah sebagai sebuah keniscayaan yang bersifat mutlak dan langsung jadi.

Idealis merupakan seorang individu/pelaku yang memegang teguh paham idealisme. Idealisme merupakan sebuah istilah yang digunakan pertama kali di dalam dunia filsafat oleh seseorang bernama Leibniz di

awal abad 18. Ia menerapkan istilah ini dalam pemikiran Plato, dan juga sembari memperlawankan dengan materialisme epikuros.⁸⁴

Idealisme berasal dari kata ide yang artinya adalah dunia di dalam jiwa, jadi pandangan ini lebih menekankan hal-hal bersifat ide, dan merendahkan hal-hal yang materi dan fisik. Realitas sendiri dijelaskan dengan gejala-gejala psikis, roh, budi, diri, pikiran mutlak, bukan berkenaan dengan materi.

Idealisme memiliki pengertian beragam, seperti yang dijelaskan Fichte yang memakai nama idealisme subyektif, yaitu pandangan-pandangan berasal dari subyek-subyek tertentu, dia menyandarkan keunggulan moral untuk sebuah etika manusia yang ideal. Tokoh lain adalah Hegel yang mengangkat idealisme subyektif dan obyektif untuk menggambarkan tesis dan antitesis secara berturut-turut. Hegel sendiri mengemukakan pandangannya sendiri yang disebut idealisme absolut sebagai sintesis yang lebih tinggi dibanding unsur yang membentuknya (tesis dan antitesis).

Tokoh lain adalah Kant yang menyebut pandangannya dengan istilah idealisme transendental atau idealisme kritis. Dalam alternatif ini isi pengalaman langsung tidak dianggap sebagai benda dalam dirinya sendiri, dan ruang dan waktu merupakan forma intuisi kita sendiri. Tokoh idealism selanjutnya adalah Schelling telah menggunakan istilah idealisme transendental sebagai pengganti idealisme subyektif.

Orang memiliki corak pikir idealisme disebut dengan idealis. Idealis berakar kata dasar “ide”, dimana gagasan idealis sendiri memiliki makna bahwa hal tersebut adalah suatu yang terduga atau mempunyai gagasan, sementara orang idealis adalah orang yang menyampaikan gagasannya tersebut untuk diakui serta jika mungkin untuk dilaksanakan, orang idealis biasanya banyak mengeluarkan pendapat/gagasan (vokal).

⁸⁴Lihat <https://prelo.co.id/blog/ketahui-ciri-ciri-orang-idealis-di-sekitar-kamu/>. Di akses tanggal 2 oktober 2019.

Idealis adalah seseorang yang melihat segala sesuatu hal sesuai dengan keyakinan yang dianutnya, tentu saja orang idealis memiliki ciri utama selalu berpandangan lurus serta cenderung kaku. Tipe manusia idealis ingin agar apa pun yang dia lakukan harus dengan cara yang sesuai seperti pandangannya demi mencapai tujuannya, sehingga jika nanti tujuan tersebut dicapai dengan cara yang lain maka hal tersebut dipandanginya tidaklah ideal.

Selain itu, sosok idealis berarti memiliki kriteria yang spesifik atau tertentu terhadap suatu hal. Terkadang seorang idealis terlihat seperti perfectionist (jika standar yang mereka gunakan terlalu tinggi). Orang idealis akan nampak seperti orang yang mengerti apa yang harus ia lakukan, namun dia juga terkadang akan terkesan egois (jika dia terlihat benar-benar yakin akan kemampuannya) dan juga terkadang terkesan bodoh karena terlalu memaksakan diri jauh di luar kemampuannya.

Dalam konstruksi sosial, idealis memiliki ciri-ciri, antara lain: kuat berpendirian serta konsekuen. Biasanya orangnya jujur serta memiliki tanggung jawab yang besar, tidak akan memikirkan keuntungan untuk diri sendiri. Orang idealis mempunyai keyakinan diri akan suatu kebenaran yang selanjutnya mewarnai sikap serta tindakannya. Orang yang hidup maupun berusaha hidup menurut cita-cita, menurut patokan yang dianggap sempurna. Ciri idealis selanjutnya adalah selalu mementingkan cita-cita, khayalan maupun fantasi untuk menunjukkan keindahan serta kesempurnaan meskipun tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Berdasarkan pendekatan filosofis, bankir idealis memandang bunga bank lebih fundamentalis-tekstualis. Cara berfikir (*fiqrah*), bergerak dan bertindak (*harakah*), dan mengenksekusi dan aksi (*amaliyah*) lebih high-class. Menurut type bankir ini, berhenti bekerja dari bank konvensional dan bank Syariah adalah solusi terbaik, sebab

praktik dan lalu lintas kenerja keuangan pada bank-bank tersebut sama-sama masih memiliki atau ada unsur-unsur kedzaliman dalam praktik kerja dan penghasilan. Menurut bankir idealis, bunga secara mutlak adalah riba, dan mengambil keuntungan secara berlebihan apalagi dengan menipu dan curang, juga bagian dari kedzaliman. Sehingga, dalam transaksi apapun, dunia perbankan hendaknya tidak dapat dijadikan sebagai mitra dalam menjalankan lalu lintas keuangan.

B. Pembangunan Fikih *Wasathiyah Iqtishadiyah* Terhadap Hukum Bunga Bank di Perbankan

Bunga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam praktek di lembaga keuangan bank. Bank sebagai suatu badan yang bergerak di bidang jasa, sudah sewajarnya apabila setiap bank menginginkan adanya keuntungan, imbalan (profit) atas jasa yang disediakan. Melalui imbalan tersebut bank akan mampu mengembangkan diri dan menjamin eksistensi di tengah-tengah para nasabahnya. Hanya saja, imbalan tersebut yang kemudian disebut dengan istilah “bunga” dalam prakteknya terkesan mengeksploitasi nasabah, khususnya dalam sistem kredit. Di mana setiap pinjaman kredit pasti disertai dengan persentase bunga, baik bunga modal maupun bunga jatuh tempo. Dengan demikian, kesan yang timbul dengan praktek tersebut, bahwa bank sudah menjadi salah satu wadah yang menjalankan praktek riba, karena kata “riba” dalam bahasa Arab menurut al-Asymawy, senantiasa diidentikkan dengan sesuatu yang bertambah, baik itu berasal dari harta yang diharamkan atau yang diharamkan.⁸⁵

Esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Sementara bunga pada hakekatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur. Hal ini bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang menolak adanya ketidakadilan dan kezaliman.⁸⁶

⁸⁵Muhammad Syarif Hasyim, *Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*, Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 1, April 2008, h. 46.

⁸⁶Ummi Kalsum, *Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)*, Jurnal Al-‘Adl Vol. 7, No. 2, Juli 2014, h. 68.

Menurut sistem ekonomi konvensional, pinjaman dengan sistem bunga akan dapat membantu ekonomi masyarakat dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Klaim tersebut telah menjadi keyakinan kuat para kaum kapitalis. Tetapi, keyakinan-keyakinan tersebut dibantah oleh Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum: 39, “Apa yang kamu berikan (berupa pinjaman) dalam bentuk riba agar harta manusia bertambah, maka hal itu tidak bertambah di sisi Allah” (QS. ar-Rum: 39). Ayat ini menyampaikan pesan moral, bahwa pinjaman (kredit) dengan sistem bunga tidak akan membuat ekonomi masyarakat tumbuh secara agregat dan adil. Pandangan Al-Quran ini secara selintas sangat kontras dengan pandangan kaum kapitalis. Mereka menyatakan bahwa pinjaman dengan sistem bunga akan meningkatkan ekonomi masyarakat, sementara menurut Allah, pinjaman dengan sistem bunga tidak membuat ekonomi tumbuh dan berkembang, karena riba secara empiris telah menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian, khususnya bila ditinjau dari perspektif makro.⁸⁷

Ada dua pandangan utama mengenai riba. *Pertama*, banyak muslim yang percaya bahwa interpretasi riba seperti terdapat dalam fiqih (hukum Islam) adalah interpretasi yang tepat. Interpretasi ini mengandaikan bahwa setiap tambahan yang ditetapkan dalam suatu transaksi pinjaman adalah riba. Bagi yang lain, pengharaman riba dipahami dalam kaitannya dengan eksploitasi atas orang-orang yang relatif berlebihan. Sedangkan pandangan *kedua*, mengatakan bahwa interpretasi riba dalam literatur fiqih tidak memadai dan tidak mempertimbangkan tujuan moral dari pengharaman riba seperti yang dijelaskan atau dipahami dalam Al-Quran dan hadis.⁸⁸

Pemahaman mengenai bunga bank yang dianggap riba telah menimbulkan kegelisahan beberapa bankir di bank konvensional. Kegelisahan tersebut selanjutnya berujung pada pemahaman ekstrim, sikap

⁸⁷Marwini, *Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Jurnal Az Zarka', Vol. 9, No. 1, Juni 2017, h. 2.

⁸⁸Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, diterjemahkan dari buku asli berjudul “Islamic Banking and Interest: A Study of Riba And Its Contemporary Interpretation oleh Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2006, h. 20.

intoleran seperti berhenti bekerja (*resign*) pada bank konvensional yang dipahaminya melakukan praktek riba.⁸⁹ Pada saat yang sama, pemahaman ekstrim juga terlihat pada beberapa bankir dalam praktek bank syariah. Bankir syariah menyatakan bahwa praktek bank syariah bebas dari praktek riba.⁹⁰ Pemahaman ini menggiring bankir syariah bersikap cepat melakukan vonis terhadap praktek-praktek ribawi atau kebijakan dalam sistem bank konvensional. Padahal dalam konstruksi fiqh masih terdapat perbedaan pandangan mengenai bunga bank.

Mengamati fenomena di atas, pemikiran moderat (*wasathiyah*) tampaknya menjadi paradigma yang menarik untuk digunakan sebagai perspektif baru dalam mendiskusikan posisi bunga bank dan sikap intoleran bankir di bank-bank konvensional dan bank syariah. Paradigma *wasathiyah* dapat menjadi pendekatan yang relevan terhadap realitas empirik dalam tatanan kehidupan bankir dan masyarakat muslim untuk mengembangkan fikih yang selalu membawa rahmat, baik di bidang syakhshiyah, mu'amalah, siyasah, jinayah, termasuk dalam memahami bunga bank dan tujuan *mu'amalah al-iqtishadiyah*.⁹¹

Dua model sikap bankir yang gelisah terhadap bunga bank di satu sisi, dan sikap suka memvonis disisi yang lain, telah menggiring bankir pada sikap ekstrim seperti keputusan pegawai untuk berhenti atau pindah bekerja ke bank syariah atau tempat halal lainnya. Sikap ekstrim lainnya muncul dari pihak beberapa pegawai bank syariah yang menganggap bahwa posisinya sudah benar dan menganggap pekerja bank konvensional merupakan pekerjaan haram. Dua sikap inilah yang melatari perlunya pendekatan fikih *wasathiyah iqtishadiyah* yang moderat dan toleran dalam dunia perbankan dan keuangan Islam yang penulis elaborasi sebagai berikut:

⁸⁹Wawancara dengan AK, DM, MT dan EF yang merupakan karyawan (bankir) bank konvensional di Palangka Raya pada tanggal 28 Agustus 2018 .

⁹⁰Wawancara dengan MF, FZ, AS dan RK yang merupakan karyawan (bankir) bank X syariah di Palangka Raya pada tanggal 6 Agustus 2018 .

⁹¹M. Zaini Abdad, *Analisis dan Pemetaan Pemikiran Fikih Moderat di Timur Tengah dan Relasinya dengan Gerakan Fikih Formalis*, Jurnal Esensia, Vol. XII, No. 1, Januari 2011, h.61.

1. Bunga Bank dalam Sistem Keuangan Moneter

Para *fuqaha* dan cendekiawan Islam sejak zaman Rasulullah hingga sekarang telah sepakat bahwa riba adalah bentuk mu'amalah yang diharamkan hingga akhir zaman. Larangan riba secara mutlak telah diakui oleh semua syariat agama samawi lainnya. Namun demikian, ada yang berpendapat bahwa transaksi yang terjadi di bank merupakan bentuk muamalah modern (baru) dalam dunia Islam, sehingga status hukumnya perlu mendapat penjelasan. Di kalangan ulama Islam terjadi sudut pandang yang berbeda sejak tahun 1930-an hingga sekarang. Perbedaan ini tidak terlepas dari paradigma berpikir mereka, yaitu cara berpikir tekstual dan kontekstual. Dengan demikian kasus ini dapat dikategorikan sebagai masalah *ijtihadiyyah khilafiyah*.⁹²

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata interest. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan bahwa "*interest is charge for financial loan, usually a percentage of the amount loaned*". Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan "interest yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang sekarang sering dikenal dengan suku bunga modal."⁹³

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Saeed (2003:11) menunjukkan bahwa pada abad ke-19 dan ke-20, wacana mengenai polemik bunga bank dalam dunia Islam terbagi kepada dua kubu, yaitu modernis dan neo-revivalis. Kubu modernis yang muncul kira-kira pada paruh kedua abad ke-19 M., menurut Mohammad Iqbal, mempunyai ciri-ciri di antaranya (1) selektif dalam menggunakan sunah; (2) mengembangkan pola berpikir sistematis dengan menghilangkan anggapan

⁹²Muhammad Syarif Hasyim, *Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*, Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 1, April 2008, h. 46.

⁹³Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000, h. 146-147.

yang meyakini bahwa pintu ijtihad telah tertutup; (3) membuat perbedaan antara syari'ah dan fikih; (4) Menghindari paham yang menonjolkan sektarian; dan (5) mengubah karakteristik metode berpikir. Para modernis dalam memahami sebuah fenomena tertentu selalu memperhatikan situasi dan kondisi yang melatarbelakangi munculnya fenomena tersebut, baik dari segi moral, agama, maupun *setting* sosial historis.⁹⁴

Ada yang membedakan antara riba dan rente (bunga) seperti Muhammad Hatta. Mantan wakil presiden RI, sebagaimana dikutip oleh Masjfuk Zuhdi, menerangkan bahwa riba adalah untuk pinjaman yang bersifat konsumtif, sedangkan rente adalah untuk pinjaman yang bersifat produktif, demikian pula istilah *usury* dan *interest*, bahwa *usury* ialah bunga pinjaman yang sangat tinggi, sehingga melampaui suku bunga yang diperbolehkan oleh hukum. Sedangkan *interest* adalah bunga pinjaman yang relatif rendah. Tetapi dalam realitas atau praktek menurut Maulana Muhammad Ali yang dikutip oleh Muhammad bahwa sukar untuk membedakan antara *usury* dan *interest*, sebab pada hakekatnya keduanya memberatkan bagi para peminjam.⁹⁵

Oleh karena itu, sejarah masyarakat Barat terlihat jelas bahwa “*interst*” dan “*usury*” yang telah dikenal saat ini pada hakikatnya adalah sama. Keduanya berarti tambahan uang, umumnya dalam prosentase. Istilah *usury* muncul karena belum mapannya pasar keuangan pada zaman itu sehingga penguasa harus menetapkan suatu tingkat bunga yang dianggap wajar. Namun setelah mapannya lembaga dan pasar keuangan, kedua istilah itu menjadi hilang karena hanya ada satu tingkat bunga di pasar yang sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran.⁹⁶

Bangsa-bangsa dahulu telah mengenal bank, tetapi bank ini berlainan dengan bank modern, sesuai dengan awal tingkat kejadiannya transaksi di waktu itu. Saat itu belum ada mata uang dan baru muncul pada abad pertengahan, maka timbullah lembaga perbankan yang mereka

⁹⁴Ibid.

⁹⁵Ibid.

⁹⁶Ibid.

gunakan sebagai alat mata uang, penukaran uang dengan yang lain dan penyimpanan. Hal ini sesuai dengan tingkat kemajuan yang mereka capai pada saat itu. Mereka belum mengoperasikan uang yang didepositokan pada para bankir. Kemudian para banker berpendapat bahwa lebih baik kalau uang tersebut sebagian mereka kelola, karena pada umumnya pemilik uang tidak menginginkan uang yang mereka titipkan itu dioperasikan. Sehingga dengan uang yang dititipkan itu mereka dapat mengoperasikannya dalam jumlah tertentu, seraya mereka pun dapat mengembalikan uang titipan ini pada saat penitipnya memintanya kembali.

Dengan cara semacam ini, penitip (deposan) tidak mengetahui bahwa uangnya telah dioperasikan atau dikembangkan oleh si banker, karena yang bersangkutan dapat mengembalikan kepada pemiliknya kapan saja uang itu ditariknya kembali, karena uang yang dititipkan pada si banker itu banyak, sehingga ia dapat memperbesar operasinya dan mendatangkan keuntungan yang besar pula.⁹⁷

Dengan demikian si banker berpendapat bahwa suatu hal yang menguntungkan bagi dirinya kalau penitip uang (deposan) diberi bagian dari keuntungan uang yang mereka titipkan kepadanya, sehingga uang mereka pun berkembang pula, dengan cara ini, si penitip memperoleh keuntungan dan si banker juga mendapat untung yang jauh lebih besar. Bilamana si deposan tidak diberi keuntungan, barang kali mereka tidak akan menitipkan uangnya lagi pada si banker atau tidak mengizinkan untuk dikembangkan. Karena itu, akhirnya orang-orang lain dapat digalakkan untuk menitipkan uang mereka kepadanya, sehingga akan bertambah investasi dan keuntungannya. Dari sinilah kemudian lahir gagasan lembaga perbankan modern (bank konvensional). Yang menjadi sandaran paling besar bagi kelangsungan hidup perbankan adalah deposito, sekalipun bersandar juga pada dua sumber lain yaitu:

⁹⁷Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, alih bahasa M. Tholib, Surabaya: al-Ikhlâs, 1993, h. 95.

Modal, meliputi modal yang diberikan pemegang saham dan modal yang didapat dari keuntungan. Kredit, hal ini dilakukan oleh bank-bank dagang bila membutuhkan modal, dan dipinjam dari bank sentral atau bank lain.⁹⁸

Menurut catatan sejarah, usaha perbankan sudah dikenal kurang lebih 2500 tahun sebelum masehi dalam masyarakat Mesir purba dan Yunani kuno, kemudian masyarakat Romawi. Karena itu, sepantasnya kalau Plato (427-347 SM) sudah berbicara tentang bahaya rente. Perkembangan bank modern mulai berkembang di Itali dalam abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga untuk pembiayaan kepausan dan perdagangan wol, kemudian perbankan berkembang pesat sesudah memasuki abad ke-18 dan 19.⁹⁹

Adapun pemahaman riba dan bunga bank, kelompok modernis menekankan akan pentingnya melakukan penyegaran pemikiran Islam dengan cara membangkitkan kembali gelombang ijtihad. Oleh karena itu, mereka membedakan bunga bank dengan riba, sebab menurut mereka yang menjadi pertimbangan rasional pelarangan riba pada masa pra Islam adalah terletak pada aspek moral, yaitu adanya ketidakadilan (eksploitasi dan aniaya) terhadap kaum fakir miskin dan bukan karena faktor kelebihan semata.

Bank diambil dari kata banco, bahasa Italia, artinya meja. Dulu para penukar uang (money changer) melakukan pekerjaan mereka di pelabuhan-pelabuhan tempat para kelasi kapal datang dan pergi, para pengembara, dan wiraswastawan turun-naik kapal. Money changer itu meletakkan uang di atas sebuah meja (banco) di hadapan mereka. Aktivitas di atas banco inilah yang menyebabkan para ahli ekonomi menelusuri sejarah perbankan, mengaitkan kata banco dengan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang ini dengan nama “bank”. Dengan demikian, bank

⁹⁸Ibid., h. 96.

⁹⁹ 25.

di sini berfungsi sebagai penukaran uang antar bangsa yang berbeda-beda mata uangnya.

Secara kultural, tiap peradaban manusia sebenarnya menolak keberadaan bunga bank. Apabila dengan legitimasi ajaran agama, penolakan penolakan pun semakin kuat. Akan tetapi, kepentingan pragmatis ekonomi kapitalis meluluhlantahkannya. Para ulama fiqh mulai membicarakan tentang bunga bank (riba), ketika mereka memecahkan berbagai macam persoalan muamalah. Banyak Ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan riba sesuai dengan periode larangan. Sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode penetapan hukum riba. Riba pada agama-agama langit (samawi) telah dinyatakan haram, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Lama Kitab Keluaran ayat 25 pasal 22: (seperti yang dikutip Muhammad) "Bila kamu menghutangi seseorang di antara warga bangsamu uang maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang". Namun orang yahudi beranggapan bahwa riba itu hanyalah terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi. Tetapi tidak terlarang dilakukan terhadap non-Yahudi. hal ini sebagaimana terdapat dalam kitab Ulangan ayat 20 pasal 23.¹⁰⁰

Kapan sebenarnya manusia mulai mempraktekkan riba? Tak ada catatan pasti tentang ini. Yang jelas, pada masa Nabi Musa As. Orang-orang Yahudi dilarang mempraktekkan bunga. Larangan ini, terdapat di Old Testament (perjanjian lama) dan UU Talmud seperti yang dikutip oleh Dwi Hardianto. Diantaranya, kitab Deuteromony (Ulangan) pasal 23 ayat 19: "janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat di bungakan".

Larangan serupa juga tercantum di kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25 dan Leviticus (Imamat) pasal 35 ayat 7. Ini menunjukkan, sebelum turunnya larangan ini, manusia telah mempraktekkan riba.

¹⁰⁰Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000, h. 144.

Apalagi dalam Al-Qur'an surat an-Nisa':160-161 ditegaskan bahwa Allah akan memberikan azab yang keras kepada orang-orang Yahudi yang memakan riba. Jadi sebelum dan hingga masa Nabi Musa AS, manusia telah mempraktekkan riba.

Pada masa Yunani (abad VI SM-I M), terdapat beberapa jenis bunga yang besarnya dikategorikan menurut kegunaannya. Untuk pinjaman biasa antara 6-18%, pinjaman property 6-12%, pinjaman antar kota 7-12%, sedang pinjaman perdagangan dan industri 12-18%. Tapi, praktek ini dicela dua ahli filsafat, Plato dan Aristoteles. Plato beralasan, penerapan bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Selain itu lanjut Plato, bunga merupakan alat kelompok kaya untuk mengeksploitasi masyarakat miskin. Sedangkan Aristoteles menyatakan, uang adalah alat tukar, bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Sehingga pengambilan bunga secara tetap merupakan ketidakadilan.

Meski dikecam, praktek riba kian tumbuh subur, terutama pada masa Romawi (Abad V SM-IV M). Bahkan, saat Unciaria (342 SM) berkuasa di Byzantium, praktek bunga malah di legalkan dengan UU. Dalam UU itu, masyarakat boleh mengambil bunga selama tingkat bunganya sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan UU (maximum legal rate). Meski begitu, pengambilannya tidak boleh dengan cara bunga-berbunga (double countable). Bunga yang di kenal saat itu adalah: bunga maksimal 8-12%, bunga pinjaman biasa diroma dan pinjaman khusus Byzantium 4-12%, sedangkan bunga untuk daerah taklukan mencapai 6-100%.

Ibnu Abi Zayd (w 136 H 754 M) mengungkapkan bahwa praktek riba juga melanda bangsa arab pra-Islam, dimana riba dilakukan dengan berlipat ganda baik terhadap uang maupun berbagai macam komoditi, serta perbedaan umur berlaku bagi binatang ternak. Apabila sudah mencapai jatuh tempo, pihak piutang (kreditur) akan menanyakan kepadapihak yang berhutang (debitur), apakah engkau akan melunasi sekarang atau

menambah pembayaran jumlah hutang yang engkau pinjam? Jika pihak debitur mempunyai sesuatu maka ia akan membayarkannya, tetapi jika hutangnya berupa binatang ternak, maka umurnya dapat meningkat (pada waktu pembayarannya). Apabila hutangnya berupa uang atau jenis komoditi lain, maka ia dapat meningkatkan dengan berlipat ganda pada waktu pengambilannya dalam jangka setiap tahun. Bila debitur tidak dapat membayarnya, maka hutang tersebut dapat berlipat lagi, misalnya hutang 100 dalam satu tahun dapat meningkat menjadi 200, jika tidak dibayar pada tahun berikutnya, hutang akan meningkat lagi secara berlipat ganda menjadi 400. Jelasnya, keterlambatan hutang akan bertambah berlipat ganda setiap tahunnya.

Sementara, di belahan dunia lain, pada rentang waktu yang hampir bersamaan, di saat gereja masih mengharamkan riba (Abad I-XII M), ternyata telah berkembang dengan pesat praktek perekonomian tanpa riba. Praktek ini, dimulai setahap demi setahap seiring keberhasilan dakwah Rasulullah SAW hingga terbentuknya agama Islam pertama di madinah (sekitar tahun 3 H). Pelarangan total terhadap riba ini pun tercantum dengan tegas dalam QS. Ar-Rum: 39, an-Nisa':160-161, Ali Imran 130, al-Baqarah: 278-279 dan hadist-hadist nabi sendiri.

Sepeninggal Rasulullah SAW, seiring meluasnya pengaruh dan kekuasaan Islam hingga 2/3 dunia, perekonomian dan perdagangan di negeri-negeri Islam pun kian pesat berkembang. Di masa itu bermunculan ekonom-ekonom muslim yang tetap konsisten memandang riba itu haram dan keji. Misalnya, Abu Yusuf (182 H/798 M) dengan kitabnya AlKharraj yang membahas keuangan public dan akuntansi syari'ah. Kemudian, al-Ghazali (451-505 H/1055-1110 M) dengan kitabnya Ihya'Ulumu ad-Din, Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M) dengan kitabnya al-Hisbah tentang konsep harga yang adil, hingga Syah Waliyullah (1114-1176 H/1703-1762 M) dengan kitabnya al-Baliqa tentang rasionalisasi pendapatan.

Tetapi, prinsip keadilan dan kebersamaan yang dibangun oleh system ekonomi Islam, akhirnya harus tersingkir dari peta perkembangan ekonomi dunia yang kian kapitalistik dan pragmatis. Melunturnya praktek ekonomi tanpa riba di sebagian besar negeri muslim, berjalan berkelindan dengan menurunnya pamor dan kekuasaan negeri-negeri muslim di belahan dunia mana pun. Puncaknya terjadi pada 4 November 1992, ketika Daulah Usmaniyah Turki sebagai pemegang amanah kekhalifahan harus rela melepas kekuasaannya, setelah berkuasa selama 633 tahun di Asia, Eropa, dan Afrika.

Seiring perjalanan waktu, kekejian sistem riba secara ekonomi maupun sosial, mulai terkuak ke permukaan. Publik pun mulai melirik kembali system ekonomi tanpa riba yang pernah dicampakkannya. Akhirnya, dunia Islam pun merespon ramai-ramai keinginan umat untuk kembali hidup tanpa riba. Tak heran, di penghujung tahun 1970-an, beberapa Negara Islam mulai mengembangkan industri keuangan tanpa riba. Apabila setelah berdiri bank pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB), sebagai hasil dari sidang OKI di Karachi, Pakistan, Desember 1970.

Pada akhirnya, ulama pun terlibat aktif untuk mendukung kembalinya sistem tanpa riba ini. Tak heran, jika kemudian ulama-ulama sedunia mengeluarkan fatwa yang pada intinya menegaskan kembali bahwa bunga (riba) apapun bentuknya tetap haram, sedikit atau banyak. Di antara fatwa itu adalah: pertama, fatwa dari pertemuan OKI di Karachi tahun 1970. Kedua, Fatwa Kantor Mufti Negara Mesir tahun 1989 hingga 1990 yang memutuskan bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang di haramkan. Ketiga, Konferensi II Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) di Universitas Al-Azhar Cairo, Muharram 1385 H/Mei 1965 menetapkan, tak ada keraguan sedikit pun atas keharaman praktek membungakan uang seperti dilakukan oleh bank-bank konvensional. Keempat, Fatwa lembaga fiqh Rabitah Alam Islami Makkah dan konferensi Islam internasional di jedah tahun 1976.

Ada satu masa dalam sejarah, yakni sampai kira-kira 20 tahun yang lalu, orang beranggapan bahwa bunga bank itu tidak lain dari pada riba. Kedua-duanya sama “bunga” uang, sebab itu hukumnya dikatakan sama. Akan tetapi sesudah seiring menyelidiki lebih dalam percaturan bank, lalu dibandingkan dengan praktek riba yang di cela dalam kitab suci Qur’an, terdapatlah kenyataan bahwa penetapan hukum masalah ini tidaklah semudah itu. Memang ada peramaan antara riba dan bunga bank itu, karena keduanya itu sama-sama bunga dari uang yang di pinjamkan.

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), mengikat (*al-irtifa’*), dan membesar (*al-‘uluw*). Dengan kata lain riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggung atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.

Mengenai pemahaman bunga bank dari aspek legal-formal dan secara induktif, berdasarkan pelarangan terhadap larangan riba yang diambil dari teks (*nas*), dan tidak perlu dikaitkan dengan aspek moral dalam pengharamannya. Paradigma ini berpegang pada konsep bahwa setiap utang-piutang yang disyaratkan ada tambahan atau manfaat dari modal adalah riba, walaupun tidak berlipat ganda. Oleh karena itu, betapapun kecilnya, suku bunga bank tetap haram. Karena berdasarkan teori *qiyas*, kasus yang akan di*qiyas*-kan (*fara’*) dan kasus yang di*qiyaskan* (*asal*) keduanya harus disandarkan pada *illat jali* (*illat* yang jelas). Dan kedua kasus tersebut (bunga bank dan riba) disatukan oleh *illat* yang sama, yaitu adanya tambahan atau bunga tanpa disertai imbalan. Dengan demikian, bunga bank sama hukumnya dengan riba.¹⁰¹

Ada beberapa pendapat ulama terkait dengan perdebatan riba dan bunga bank. *Pertama*, mayoritas ulama salaf dan khalaf, termasuk *al-A’immah al-Mujtahidin* dari kalangan Sunni dan Syi’i. Sedangkan dari

¹⁰¹Muhammad Syarif Hasyim, *Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*, Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 1, April 2008, h. 51.

kelompok neorevevalis, seperti Abu A'la al Maududi, melihat riba dari segi dampak yang ditimbulkan. Mereka sepakat bahwa hukum *riba an-nasiah* adalah haram berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 275-278. Jenis *riba an-nasi'ah* adalah praktek riba yang terjadi pada masa Jahiliyyah pra-Islam. Terkait perdebatan apakah bunga bank sama dengan riba atau tidak, Al-Maududi menyatakan bahwa bunga bank adalah termasuk riba yang dilarang. Pernyataan al-Maududi adalah sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berpendapat bahwa bunga bank adalah haram.

Menurut Adiwarman Karim, bunga bank dalam perbankan konvensional termasuk riba *an-nasi'ah*. Praktek ini seringkali muncul dalam pembayaran bunga deposito, tabungan, giro dan lain-lain. Karim menjelaskan lebih jauh bahwa keharaman bunga bank karena bank sebagai kreditur mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu diawal transaksi. Padahal bisa jadi nasabah yang mendapatkan pinjaman tersebut belum tentu untung, tetapi ia harus membayar bunganya ke bank, dan bank tidak mau tahu apakah nasabah tersebut untung atau rugi. Disinilah adanya unsur saling mendhalimi dan ketidakadilannya. Unsur-unsur yang seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam.¹⁰²

Pendapat *kedua*, menurut ulama modernis, seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, berpendapat bahwa bunga bank dapat dikategorikan riba jika bunga tersebut berlipat ganda. Pendapat ini didasarkan pada ayat al-Qur'an Surat Ali Imran (3): 130. Konsekuensinya adalah Abduh membolehkan bunga bank dengan alasan bahwa, *pertama*, bunga bank adalah tidak bersifat menindas, justru mendorong kemajuan ekonomi; *kedua*, menabung di bank pada dasarnya merupakan perkongsian (*mudharabah*), walaupun tidak sama persis dengan yang diformalkan dalam fikih; dan *ketiga*, sebagai konsekwensi alasan pertama, yaitu perbankan dapat mendorong kemajuan dalam bidang-bidang lain,

¹⁰²Marwini, *Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Jurnal Az Zarqa', Vol. 9, No. 1, Juni 2017, h.9.

disamping ekonomi. Pendapat ini juga oleh pendapat Ahmad Hasan dan Umer Chapra yang menyatakan bahwa riba diharamkan karena berlipat ganda dan eksploitatif. Sehingga ia berpendapat bahwa hukum bunga lembaga-lembaga keuangan modern adalah tidak haram karena tidak sama dengan riba pada zaman Jahiliyyah yang berlipat ganda dan eksploitatif.¹⁰³

Menurut Abdul Aziz Jawish dan Hafni Nasif istilah riba sama dengan *usury*, tetapi, mereka membedakan antara *usury* (riba) dengan *Intrest* (bunga). Menurutny, *usury* adalah jika tambahanitu sama atau lebih besar dari jumlah pinjamannya, sedangkan *interest* (bunga) jika tambahan itu lebih kurangdari pokoknya.¹⁰⁴

Adapun pendapat *ketiga*, menurut pendapat Fazlurrahman (1984), Muhammad Asad (1984), dan Said Najjar (1989) bahwa riba dikatakan haram karena eksploitatif. Mereka memahami ayat-ayat riba lebih melihat pada aspek moral dari pada legal-formalnya. Sehingga mereka berpendapat bahwa hukum bunga bank menjadi fleksibel dan relatif. Jadi bunga bank yang dilarang adalah yang dalam prakteknya ada unsur eksploitasi terhadap debitur. Jika tidak, maka bunga bank tidak dilarang. Douallibi (Syiria) membedakan antara pinjaman produktif dan konsumtif. Ia berpendapat bahwa dalam pinjaman produktif diperbolehkan ada bunga, sedangkan dalam pinjaman konsumtif tidak diperbolehkan karena ada unsur eksploitasi terhadap orang lemah.¹⁰⁵

Jika dilihat dari konsep bunga yang ada di bank, maka tidak lepas dari kerangka konseptual dari bank itu sendiri.¹⁰⁶ Perkembangan bank pada abad pertengahan di dunia mewarnai sejarah perkembangan bunga.¹⁰⁷ Menurut G.M. Verryn Stuart, bank selain sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat-alat

¹⁰³Marwini, *Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Jurnal Az Zarka', Vol. 9, No. 1, Juni 2017, h.10.

¹⁰⁴Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*, Leden-New York Koln: E.J. Brill, 1996, h. 46.

¹⁰⁵Ibid, h. 44.

¹⁰⁶Thomson, *Dictionary Banking*. London: The New Publishing co.. ltd. Ed. Ke II

¹⁰⁷Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Terj. Aswin Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, 1994. Cet. 2 h. 1

pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran baru dengan giral,¹⁰⁸ juga merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa, misalnya menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kemasyarakat dalam bentuk kredit dan memperlancar transaksi perdagangan dengan system perhitungan bunga (*Interest Forgone*).

Jika diamati sistem operasional yang digunakan bank konvensional adalah menggunakan sistem perhitungan bunga kredit atau pinjaman (*invest note*), sedangkan yang dimaksud dengan bunga itu adalah sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah karena membeli atau menjual produknya, atau dengan kata lain bahwa bunga itu sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah karena memiliki simpanan dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank karena nasabah sebagai pihak peminjam. Mengenai tinggi rendahnya suku bunga di tengah masyarakat karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni: likuiditas masyarakat, ekspektasi, inflasi, besarnya suku bunga dalam negeri dan ekspektasi perubahan nilai tukar dan premi atas resiko.¹⁰⁹

Bentuk-bentuk sistem keuangan memang ada sebelum Islam yang kemudian dikembangkan pada zaman modern ini seperti, *al-jarah*, *al-ba'i'u bisamanin ajil*, musyarakah atau join venture, pinjam dengan tambah bunga atau riba. Serta kredit pemilikan barang atau *al murabahah*.¹¹⁰ Bentuk-bentuk perdagangan ini berkembang di jazirah Arab karena letaknya sangat strategis. Seperti di Mekkah, Jeddah dan Madinah. Jazirah Arab yang beradadi jalur perdagangan antara asia dan afrika-eropa kemungkinan besar dipengaruhi oleh bentuk-bentuk ekonomi Mesir purba, Yunani kuno dan Romawi, pada tahun 2500 SM. Mereka

¹⁰⁸Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, Cet. 5. h. 1

¹⁰⁹Bank Indonesia, *Sistem Perbankan dan Peranan Perbankan, dan Dampaknya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi*, makalah dalam lokakarya bunga bank dan perbankan, Bogor, tahun. 1990.

¹¹⁰Warkom Sumitro. *Asas-asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997. h. 6.

telah mengenal system perbankan. Babilonia wilayah Irak juga mengenal sistem perbankan pada tahun 2000 SM. Islam melarang praktek riba yang ditujukan kepada lembaga perbankan, larangan membungakan tidaklah hanya agama Islam yang melarang, namun agama samawi lainnya juga ikut melarang seperti kristen dan yahudi.¹¹¹ Seperti dalam kitab exodus pasal 22 ayat 25 dinyatakan jika meminjamkan uang kepada salah seorang maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, jangan engkau bebaskan bunga uang kepadanya. Demikian pula dalam kitab Devtoronotif pasal 23 ayat 19 dinyatakan “jangan engkau membungakan uang kepada saudaramu baik uangmaupun bahan makanan atau apa saja yang dapat dibungakan.”¹¹²

Perbedaan sangat mendasar antara sistem bunga dengan bagi hasil adalah pada sistem bunga dalam bank konvensional, penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada kesepakatan bersama (pihak bank yang menentukan) dan apakah perhitungan sistem bunga dapat menyuloh dalam mengangsur dana tidak merugikan pihak bank. Pada sistem bunga, suku pinjaman bank konvensional dan sukubunga simpanan masing-masing akan saling mempengaruhi. Apabila suku bunga simpanan tinggi otomatis suku bunga pinjaman ikut tinggi. Sedangkan dalam sistem bagi hasil tidak demikian. Pada sistem bunga, tinggi rendahnya bunga dipengaruhi oleh target laba (keuntungan) yang diinginkan oleh pihak bank, jadi apabila laba yang diinginkan besar maka bunga ikut besar pula dan sebaliknya, sedangkan pada sistem bagi hasil tidak adanya demikian.

Secara kultural, tiap peradaban manusia sebenarnya menolak keberadaan bunga bank. Riba pada agama-agama langit (samawi) telah dinyatakan haram, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Lama Kitab Keluaran ayat 25 pasal 22: “Bila kamu menghutangiseseorang di antara warga bangsamu uang maka janganlah kamu berlaku laksana

¹¹¹*Ibid.*, h. 6

¹¹²*Ibid.*, h. 7

seorang pemberi hutang, jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang.” Namun orang Yahudi beranggapan bahwa riba itu hanyalah terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi. Tetapi tidak terlarang dilakukan terhadap non-Yahudi. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Kitab Ulangan ayat 20 pasal 23.¹¹³

Tidak ada catatan yang pasti tentang kapan sebenarnya manusia mulai mempraktekkan riba. Pada masa Nabi Musa AS orang-orang Yahudi dilarang mempraktekkan bunga. Larangan ini, terdapat di Old Testament (Perjanjian Lama) dan UU Talmud. Di antaranya, Kitab Deuteronomy (Ulangan) pasal 23 ayat 19: “Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apa pun yang dapat dibungakan.”¹¹⁴ Masyarakat masa awal Islam belum mengenal sistem perbankan modern dalam arti praktis, sehingga dalam menanggapi fenomena ini, terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pandangan dalam menilai permasalahan ini menimbulkan kesimpulan-kesimpulan hukum yang berbeda pula, dalam hal boleh atau tidaknya, halal haramnya umat Islam bermu’amalah dengan bank. Jika kembali kepada ajaran Islam di mana al-Quran sendiri telah melarang bentuk mu’amalah yang mengandung unsur riba.¹¹⁵ Dasar persoalan riba dapat diketahui dengan jelas dan tegas dalam 3 (tiga): *pertama*, al-Quran Surat al-Ruum: 39, sewaktu Nabi masih di Makkah di hadapan orang Arab musyrikin. *Kedua*, al-Quran Surat Ali Imran: 130-132, sewaktu Nabi sudah pindah ke Madinah. Dan *ketiga* al-Quran Surat al-Baqarah: 275-280.

Diskursus tentang bunga bank tidak lepas dari peran ulama sebagai *designer* dalam membidani lahirnya perbankan syariah di Indonesia, akan tetapi mereka belum menyepakati untuk menyatakan bahwa bunga bank yang selama ini dipraktekkan dalam perbankan konvensional adalah

¹¹³ Abdul Salam, *Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)*, Dosen Ekonomi Syariah STIA Alma Ata Yogyakarta. Dalam Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. III, No. 1 Juni 2013/1434 H, h. 86.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 79

haram. Hanya Majelis Ulama Indonesia yang telah mengeluarkan fatwa Nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram. Fatwa ini kemudian memunculkan kontroversi di kalangan ulama yang tergabung dalam Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Walaupun kemudian pada tahun 2006 Muhammadiyah memberikan fatwa baru bahwa bunga bank termasuk riba dan diharamkan. Awalnya Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama berpendapat bahwa hukum bunga bank adalah *musytabihat*.¹¹⁶ Adapun di antara tokoh-tokoh fikih Islam kontemporer yang menganut paradigma bunga bank haram adalah Abu Zahrah, Wahbah Zuhayli, Yusuf al-Qardawi (masing-masing ahli fikih Timur Tengah), Abdul Mannan, Syafi'i Antonio, Adiwarman Azwar Karim (masing-masing ahli hukum Islam dan praktisi perbankan Islam Indonesia).¹¹⁷

Mengamati diskursus riba dan bunga bank dalam sistem keuangan moneter, Lajnah Bahsul Masail Nahdhatul Ulama juga memutuskan pada Mukhtamar NU ke 2 di Surabaya 1927, mengenai bunga bank. Terdapat tiga pendapat ulama NU sehubungan dengan masalah ini; yaitu haram sebab termasuk hutang yang dipungut rente; yang kedua adalah halal sebab tidak ada syarat pada waktu aqad, sementara adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat; dan yang ketiga adalah syubhat (tidak tentu halal-haramnya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya. Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram. Tidak ada rekomendasi apapun terhadap perlunya lembaga perkonomian yang berbasis pada syaria'ah. Kemudian pada tanggal 21-25 Januari 1992, Lajnah Bahsul Masail Nahdhatul Ulama yang bersidang di Bandar Lampung (1992), kembali membahas tema "Masalah

¹¹⁶Muhammad Yasir Yusuf, *Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama*, Jurnal Media Syariah, Vol. XIV, No. 2, Juli-Desember 2012, h. 155.

¹¹⁷Muhammad Syarif Hasyim, *Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*, Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 1, April 2008, h. 51.

Hukum Bunga Bank Konvensional”, walaupun mereka masih berselisih pendapat mengenai keharaman bunga bank, tetapi mereka memberikan rekomendasi penting terhadap keberadaan perbankan syariah di Indonesia. Rekomendasi tersebut berbunyi: “Mengingat warga NU merupakan potensi terbesar dalam pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan sebagai peminjam dan pembina dan memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan kehidupan warga NU, maka dipandang perlu mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam yakni bank tanpa bunga”.¹¹⁸

Perbedaan pandangan mengenai bunga bank sebagai riba, ataupun bukan riba pada prakteknya menimbulkan adanya pemahaman mengenai bunga bank yang dianggap riba dalam praktek bank konvensional dan telah menimbulkan kegelisahan bagi karyawan bank atau bankir di bank konvensional. Begitu juga dalam praktek bank syariah muncul klaim yang menyatakan bahwa praktek bank syariah bebas dari praktek riba.¹¹⁹ Kegelisahan tersebut juga dikemukakan oleh beberapa karyawan bank konvensional yang mengaku gelisah dan memilih untuk berhenti bekerja (*resign*) pada bank konvensional yang dipahaminya melakukan praktek riba.¹²⁰ Padahal dalam konstruksi fiqih masih terdapat perbedaan mengenai hukum riba dalam praktek bunga di bank konvensional. Pemahaman bankir dalam memaknai bunga bank dalam konteks makna riba pada praktek perbankan mengalami perbedaan persepsi dan menjadi fenomena yang berkembang di kalangan bankir bank konvensional, bahkan berhenti mencari pekerjaan lain, dan bankir bank syariah menganggap pekerjaan bankir bank konvensional haram. Hal ini muncul persepsi dan sikap ekstrim

¹¹⁸Muhammad Yasir Yusuf, *Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama*, Jurnal Media Syariah, Vol. XIV, No. 2, Juli-Desember 2012, h. 153-154.

¹¹⁹Wawancara dengan MF, FZ, AS dan RK yang merupakan karyawan (bankir) bank syariah di Palangka Raya pada tanggal 6 Agustus 2018 .

¹²⁰Wawancara dengan AK, DM, MT dan EF yang merupakan karyawan (bankir) bank konvensional di Palangka Raya pada tanggal 28 Agustus 2018 .

para bankir bank di era modern dalam memahami bunga bank, bahkan diantara mereka berhenti dari bank, baik bank konvensional maupun bank syariah sendiri yang dikatakan bebas riba. Namun pemahaman riba dan bunga bank secara esensi bagi mereka sama saja, baik pada praktek bank konvensional, maupun bank syariah.

Pemahaman mengenai riba dan bunga bank pada prakteknya masih menjadi perdebatan terus berjalan mengikuti sistem keuangan yang berlaku. Adanya pandangan yang menyatakan bahwa bunga bank adalah termasuk riba yang dilarang memposisikan praktek sistem keuangan dalam lembaga perbankan tidak sesuai dengan ajaran Islam, namun ada juga pandangan yang memberikan toleransi bahwa bunga bank berbeda dengan riba, dengan batas toleransi dengan pertimbangan moral selama adil, tidak melipat ganda, tidak eksploitatif dan tidak zalim atau aniaya yang berdampak pada kesenjangan ekonomi dan rusaknya stabilitas sistem keuangan.

2. Interpretasi Moderat dan Telaah Ulang *Maqashid Syariah* tentang Larangan Riba

Esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Secara luas penghapusan riba dapat dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Riba jangan hanya dipahami dan direduksi pada masalah bunga bank saja. Tetapi secara luas riba bisa hidup laten atau poten di dalam sistem ekonomi yang *diskriminatori*, *eksploitatif* dan *predatori* yang berarti dapat hidup di dalam suatu sistem ekonomi subordinasi, kapitalistik, neoliberalistik dan hegemonik imperialistik, yang tidak bisa dibatasi dari segi perbankan saja. Karena itulah, pengembangan ekonomi syariah ke depan tidak dapat dilakukan secara isolasi atau parsial, tetapi harus dilakukan secara total. Dengan kata lain, ekonomi syariah tidak boleh direduksi hanya dengan memusatkan pada upaya membangun bank-bank syariah. Ekonomi syariah harus dapat menangkal system ekonomi yang

exploitatory secara luas, yang memahami dan menumbuhkan kesenjangan ekonomi yang membiarkan terjadinya *trade off* secara sistemik untuk kerugian si miskin dan si lemah, yang tersubordinasi dan terdiskriminasi yang membiarkan berkembangnya *laissez faire* dalam arti luas tanpa memperhatikan perlunya dekonstruksi dan restrukturisasi system ekonomi yang *usurious* ini. Untuk itu dibutuhkan pakar ekonom muslim yang menguasai ilmu ekonomi konvensional sekaligus kontemporer sehingga mampu mengoreksi, mengimprovisasi dan lebih tangguh serta mumpuni mengantarkan ilmu ekonomi syariah ke arah tercapainya keadilan dan kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat.¹²¹

Dari segi konteks atau *illat*, pengharaman riba dalam Al-Quran adalah karena adanya faktor *zulm*, yaitu memungut tambahan utang dari pihak-pihak yang seharusnya ditolong. Sementara konteks bank adalah niaga (*tijarah*) untuk mencari keuntungan bersama antara pihak yang punya modal (investor), pihak yang membutuhkan modal (debitur/pengusaha), dan pihak perbankan sebagai mediator dan penyedia jasa. Sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan tolong menolong antara si kaya dan si miskin, melainkan upaya kerjasama dalam mengembangkan modal dengan menjadikan bank sebagai mediator antara penabung, pengusaha dan bank. Karena itu, aspek aniaya (ketidakadilan) di sini amat kecil kemungkinan terjadi sebab masing-masing pihak telah saling rela dan mengetahui hak serta kewajibannya masing-masing. Dengan konsep seperti itu, akhirnya mereka sampai kepada satu kesimpulan bahwa antara riba dengan bunga bank memiliki konteks dan esensi yang berbeda. Riba dianggap kelebihan yang diambil dari pinjaman yang ditujukan untuk keperluan konsumtif, sedangkan bunga bank adalah kelebihan atas pinjaman yang ditujukan dalam rangka, kebutuhan produktif. Dengan analisis seperti itu, penganut paradigma ini mengharuskan mereka, meninggalkan *qiyas* dan lebih memilih mengambil metode *istihsan* sebagai dasar untuk sampai kepada

¹²¹Ummi Kalsum, *Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)*, Jurnal Al-‘Adl Vol. 7, No. 2, Juli 2014, h. 69-70.

suatu konklusi hukum yang dianggap lebih tepat untuk dijalankan. Di antara tokoh dan ahli hukum Islam yang menganut paradigma kontekstual dalam menilai permasalahan bunga bank adalah Munawir Syadzali, Quraish Shihab, Umar Shihab dan M. Dawam Raharjo (masing-masing adalah ulama fikih dan cendekiawan muslim Indonesia). Demikian pula, Fazlur Rahman, Mahmoud Syaltout, dan Mustafa Ahmad al-Zarqa.¹²²

Jika dilihat dengan pendekatan profetik, Nabi Muhammad Saw adalah orang yang pertama yang menguraikan maksud-maksud Al-Qur'an dan menjelaskan kepada umatnya wahyu-wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Pada masa itu tak seorang pun dari sahabat rasul yang berani menafsirkan Al-Qur'an, karena rasul masih berada ditengah-tengah mereka. Rasul memahami al-Qur'an secara global dan rinci, dan adalah kewajibannya menjelaskan kepada para sahabatnya, atas dasar wewenang yang diberikan Allah untuk menafsirkan Al-Qur'an.¹²³

Muhammad Abduh berpandangan bahwa tujuan pokok penafsiran Al-Qur'an adalah, menekankan fungsi kehidayahan Al-Qur'an untuk manusia, agar mereka benar-benar dapat menjalani kehidupan ini di bawah bimbingan dan petunjuk Al-Qur'an. Sedangkan uraian dan pembahasan tafsir hanyalah merupakan jalan atau cara untuk mencapai tujuan pokok tersebut.¹²⁴ Al-Qur'an mengandung beberapa ajaran seperti akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Muamalah adalah satu dimensi hubungan kehidupan antar sesama manusia. Termasuk dalam konteks ekonomi, seperti jual-beli. Maka, didalam Islam harta sangat dijunjung tinggi. Karena tanpa harta manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Oleh karena itu Allah Swt. menyuruh manusia memperolehnya, memilikinya dan

¹²²Muhammad Syarif Hasyim, *Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*, Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 1, April 2008, h. 53.

¹²³Rif'at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: kajian masalah Akidah dan Ibadat*, Jakarta: Paramedina, 2002, h. 91

¹²⁴Muhammad 'Amarah, *Al-A'mal al-Kamilah li alImam Muhammad Abduh*, op. cit., Jilid. IV, h. 9. Lihat juga Rif'at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh*, op. cit., h. 99

memanfaatkannya bagi kehidupan manusia dan Allah melarang berbuat sesuatu yang dapat merusak dan meniadakan harta itu.¹²⁵

Berdasarkan uraian di atas, tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa al-Qur'an adalah kitab yang lengkap dan berisi petunjuk yang komprehensif dalam seluruh aktifitas kehidupan manusia termasuk ajaran-ajaran tentang tata cara beribadah, etika, transaksi, politik, hukum, perang dan damai, serta system ekonomi yang diwahyukan oleh Allah Swt. sebagai anugrah semua manusia, khususnya sebagai petunjuk.¹²⁶ Begitu juga dalam memahami *nash* tentang riba, maka perlu pemahaman reinterpretasi moderat (*fikih wasathiyyah*) terhadap larangan riba dengan melihat kembali tujuan syariat Islam itu sendiri (*maqasid syariah*).

Ketika Islam membicarakan materi dan harta, maka pandangan Islam adalah sebagai jalan, bukan satu-satunya tujuan, bukan sebagai sebab yang dapat menjelaskan kejadian-kejadian. Karena, disana kewajiban itu lebih dipentingkan dari pada materi. Tetapi materi adalah menjadi jalan untuk merealisasikan sebagian kebutuhan-kebutuhan dan manfaat-manfaat yang tidak cukup untuk manusia, yaitu pelayanan kepada seseorang yang bersifat materi, yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum, tanpa berbuat *dhalim* atau berlebih-lebihan.¹²⁷ Bukti pentingnya harta bagi manusia, terdapat dalam al-Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 10. "*Maka apabila shalat telah dilaksanakan, bertebaranlah dimuka bumi, carilah karuni (kekayaan) Allah...*" (QS. Al-Jumu'ah: 10)

Sesuai dengan petunjuk ayat diatas maka harta yang boleh didapat dan diperoleh dan dimanfaatkan terikat kepada dua syarat: Pertama, harta itu adalah baik, baik secara zat dan materinya, tidak merusak kepada diri yang memakai dan tidak merusak pada orang lain.¹²⁸ Kedua, harta itu

¹²⁵ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, h.177

¹²⁶ Sayyid Qutub, *Dasar-dasar Sistem Ekonomi Sosial dalam Kitab Tafsir Fi zhilalil Qur'an*. Terj. Muhammad Abbas Aula, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1994, h. ix

¹²⁷ Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999, h. 5

¹²⁸ Hal ini juga ditegaskan dalam salah satu ayat Al-Qur'an yang artinya "Dan menghalalkan bagimu yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk... (QS.

adalah halal dalam arti diperoleh sesuai dengan petunjuk Allah swt. dan terhidar dari larangannya.¹²⁹ Dua hal inilah yang menjadi prinsip pokok dalam bermuamalah dengan harta yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an. Sebaliknya, Islam sangat menentang segala transaksi yang bertujuan merusak dan merugikan orang lain dengan cara-cara yang bathil. Salah satunya ialah *Riba*. *Riba* secara sederhana didefinisikan sebagai "*Bertambah dari asalnya*" merupakan transaksi yang dilarang oleh Allah Swt. tentang keharaman *riba* telah ditegaskan Allah swt. dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 275: Artinya: "*Mereka berkata, sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba...* (QS. Al-baqarah: 275)

Salah satu alasan larangan *riba* karena tidak sesuai dengan prinsip Islam yang menyuruh umatnya untuk tolong menolong tanpa pamrih. Tindakan *riba* secara tidak langsung memberikan kesenangan dan kerelaan kepada satu pihak, sedangkan Islam menghendaki kesenangan dan keridhaan itu secara timbal balik.¹³⁰ Islam menginginkan kehidupan yang berkeadilan dan kondusif serta dalam tatanan nilai-nilai norma kehidupan yang bermoral. Mekanisme membelanjakan harta yang tidak sesuai syara' tidak dapat dibenarkan adanya. Mekanisme yang dianjurkan itu diantaranya adalah, prinsip sukarela, menarik manfaat dan menghindarkan mudharat bagi kehidupan manusia, memelihara nilai-nilai keadilan dan tolong menolong. Sebaliknya, bila prakteknya bertentangan dengan nilai-

Al-A'raf: 157) Dalam Surah Al-Adiyat, harta benda itu disebut sebagai sesuatu yang baik dan pada Surah Al-Jumu'ah ayat 10 harta disebut sesuatu keutamaan dari Tuhan. Dilain sisi, dalam beberapa ayat lainnya diajarkan untuk memberi perhatian kepada harta (surah an-nahl: 5-8). Atas dasar inilah maka harta terdiri dari lima ajaran pokok (*Al-Kulliyah Al-Khams*) yang menjadi kebutuhan dasar (*dharuriyah*) dalam kehidupan manusia. Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosia*, Bandung: Mizan, 1994, h. 169l

¹²⁹ Al-Qur'an mengatakan "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka...* (QS. An-Nisa: 29). Lihat Amir syariffudin, *Garis-garis besar fiqh...* h. 180-181

¹³⁰ Amir syariffudin, *Garis-garis besar fiqh...* h. 212.

nilai ini, seperti harta yang mendatangkan mudharat atau jauh dari prinsip keadilan seperti riba adalah dilarang.¹³¹

Menurut sejarahnya, Quraish Shihab berpendapat bahwa Thaif, tempat pemukiman suku Thaqif yang terletak sekitar 75 mil sebelah tenggara mekkah, yang juga merupakan daerah subur dan menjadi pusat perdagangan antar suku, terutama suku Quraisy telah mengenal praktek-praktek riba. Bahkan sebagian tokoh sahabat-sahabat nabi, seperti Abbas bin Abul Munthalib (paman Nabi) dan Khalid bin Walid, dia telah mengenal riba sampai dengan turunnya ayat larangan tersebut.¹³² Dan banyak literature sejarah yang menerangkan bahwa rusaknya tatanan sosial-ekonomi masyarakat saat itu, akibat praktek yang salah satunya adalah Riba tersebut. Bagaimana esensi riba sebenarnya, dan hal ini sangat penting dikaji dalam telaah kajian kontemporer.

Demikian, bagaimanapun riba dimasa lampau riba dengan segala sifat dan dampaknya sudah dapat dipahami, kendati dalam pengertiannya yang sederhana. Artinya, berbagai kegiatan ekonomi sudah dapat dikatakan riba atau tidak. Perkembangan ekonomilah kelihatannya yang membentuk persepsi tertentu dalam masyarakat menyangkut penilaian terhadap kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan tertentu yang saat ini dipandang baik bahkan dibutuhkan, dipandang terkutuk dan buruk berdasarkan pandangan masa lampau karena perbedaan persepsi. Ulama dulu hingga kini, Ketika membahas masalah riba masih terjadi perdebatan, hal itu terutama terfokus pada hal apa yang sesungguhnya dimaksudkan dengan riba itu dalam Al-Qur'an dan bagaimana perekonomian kaum muslimin ditengah-tengah system perbankan modern yang antara lain menysaratkan praktek bunga dan system simpan pinjam uang. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari hingga kini sebagian besar kehidupan bermasyarakat masih banyak praktik riba dalam simpan dan pinjam uang.

¹³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas persoalan keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, Bandung, Mizan, 1996, h. 201.

¹³² Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998, h. 259.

Bunga bank dalam kajian hukum (fikih) Islam, merupakan masalah kontemporer yang melahirkan dua paradigma cara berijtihad yang berbeda dalam menentukan status hukumnya, apakah termasuk riba yang diharamkan atau bukan, yaitu paradigma tekstual dan kontekstual. Perbedaan yang mendasar antara kedua paradigma tersebut adalah cara melihat *illat* (sebab adanya hukum) pengharaman riba sebagai hukum asal. Paradigma tekstual memahami *illat* pengharaman riba terletak pada adanya tambahan, sebagaimana makna yang dikandung oleh kata riba itu sendiri dan berdasarkan konfirmasi *nas*, bahwa hanya modal pokok yang dapat diambil, sehingga apabila *illat* itu terdapat di bunga bank, maka bunga bank tersebut adalah riba, dan hukumnya adalah haram. Kelompok paradigma kontekstual memahami *nas* dari pengharaman riba secara konteks, yaitu adanya unsur *zulm* atau eksploitasi yang terjadi pada waktu diharamkannya riba. Sehingga kondisi tersebut bila dijumpai pada pemberlakuan bunga bank, barulah bunga bank itu dikategorikan sebagai riba yang status hukumnya jelas, yaitu haram. Kelompok ini melihat bahwa apa yang terjadi di bunga bank tidak ada unsur *zulm* atau eksploitasi, sehingga mereka menetapkan bahwa bunga bank tidak termasuk riba, dan hukumnya boleh (halal).¹³³

Esensi pelarangan riba (*usurios*) dalam Islam berdasarkan pertimbangan pertimbangan moral dan kemanusiaan sebab esensi pelarangan riba adalah penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan. Sementara status hukum bunga bank ada perbedaan pendapat para pakar baik pakar hukum Islam maupun pakar ekonomi Islam. Hal ini dilatarbelakangi adanya perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat tentang riba dan apakah bunga termasuk kategori riba atau tidak? Ada dua pendapat; *pertama*, menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fiqh bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba (Q.S. al-Baqarah: 130. Dan *kedua*, pendapat yang

¹³³Muhammad Syarif Hasyim, *Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*, Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 1, April 2008,, h. 56-57.

menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba karena yang dinyatakan pada Q.S al-Baqarah:130 riba harus bersifat berlipat ganda (tidak wajar).¹³⁴

Berdasarkan uraian di atas, reinterpretasi moderat (*wasathiyah*) terhadap larangan riba dapat ditinjau kembali dengan melihat kembali tujuan syariat Islam itu sendiri (*maqashid syariah*). Artinya dalam konteks keuangan modern, bunga bank tidak termasuk kategori riba karena yang dinyatakan pada Q.S al-Baqarah:130 riba harus bersifat berlipat ganda (tidak wajar) dengan memperhatikan aspek moral dibanding aspek legal formal mengenai larangan riba dalam nash, namun bunga bank akan menjadi haram jika eksploitatif dan konsumtif.

3. Prinsip *Wasathiyah* dalam Pengembangan Fikih Moderat di Bidang Keuangan

Era modern atau era globalisasi adalah era diplomasi, era di mana umat Islam dituntut untuk bersikap moderat (*wasathiyah*). Tuntutan tersebut bukanlah tuntutan zaman, tetapi tuntutan Al-Qur'an yang wajib dilaksanakan. Makna *wasathiyah* tidak sepenuhnya diambil dari pemahaman para ekstremis yang cenderung mengedepankan sikap keras tanpa kompromi (*ifrath*), atau pemahaman kelompok liberalis yang sering menginterpretasikan ajaran agama dengan sangat longgar, bebas, bahkan nyaris meninggalkan garis kebenaran agama sekalipun (*tafrith*). Makna Islam sebagai agama *wasathiyah* harus diambil dari penjelasan para ulama, agar tidak memicu *missunderstanding* dan sikap intoleran yang merusak citra Islam itu sendiri. Pemahaman makna *wasathiyah* yang benar mampu membentuk sikap sadar dalam ber-Islam yang moderat dalam arti yang sesungguhnya (*ummatan wasathan*), mewujudkan kedamaian dunia, tanpa kekerasan atas nama golongan, ras, ideologi bahkan agama.¹³⁵

¹³⁴Ummi Kalsum, *Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)*, Jurnal Al-'Adl Vol. 7, No. 2, Juli 2014, h. 81.

¹³⁵Afrizal Nur dan Mukhlis, *Konsep Wasathiyah dalam Alquran: (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir wa At-Tanwir dan Aisar At-Tafasir)*, Jurnal An-Nur, Vol. 4, No. 2, 2015, h. 205.

Karakter atau jati diri Islam adalah *wasathiyah* yang bersifat *tawasuth*, *tawazun* dan *ta'adul*. Menurut terminologi kajian Islam di dunia internasional Islam *wasathiyah* sering diterjemahkan sebagai *justly-balanced Islam* (Islam berkeseimbangan secara adil) atau juga *middle path Islam* (Islam jalan tengah).¹³⁶ *Wasathiyah* berasal dari kata “*wasathan*” dengan “*sawa'un*” yaitu tengah-tengah diantara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengah atau yang standar atau yang biasa-biasa saja, *wasathan* juga bermakna menjaga dari bersikap *ifrath* dan *tafrith*. Kata-kata *wasath* dengan berbagai derivasinya dalam al-Qur'an berjumlah 3 kali yaitu surat al-Baqarah ayat 143, 238, surat al-Qalam ayat 48.¹³⁷

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 menyatakan: Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Menurut Qurais Shihab, atas dasar kehendak Kami, Kami memberi kalian petunjuk menuju jalan yang paling lurus. Kami menjadikan kalian umat penengah, umat pilihan. Kami merestui agama yang kalian anut dan amal saleh yang kalian lakukan, sehingga kalian akan menjadi pengikrar ajaran-ajaran yang benar dari syariat-syariat sebelum kalian. Rasul akan mengayomi dan mengukuhkan kalian melalui ajaran-ajarannya semasa ia hidup, pedoman dan sunnah-sunnahnya sesudah ia mati. Adapun maksud

¹³⁶ Azyumardi Azra, *Islam Indonesia Inklusif Vs Eksklusif: Dinamika Keberagaman Umat Muslimin*, Makalah untuk Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta 6 Juni 2017, h.4.

¹³⁷ Afrizal Nur dan Mukhlis, *Konsep Wasathiyah dalam Alquran: (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir wa At-Tanwir dan Aisar At-Tafasir)*, Jurnal An-Nur, Vol. 4, No. 2, 2015, h. 207.

Kami menetapkan Bayt al-Maqdis sebagai kiblat bagimu selama beberapa masa adalah untuk menguji orang-orang Muslim agar Kami membedakan siapa yang tunduk dan menerima perintah Kami dengan sukarela, dan siapa yang dikuasai oleh sikap fanatis pada bangsa Arab dan peninggalan Ibrâhîm sehingga mereka menyalahi perintah Allah dan tergelincir dari jalan yang lurus. Sebenarnya perintah menghadap Bayt al-Maqdis yang merupakan salah satu dari rukun iman adalah pekerjaan yang berat, kecuali bagi orang yang mendapat izin Allah. Maka barangsiapa yang menghadapkan wajahnya ke Bayt al-Maqdis saat diperintahkan, maka sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan iman dan ibadahnya sebagai wujud belas kasih dan rahmat-Nya.

Dalam tafsir banyak yang berpendapat bahwa ayat di atas, merupakan seruan agar umat percaya kepada nabi Muhammad saw, hal ini terlihat dari penjelasan makna ayat tersebut yaitu, (Kami jadikan kamu) wahai Muhammad (sebagai umat yang pertengahan) artinya sebagai umat yang adil dan pilihan, (agar kamu sekalian menjadi saksi terhadap umat manusia) pada hari kiamat bahwa rasul-rasul mereka telah menyampaikan risalah kepada mereka (dan agar rasul menjadi saksi terhadap kamu sekalian) bahwa ia telah menyampaikan risalahnya kepadamu. (Dan tidaklah Kami jadikan kiblat) kamu sekarang ini (menurut arah kiblatmu dulu) yaitu Kakbah yang menjadi kiblatmu yang mula-mula. Di Mekah Nabi saw. ketika salat menghadap ke sana dan tatkala ia hijrah ke Madinah disuruhnya menghadap ke Baitul makdis guna mengambil hati orang-orang Yahudi. Ada 16 atau 17 bulan lamanya Nabi menghadap ke Baitulmakdis, lalu kembali menghadap ke Ka'bah (melainkan agar Kami ketahui) menurut ilmu lahir (siapa yang mengikuti rasul) lalu membenarkannya (di antara orang-orang yang membelot) artinya murtad dan kembali pada kekafiran disebabkan keragu-raguan terhadap agama dan dugaan bahwa Nabi saw. dalam kebimbangan menghadapi urusannya. Memang ada segolongan orang yang murtad disebabkan hal ini.

Selanjutnya kata *wasathiyah* juga terdapat dalam alquran QS. Al-Baqarah ayat 238, yaitu:

Peliharalah semua shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.

Penjelasan ayat di atas, bahwa shalat lima waktu dengan mengerjakannya pada waktunya (dan salat *wustha* atau pertengahan). Ditemui beberapa pendapat, bahwa shalat *wustha* ada yang mengatakan salat asar, subuh, zuhur atau selainnya dan disebutkan secara khusus karena keistimewaannya. Adapun maksud berdirilah untuk Allah dalam salatmu itu (dalam keadaan taat) atau patuh, berdasarkan sabda Nabi saw., "Setiap qunut dalam Alquran itu maksudnya ialah taat" (H.R. Ahmad dan lain-lainnya). Ada pula yang berpendapat *wustha* dapat dimaknai sebagai khusyuk atau diam, berdasarkan hadis Zaid bin Arqam, katanya, "Mulanya kami berkata-kata dalam salat, hingga turunlah ayat tersebut, maka kami pun disuruh diam dan dilarang bercakap-cakap." (H.R. Bukhari dan Muslim).

Jati diri sebagai *ummatan wasathan* berdasarkan prinsip *wasathiyah* didefinisikan Kamali sebagai; "postur direkomendasikan yang terwujud dalam diri orang yang memiliki naluri dan intelek sehat, yang ditandai dengan ketidaksukaan pada ekstrimisme dan kecerobohan yang nyata". Wacana dan paradigma mengenai Islam *wasathiyah* relatif baru. Pembicaraan tentang subyek ini mulai berkembang sejak awal abad 20, disinggung dalam berbagai karya pemikir di Dunia Arab semacam Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad al-Madani, Muhammad Syaltut, Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhayli.¹³⁸ Prinsip *wasathiyyah* merupakan cara bijaksana Islam dalam menyikapi polemik bunga bank dan riba dalam rangka pengembangan fikih toleran di bidang keuangan.

¹³⁸ Azyumardi Azra, *Islam Indonesia Inklusif Vs Eksklusif: Dinamika Keberagaman Umat Muslimin*, Makalah Makalah untuk Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta 6 Juni 2017, h.5.

Salah satu sorotan utama paradigma *wasathiyah* adalah terkait pemahaman dan sikap bankir terhadap riba dan bunga bank. Secara tekstual riba sudah jelas diharamkan dan hal ini bersifat mutlak bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Namun berbeda bunga, bunga adalah sesuatu hal yang baru. Problem yang muncul di era modern dalam dunia perbankan dan keuangan. Bunga adalah hal yang didapatkan dari suatu kerjasama dan kesepakatan dari berbagai pihak. Hal ini dapat dikatakan sebagai *mudharabah*. Karena sifatnya yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dan apa yang dipraktikkan adalah *mudharabah* dan mendatangkan kemanfaatan tanpa mencekik pihak lain.

Pemahaman moderat biasanya memiliki ciri-ciri seperti *Tawassuth* (mengambil jalan tengah), *Tawazun* (berkeseimbangan), *Syura* (musyawarah), *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), dan *Tahadhdhur* (berkeadaban).

a. Prinsip *Tawasuth* di Bidang Keuangan Islam

Konsep *Tawassuth* (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrath* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *tafrith* (mengurangi ajaran agama). Pemahaman bankir dalam konsep *tawassuth* dapat memposisikan sikap dan pemahaman tentang makna bunga tidak berlebihan sebagai sesuatu yang dianggap sebagai praktik riba namun juga tidak menganggap remeh sebagai sesuatu yang halal dan *thayyib* begitu saja.

Bunga harus dipahami sebagai cara perusahaan memperoleh keuntungan, serta niat dan cara perusahaan untuk meningkatkan dampak ekonomi dari penyaluran kredit tersebut. Bunga tidak boleh dianggap sebagai istilah final yang dapat menggiring opini publik seolah-olah merepresentasi seluruh praktek di bank konvensional sebagai entitas haram sebagaimana riba. Hal ini sesuai kaidah fikih *al-umuru bi maqasidiha* yang artinya semua perkara bergantung pada maksud dan tujuannya. Sikap tidak berlebihan ini dapat di dukung dengan semangat penguatan literasi keuangan dan literasi kolaboratif

antara aqad dan nilai keadilan implementatif dalam transaksi. Sikap bankir dari perbankan syariah juga seyogyanya tidak berlebihan dalam memahami bunga, sehingga lupa bahwa seluruh praktek bank syariah seolah-olah terbebas dari praktek yang diharamkan agama. Bagi bankir konvensional hendaknya mengubah paradigma tentang bunga sebagai bagian dari istilah yang harus ditolerir sebagai tujuan, sedangkan bagi bankir syariah hendaknya mengubah paradigma halal dan thayyib dibidang keuangan tidak cukup dari sisi keabsahan kontrak (aqad) tapi halal thayyib dari hulu sampai ke hilir dari aqad hingga dampak dari implementasi nilai-nilai keadilannya.

b. Prinsip *Tawazun* di Bidang Keuangan Islam

Prinsip moderat dalam pengembangan ekonomi yang tidak kalah penting adalah bersikap seimbang (*tawazun*). Sikap ini memandang bahwa dalam perilaku mencari net profit ekonomi tidak semata-mata berupaya untuk menghindari yang jelas-jelas haram dari sebuah praktik riba, boleh jadi termasuk masalah bunga bank, namun bankir moderat yang memiliki semangat keseimbangan juga tidak melupakan bahwa mengambil keuntungan berlebih dalam berbisnis juga bagian dari sebuah hal yang terlarang. Mengenai hal ini, Allah menegaskan bahwa kecelakaan bagi orang yang curang dalam timbangan, mereka ingin di murahkan jika membeli, dan ingin selalu dimahalkan ketika menjual.

Mengurangi timbangan (bagi penjual) dan ingin ditambahkan berat timbangan (bagi pembeli) adalah salah satu fenomena yang terjadi sejak jaman dahulu hingga sekarang. Hal ini sudah sering dilakukan oleh para pedagang atau pembisnis dan pembeli bukan menjadi hal yang tabu di masyarakat.

Para pedagang akan melakukan banyak cara untuk melakukan penipuan dengan mengurangi timbangan. Misalnya saja, para pedagang yang menggunakan timbangan tradisional. Mereka biasanya mengganjil timbangan sehingga pengukuran menjadi lebih berat dari

berat barang sebenarnya. Akibatnya para pedagang akan mendapatkan keuntungan lebih, sedangkan konsumen menjadi dirugikan. Sebaliknya para pembeli juga merengek (menawar) berlebihan agar mendapat harga yang murah dengan timbangan yang lebih berat. Tentu saja, hal ini tidak diperkenankan dalam Islam. Sebab semua bentuk kecurangan adalah haram.

Mengurangi timbangan adalah salah satu bentuk praktek pencurian milik orang lain. Apabila takaran timbangan itu sedikit, bisa menjadi sebuah ancaman dan akan menjadi ancaman yang lebih besar bila takaran timbangan tersebut meningkat dengan jumlah yang besar.

Dalam hukum jual beli, hukum mengurangi timbangan dalam Islam termasuk dalam dosa besar atau sama dengan dosa orang yang melalaikan shalatnya. Allah akan membawa pelakunya ke neraka *Wayl (fawailul lil mushallin)*. Wailun atau Wayl adalah lembah jahannam dimana bukit-bukit apabila dimasukkan ke dalamnya langsung mencair karena amat panasnya.

Banyak fakta sejarah yang menjelaskan masalah kecurangan dalam timbangan ini adalah sesuatu yang dilarang agama, meskipun itu adalah proses akad jual beli. Assayid berkata bahwa turunnya ayat ini saat Nabi Muhammaad SAW hijrah ke Madinah, kemudian Nabi melihat Abu Juhainah yang memiliki dua alat timbangan yaitu timbangan membeli untuk menguntungkan dirinya dan timbangan menjual untuk merugikan pembelinya. Keterangan lainnya adalah dari Ikrimah berkata bahwa beliau bersaksi bahwa tukang timbang itu ada dalam neraka lalu seseorang menegur, "*anakmu juga tukang timbang*". Ikrimah mengatakan bahwa persaksilah dia pun akan juga berada dalam neraka. Masalah timbangan ini juga pernah disampaikan Ali r.a berkata bahwa janganlah meminta kebutuhanmu dari seseorang yang rezekinya berada di ujung takaran dan timbangan. Al-Syafi'i dari Malik bin Dinar juga memiliki penjelasan yang mengatakan kepada keluarganya "*Apa kelakuannya dulu?*" mereka menjawab "*Dia*

memiliki dua timbangan yaitu untuk menjual dan membeli, kemudian beliau menghancurkan keduanya,” dan berkata “Bagaimana keadaanmu sekarang?” ia menjawab “Tetap, bahkan sangat sukar” hingga ia meninggal dengan keadaan sakit itu. Bahkan dalam kisah yang lain, ada seseorang yang menghadiri orang yang akan meninggal, orang tersebut diajarkan agar membaca kalimat tayyibah, namun ia berkata “Saya tidak bisa membaca kalimat tersebut sebab jarum timbangan mengganjal lidah saya”, “Bukannya dulu Anda menepati timbangan?”, “Benar, tetapi saya tidak membersihkan kotoran yang terdapat pada takaran sehingga saya merugikan orang lain”

Kisah-kisah di atas adalah salah satu ancaman untuk orang yang berani mengurangi dan menambah berat timbangan dalam kegiatan jual beli. Hukum tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits:

Artinya: “Sempurnakan takaran dan jangan menjadi orang yang merugikan. Dan timbanglah menggunakan timbangan yang lurus.” (QS. Asy-Syu’ara 181-182)

Hadits yang riwayatkan oleh Ibnu Majah menyatakan:

Artinya: “Jika kamu menimbang harus ditepati” (HR. Ibnu Majah)

Lebih tegas lagi masalah kecurangan dalam timbangan ini terekam dalam QS al-Muthaffifin yaitu sebagai berikut:

Artinya: “Kecelakaan besar bagi orang yang curang. Yaitu orang yang menerima takaran, harus dipenuhi. Dan apabila mereka menakar, mereka akan mengurangi. Tidakkah orang-orang yakin mereka dibangkitakan pada hari yang besar yaitu hari saat manusia menghadap Rabb semesta alam” (QS. Al-Muthaffifin 1-6)

Allah SWT menafsirkan *muthaffifin* sebagai perilaku kecurangan. Kegiatan kecurangan tersebut seperti yang terkandung dalam ayat tersebut adalah, apabila orang tersebut menakar untuk diri sendiri, mereka meminta agar takarannya penuh bahkan meminta tambahan. Namun, apabila mereka menakarkan untuk orang lain,

mereka akan mengurangi takaran tersebut, baik dengan alat timbangan yang direkayasa atau dengan cara yang lain. Maka, hukum bagi orang yang melakukannya adalah siksaan neraka yang dahsyat yaitu neraka Jahannam.

Oleh karena itu, Islam telah memberikan perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Yaitu sebagaimana terekam dalam QS Arrahman ayat 9 Allah SWT berfirman: “Dan tegakkan timbangan dengan adil dan jangan kamu mengurangi neraca tersebut.” QS Al-An’am: ayat 152 yang artinya: “Dan sempurnakan takaran serta timbangan secara adil. Kami tidak akan memikulkan beban sesuai dengan kemampuannya. SQ Al-Isra’: ayat 35 yaitu: “Dan baikkan takaran saat menakar, timbangn menggunakan neraca. Sebab itu lebih utama dna lebih baik.” QS Hud ayat 84 – 86 yaitu:

Artinya: “Dan untuk penduduk Madyan. Kamu utus Syu’aib dan berkata, “Hai kaumku, sembahlah Allah sebab tiada Tuhan selain Dia. Dan jangan mengurangi takaran dan timbangan, aku melihat kamu mampu dan aku khawatir pada azab yang membinasakan.” Syu’aib berkata, “Hai kaumku, takar dan timbanglah dengan adil dan tidak merugikan hak mereka dan jangan melakukan kejahatan an kerusakan. Sisa keuntungan dari Allah jika akmu beriman. Dan aku bukan menjaga dirimu.”

Ada beberapa faktor seseorang melakukan tindakan kecurangan diantaranya karena kurangnya ilmu dan pengetahuan tata cara berniaga dan berdagang yang baik menurut Islam, serta tidak mendalami *fiqh buyu* atau hukum-hukum serta hikmah jual beli dalam muamalah Islam. Allah dan Rasul-Nya dengan tegas melarang kita untuk mengurangi timbangan sebab ini adalah perbuatan merugikan. Apabila fungsi iman kepada allah swt, rukun iman dan rukun islam kita perkuat, tentu hal seperti ini tidak akan terjadi. Jika mengurangi timbangan terus dilakukan, maka tidak ada lagi kepercayaan dan kejujuran dari para pembeli. Pembeli akan selalu merasa was-was membeli barang di pasar sebab ia merasa bahwa ia

harus membayar dengan jumlah yang sama, namun dengan jumlah timbangan yang dikurangi.

Oleh sebab itu, pebisnis dan pedagang muslim harus selalu memperhatikan timbangan dengan baik. Hindari mencari keuntungan dengan mengurangi takaran. Pebisnis muslim harus mengutamakan kejujuran dan mencari keuntungan dengan cara yang halal. Sehingga tak hanya keuntungan saja yang didapat, akan tetapi ketentraman dan keberkahan juga.

Seorang pebisnis muslim juga harus memperhatikan timbangan barang yang dibeli untuk menghindari kecurangan dan memajukan bisnis. Jadi, persoalan haram dalam dunia perbankan tidak cukup dilihat dari riba dan adanya tambahan, namun masih banyak aspek lain dalam meraup keuntungan dengan cara-cara yang dilarang seperti curang dalam timbangan. Prinsip kedzaliman dalam jual beli yang didalamnya terdapat kecurangan juga merupakan dosa besar yang dapat kita sejajarkan dengan masalah ribawi. Sikap berimbang dalam memahami masalah bunga bank konvensional menjadi persoalan yang wajib diadukan secara berimbang dengan mengungkapkan fakta secara menyeluruh akan membawa kita menjadi manusia yang memiliki jiwa tawazun.

c. **Prinsip Syura di Bidang Keuangan Islam**

Unsur paradigma *wasathiyah* selanjutnya adalah *Syura* (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Sikap bankir konvensional dalam memahami bunga bank hendaknya dibangun berdasarkan kesepakatan tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak. Tingkat persentase bunga tidak boleh mendhalimi salah satu pihak. Persentase harus dibangun berdasarkan musyawarah mufakat bukan berdasarkan kebijakan sepihak.

Dalam rumuan teoritik hermeneutika *double movement*, mengingatkan kita kembali kepada praktik muamalah Nabi Muhammad saw. Salah satunya adalah praktik jual beli, utang piutang. Nabi mengajarkan kepada kita untuk mendialogkan bagaimana jika terjadi ketidakmampuan dalam membayar cicilan. Sebagai solusi, ada tiga tahap dalam menyelesaikan masalah ketidakmampuan dalam menyelesaikan cicilan yang macet tersebut. Yaitu Nabi melakukan restrukturisasi akad dengan menurunkan cicilan semampu nasabah, selanjutnya jika tidak mampu maka diberikan waktu berlebih atau toleransi dalam waktu hingga nasabah sanggup melaksanakan kewajibannya. Dan jalan terakhir jika dua langkah tersebut tidak sanggup dilaksanakan maka langkah terakhir adalah mengikhlaskan seluruhnya dengan kata lain disedekahkan semuanya. Sebagaimana QS al-baqarah ayat 280. Penyelesaian permasalahan hutang piutang dalam Islam sebagai berikut: pertama, menghapuskan hutang bagi yang tidak mampu melunasinya. Apabila orang yang berpiutang mendapati seseorang yang memang tidak mampu membayar utangnya, hendaknya ia memaafkannya, merelakan haknya, dan membebaskannya dari utangnya (Qs. al-Baqarah [2]: 280). Qs. al-Baqarah [2]: 280 merupakan ayat motivator yang sangat kuat agar seseorang yang berpiutang memaafkan dan menanggung lunas utang orang yang tidak mampu melunasinya. Kedua, memberi tenggang waktu bagi orang yang kesulitan, Qs. al- Baqarah [2]: 280. Ayat ini menjelaskan apabila ada seseorang kesulitan mengenai utang, jalannya adalah dengan memberikan tangguh sampai seseorang yang berutang mendapatkan kemudahan membayarnya. Serta dianjurkan oleh masyarakat muslim untuk tidak boleh membiarkan seseorang dalam kesulitan menanggung utang tersebut. Allah menyerukan kepada pemberi utang agar bersedekah dengan piutangnya jika ia mau melakukan kebaikan ini dengan suka rela.¹³⁹

¹³⁹Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilali Qur'an di Bawah Naungan Al-quran*, Gema Insani,

Berdasarkan ayat di atas, tampak begitu nyata bahwa semangat musyawarah antara nasabah dengan bankir begitu dekat. Semangat musyawarah mencapai mufakat dalam berbagai tahap-tahap tersebut menunjukkan bahwa dialog terbuka dan jujur menjadi kunci penyelesaian yang baik dalam menghadapi masalah keuangan. Meski demikian, dalam praktiknya baik di bank konvensional maupun di bank Syariah, nilai-nilai musyawarah dalam berbagai tahap termasuk mengikhlaskan seluruh asset utang kepada nasabah tidak pernah terjadi dalam dunia kontemporer ini.

d. Prinsip *Aulawiyah* di Bidang Keuangan Islam

Unsur selanjutnya yang dapat mengukur sikap moderat adalah unsur *aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah. Bankir seyogyanya menjadikan unsur *aulawiyah* sebagai basis program yang menyejahterakan umat. Melalui unsur *aulawiyah*, bankir akan memfokuskan pada semangat identifikasi dan menolong UMKM yang produktif, masyarakat fakir miskin yang sehat dan produktif, serta mengembangkan CSR bank yang tepat sasaran.

e. Prinsip *Tahadhdhur* di Bidang Keuangan Islam

Unsur dalam paradigma *wasathiyah* yang paling urgent adalah unsur *tahadhdhur*. *Tahadhdhur* (berkeadaban), yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, dan integritas sebagai *khairu ummah* dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban.¹⁴⁰ Melalui unsur ini, bankir tidak akan terjebak dengan istilah kata bunga dan keuntungan. Jika ada kata bunga maka dipastikan itu adalah haram secara mutlak dan final, sedangkan jika berhadapan dengan istilah

Jakarta, 2000. h. 371.

¹⁴⁰ Afrizal Nur dan Mukhlis, *Konsep Wasathiyah dalam Alquran: (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir wa At-Tanwir dan Aisar At-Tafasir)*, Jurnal An-Nur, Vol. 4, No. 2, 2015, h. 212-213.

keuntungan atau margeen, fee dan jasa pasti adalah sebuah transaksi yang halal.

Bankir yang memiliki jiwa *thahadhdhur*, tidak akan terjebak dengan istilah kredit dengan pembiayaan. Jika ada istilah kredit dipastikan tanpa melalui akad Syariah yang halal, sementara jika bertemu dengan kalimat pembiayaan dipastikan bebas dari praktik riba.

Bankir yang *tahadhdhur*, tidak akan terjebak dengan performace dan fashion, yang dibank konvensional tidak atau jarang terdengar kata *assalamualaikum warahmatullah wa barakatuh*, sementara di bank syariah sering terdengar kata salam tersebut. Bankir yang berkeadaban tidak akan terjebak dengan aqad semata, dan bankir tidak akan terjebak dengan *casing syariah* an sich. Bankir yang moderat akan memfokuskan semangat pengabdianya untuk kembali kepada tujuan utama niat dari penyalur modal yaitu untuk kepentingan bisnis dan sosial secara berimbang.

Jika diamati dalam praktek keuangan, pinjaman dari pihak bank, baik konvensional maupun syariah adalah diberikan untuk yang bersifat produktif dan bukan konsumtif, sehingga hal ini berbeda semasa dizaman Rasulullah orang yang meminjam uang adalah untuk konsumtif sehingga banyak mendatangkan kemudharatan. Bahasan mengenai bunga dan riba pun masih terjadi Ikhtilaf ijtihadiyyah diantara ulama. Namun jika ditinjau dari perspektif pelaksanaan keduanya memang memiliki nilai positif dan negatif. Disinilah prinsip *wasathiyyah* hadir dalam rangka pengembangan fikih yang toleran di bidang keuangan dan perbankan.

Bank yang menerapkan sistem akad pinjaman menjadi haram jika dikaitkan dengan bunga pada proses pengembalian dana namun dari segi keadilan bunga bank konvensional memiliki nilai keadilan. Hal ini karena bunga bank konvensional jauh lebih ringan dari bank syariah. Bank Syariah dalam praktiknya menerapkan akad jual-beli

sebagaimana dalam kandungan Al-Qur'an Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sehingga dari perspektif akad bank syariah sudah terhindar dari Riba. Akan tetapi, masih ada kekeliruan dalam pengembalian dana tersebut dimana bank syariah tidak mempertimbangkan keadilan kepada debitur. Berupa pengembalian yang jauh lebih besar dari bank konvensional. Oleh sebab itu, dalam hal ini perlu dilakukan reinterpretasi esensi makna bunga bank yang sebenarnya. Ketiga, dalam hal ini bertujuan untuk membangun fikih yang toleran. Hal ini memunculkan suatu paradigma konsep yang seharusnya dimunculkan dalam dunia perbankan dan keuangan dengan menciptakan konsep perbankan dengan menggunakan akad syariah jual-beli dan menggunakan bunga yang kecil untuk menjaga nilai-nilai keadilan di dalamnya. Sehingga membentuk suatu titik tengah sebagai Islam yang moderat mengacu kepada *maqashid syariah* dalam ekonomi Islam. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir sikap ekstrim dari para pegawai bank konvensional dan mengurungkan sikap merasa benar dari pegawai bank syariah. Sikap moderat perlu diperjuangkan untuk lahirnya umat terbaik (*khairu ummah*).

4. Konstruksi Baru Fikih *Wasathiyah Iqtishadiyah* dan Fikih *Wasathiyah Maliyah*

Berdasarkan analisis tentang typologi bankir dalam memahami dan merespons hukum bunga bank, maka pengembangan fikih mu'amalah dimasa depan seyogyanya dapat dipertajam lebih dalam pada dimensi *wasathiyah*. Dinamika ini berdasarkan pada adanya perubahan 'illat, situasi, dan kondisi dalam konstruksi sosial masyarakat.

Untuk mengembangkan fikih *wasathiyah iqtishadiyah* dan fikih *wasathiyah maliyah*, ada 3 dimensi *wasathiyah* yang harus dibangun, yaitu dimensi *fiqrah* (pemikiran), dimensi *harakah* (gerakan), dimensi *amaliyah* (implementasi perilaku).

Dimensi *fiqrah* (pemikiran) dalam pembangunan konsep fikih *wasathiyah iqtishadiyah* dan *maliyah* meliputi pengembangan dasar hukum *naqliyah*, pengembangan dasar hukum *'aqliyah*, dan pengembangan dasar hukum *waqi'iyah*. Pengembangan dasar hukum *naqliyah*, dalam membangun fikih *maliyah* yang moderat harus didukung dengan ayat-ayat Al-quran atau hadith-hadith yang moderat, seperti QS. Al-Baqarah: ayat 143: Artinya: “Dan yang demikian itu Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) sebagai *umatan wasatha* (umat pertengahan) agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kalian.

Secara Bahasa, kata *wasathiyah* berasal dari kata *wasatha* (وَسْطًا) yang berarti adil atau sesuatu yang berada di pertengahan. Pengertian ini diungkapkan oleh Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayisil Lughah (6/74). Sementara itu, jumhur ulama lain menambahkan bahwa makna *wasath* juga berarti pilihan (*al-khiyar*) atau yang paling utama (*afdhal*).

Dalam kitab tafsirnya, Imam at-Tabari mengartikan makna *wasatha* adalah *'udulan* (umat yang adil) dan *khiyar* (pilihan). Makna yang sama juga ungkapkan oleh Ibnu Katsir, yang dimaksud Qs. Al-Baqarah ayat 143 adalah pilihan dan yang terbaik (tafsir al-Qurthubi, 2/144, dan tafsir Ibnu katsir, 1/455). Ibnu Jarir At-thabari menjelaskan, *al-wasthu* bermakna adil dan juga bisa bermakna pilihan. Sebab, orang yang terpilih di antara manusia adalah yang paling adil di antara mereka. (Tafsir At-Tabari, 3/143)

Al-Baghawi dalam tafsirnya, menukil dari Al-Kalbi sesungguhnya dia berkata, “maksud dari “umat pertengahan” adalah pengikut agama yang adil antara berlebih-lebihan dalam beribadah dan teledor dalam menjalankan syariat agama, yang kedua sifat ini amat dicela dalam agama.

Sementara itu, dalam Tafsir Al-Karim Al-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan, Imam As-Sa'di menjelaskan tentang umat pertengahan yaitu, umat yang memiliki sifat adil dan umat yang terbaik. Sebab, bila tidak ada di pertengahan rentan mengarah kepada bahaya. Sehingga Allah menjadikan umat ini umat yang senantiasa mengambil jalan tengah di setiap permasalahan agama. Mereka berada di pertengahan antara kaum yang berlebih-lebihan dalam beragama sebagaimana kaum Nashrani, dan mereka yang berperangai kasar sebagaimana bangsa yahudi, beriman terhadap apa pun yang datang dari-Nya, tidak membangkang sebagaimana orang Yahudi, dan tidak pula meremehkan sebagaimana orang Nashrani.

Maka dapat disimpulkan bahwa kata *wasatha* mengandung dua sifat utama yang tidak bisa lepas darinya, yaitu: '*udulan* (adil), tidak condong ke salah satu dua kutub ekstrim yang berbeda dan khiyar (pilihan, terbaik). Maka ketika disebut *ummatan wasatha* maknanya adalah umat yang adil dalam bersikap sehingga dipilih sebagai umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri Ra dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Artinya: "Nabi Nuh As dipanggil pada hari kiamat, dikatakan kepada beliau: Apakah engkau telah menyampaikan Riasalahmu? Beliau menjawab: Iya sudah; lalu dipanggillah kaumnya dan ditanyakan kepada mereka: Apakah dia telah menyampaikan risalahnya pada kalian? Kemudian kaumnya menjawab: Tidak ada seorang pun yang datang menyeru kepada kami. Lalu dikatakan kepada Nabi Nuh: Siapa yang bersaksi untukmu? Nuh menjawab: Muhammad dan umatnya, Rasulullah bersabda: Maka yang demikian itu Firman Allah: Dan yang demikian itu Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) sebagai umat pertengahan. Yang dimaksud umat pertengahan adalah keadilan. (HR. Bukhari)

Berdasarkan dalil *naqliyah* diatas, maka pengembangan fikih moderat dibidang mu'malah seyogyanya mengedepankan cara-cara berfikir yang adil, dan berimbang, tidak berat sebelah, dan proporsional. Cara berfikir moderat dalam lalu lintas operasional system keuangan islam menempatkan posisi adil yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya yaitu dengan meletakkan ide pemikiran fikih yang meletakkan posisi bunga yang tidak berlipat dan dzalim serta *margeen/fee* yang tidak berlebihan sebagai sesuatu yang baik, dan mengambil jalan tengah di antara bunga dan *margeen/fee* adalah yang jauh lebih baik.

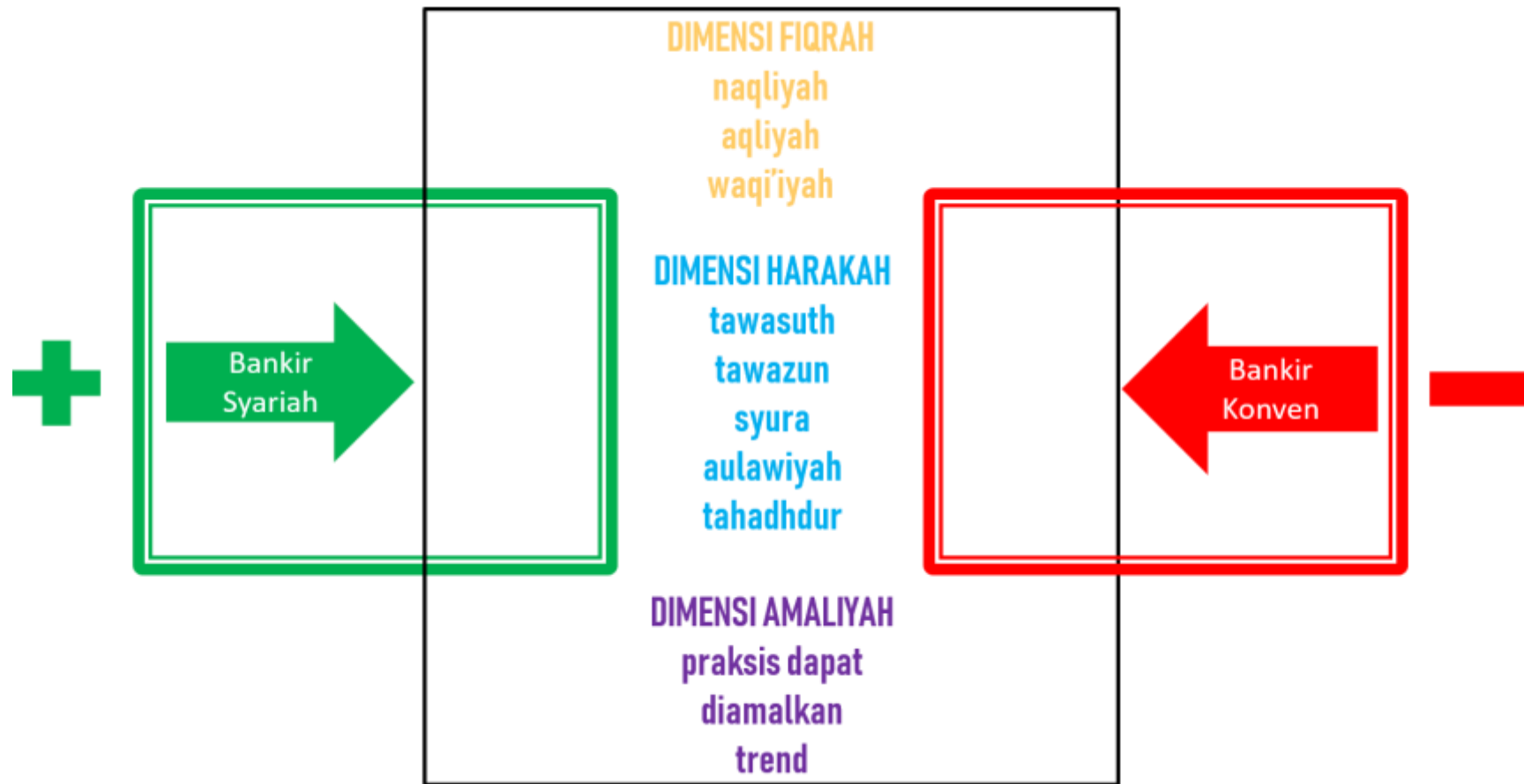
Adapun pengembangan dasar hukum *aqliyah* dalam membangun fikih moderat dibidang muamalah yaitu dengan mengembangkan bunga dan riba serta *margeen/fee* sebagai realitas produk *ijtihad* di era kontemporer. Bunga dan *margeen/fee* sebagai realitas *ijtihad* dibangun berdasarkan prinsip bahwa semua hukum asal dalam bidang mu'amalah adalah boleh. Selanjutnya adalah pengembangan logika hukum bunga dan *margeen/fee* harus mengedepankan semangat kemaslahatan *li mashalihil 'am* yaitu dengan tetap pembatasan dan larangan *margeen/fee* dan bunga pada tingkat dzalim, berlebihan dan berlipat ganda, serta mengembangkan CSR bagi kemaslahatan umat. Tidak hanya itu, keharaman bunga dan kelebihan mengambil keuntungan hanya salah satu aspek *rate* dalam dunia ekonomi dan keuangan. Seyogyanya, pemikiran moderat harus dikembangkan pada sisi etika dan akhlak dari sisi budaya atau *culture* bankir dan praktisi keuangan.

Sementara itu untuk mengembangkan dasar hukum *waqi'iyah* dalam membangun fikih *wasathiyah iqtishadiyah* dan *maliyah*, adalah dengan memikirkan kembali bahwa fenomena bunga bank dan *margeen/fee* adalah dinamika *waqi'iyah*, oleh sebab itu diperlukan *ijtihad* segar yang maslahat dan sesuai dengan situasi saat ini.

Adapun dimensi *harakah* (gerakan) dalam pengembangan konsep fikih *wasathiyah iqtishadiyah* dan *maliyah* meliputi pengembangan 5 prinsip moderasi islam yaitu prinsip *tawassuth*, *tawazun*, *syura*, *aulawiyah*, *tahadhdhur*.

Adapun dimensi ‘*amaliyah* (implementasi perilaku) dalam pengembangan konsep fikih *wasathiyah iqtishadiyah* dan *maliyah* meliputi implementasi teoritik tentang ekonomi dan keuangan islam yang memungkinkan dapat dilaksanakan oleh umat, dan *trend* konsep atau *trend* model system ekonomi dan keuangan yang sedang menjadi arus besar segmentasi pasar. Pada level praksis ini, menjadi sebuah keniscayaan, sebab apapun alasan dan landasannya, kedua jenis perbankan (baik bank syariah maupun bank konvensional) dan kedua bankir sama-sama berada dalam naungan sebuah system yaitu berbadan hukum perusahaan.

Konstruksi baru pengembangan fikih mu’amalah dalam pengembangan fikih moderat dibidang ekonomi dan perbankan, secara detil dapat diuraikan dalam bagan dibawah ini:



Bagan Bankir Moderat / Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah / Maliyah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa temuan sebagai berikut:

1. Persepsi bankir terhadap hukum bunga bank di perbankan ditandai dengan munculnya kegelisahan pegawai bank konvensional salah satunya disebabkan pemahaman mereka bahwa tafsir makna tentang bank dengan sistem bunga merupakan perbuatan riba dan riba hukumnya haram. Adanya sikap ekstrimisme terlihat seperti berhenti bekerja secara mendadak, menghilang tanpa alasan apapun, merubah pola sikap mulai cara berpakaian, mudah mengharamkan sesuatu, dan akhirnya berhenti bekerja di bank konvensional. Sementara para pegawai yang bekerja di bank syariah menganggap bahwa makna margin, fee, *ujrah*, *ta'widh* dan istilah lain dalam mengambil keuntungan yang dipraktikkan bank syariah telah bebas dari praktik riba, *maysir*, *gharar* dan lain-lain. Berdasarkan persepsi tersebut maka sikap bankir dalam memahami bunga bank terbentuk menjadi 3 tipe yaitu, tipe bankir pragmatis, tipe bankir realis-modernis, dan tipe bankir idealis.
2. Untuk membangun paradigma toleransi terhadap sikap-sikap tersebut, maka diperlukan fikih mu'amalah yang toleran, dan moderat (*fikih wasathiyah*) yaitu dengan melakukan reinterpretasi makna dan konteks bunga tidak identik dengan riba, dan mengembangkan dua nilai dasar tentang harta yaitu halal dalam mencarinya dan dermawan dalam membelanjakannya, serta benar dalam aqadnya dan mengembalikan nilai pemerataan dan keadilan ekonomi sebagai tujuan akhirnya (*maqashid al-syariah al-iqtishadiyah*). Sebagai langkah epistemologis, konsep fikih *wasathiyah* dalam dunia muamalah, yaitu dengan melakukan internalisasi nilai-nilai *wasathiyah* yaitu nilai-nilai *Tawassuth* (mengambil jalan tengah), *Tawazun* (berkeseimbangan), *Tasamuh* (toleransi), *Syura*

(musyawarah), *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), dan *Tahadhdhur* (berkeadaban).

B. Saran

Berdasarkan hasil riset di atas, maka saran-saran dalam riset ini ditujukan kepada:

1. BI dan OJK dan MUI agar terus memberikan edukasi literasi keuangan Syariah yang moderat dalam pengembangan keuangan Syariah di manapun berada, agar nilai-nilai toleransi dalam menyentuh system muamalah yang maju dimasa yang akan datang.
2. Kepada seluruh bankir konvensional, agar terus membangun semangat kinerja yang profesional, adil, jujur dan niat yang tulus dalam mengabdikan kepada masyarakat dan bangsa, tidak perlu risau dan ragu dalam bekerja.
3. Kepada bankir Syariah, agar terus mengedepankan prinsip secara utuh, karena bankir Syariah adalah lokomotif manusia pilihan dalam membantu mengembangkan dana masyarakat untuk kepentingan agama dan social secara berimbang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hadi, Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*, alih bahasa M. Tholib, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, halaman 503-504.
- Al Arif, M. Nur Rianto. "Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis." (2012).
- Ali Ahmad Mar'i, *Buhus fi Fiqhil Mu'amalat*, Kairo: Al-Azhar Press, halaman 134-158; Asmaul Ulama al-ladzina Ajazu Fawaidal Bunuk; *Fatwa Majma' Buhuts al-Islam bi Ibahati Fawaidil Masharif*.
- Anif Punto Utomo, KH Ma'ruf Amin Penggerak Umat Pengayom Bangsa. Sinergi Aksara, 2018
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani, 2001.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 Tahun 2008)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag. RI, 2010.
- Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Bably, Muhammad Mahmud, *Kedudukan Harta menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.

- Badriyah, Siti Malikhatun, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas persoalan keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, Bandung, Mizan, 1996.
- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Budiono, Abdul Rachmad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Chapra, M. Umer, *Alquran Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Terjemahan Lukman Hakim, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Dakhoir, Ahmad, *Hukum Syariah Compliance di Perbankan Syariah*, Yogyakarta: K-Media, 2017.
- Fazlur Rahman, *Islam And Modernity: Transformation Of An Intellectual Tradition*, Chicago And London: The University Of Chicago Press, 1982,
- Hajar M. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Hamid, M. Arifin, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Sosio-Yuridis*, Jakarta:eLSAS, 2007.
- Huda, Nurul, and Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana, 2010. H. 70.
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Sejarah-Filsafat & Metode Tafsir*, Malang: UB Press, 2011.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Logika Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Kamil, Ahmad, dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Kara, Muslimin H., *Bank Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- M., Hajar, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mohamed Imran Mohamed Taib, *Fazlur Rahman (1919-1998): Perintis Tafsir Konstektual*, Singapore: The Reading Group, 2007.

- Muhammad, *Geliat-geliat pemikiran ekonomi Islam*, Yogyakarta: Aditya media publishing, 2010.
- Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Terj. Aswin Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, 1994. Cet. 2.
- Muzdhar, M. Atho, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Budhy Munawar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Nafis, M. Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI-Press, 2011.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, pener: M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Nawawi, Rif'at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: kajian masalah Akidah dan Ibadat*, Jakarta: Paramedina, 2002.
- P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Parmudi, Muchammad, *Sejarah & Doktrin Bank Islam*, Yogyakarta: Kutub, 2005.
- Pelu, Ibnu Elmi A.S., dkk, *Reaktualisasi Cita Hukum dalam Pembangunan Hukum*, Malang: in-TRANS, 2007.
- Pelu, Ibnu Elmi A.S., *Gagasan, Tatahanan & Penerapan Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Politik Hukum*, Malang: Setara Press, 2008.
- Perwataatmaja, Karnaen, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Qutub, Sayyid, *Dasar-dasar Sistem Ekonomi Sosial dalam Kitab Tafsir Fi zhilalil Qur'an*. Terj. Muhammad Abbas Aula, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1994.

- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasjidi, Lili, dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest*, Leden-New York Koln: E.J. Brill, 1996.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, diterjemahkan dari buku asli berjudul "Islamic Banking and Interest: A Study of Riba And Its Contemporary Interpretation oleh Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2006.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, diterjemahkan dari buku asli berjudul "Islamic Banking and Interest: A Study of Riba And Its Contemporary Interpretation oleh Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2006.
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998.
- Sidharta, B. Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Suma, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sumitro, Warkom, *Asas-asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui: Etika Pancasila*, Yogyakarta: PT. Hanindita, 1985.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Suyatno, Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, Cet. 5.
- Syarifudin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

- Taufik Hidayat, S. E., and M. Si. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Mediakita, 2011.
- Yusuf Qaradhawi, *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*, Kairo: Dar al-Shahwah, halaman 5-11; Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga).
- Thomson, *Dictionary Banking*. London: The New Publishing co..ltd. Ed. Ke II.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.
- Yasin, M. Nur, *Hukum Ekonomi Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Jad al-Haq, *Buhuts wa Fatawa Islamiyah fi Qadhaya Mu'ashirah* (jilid II, hlm 746).
- Qoriah, Imroatul. *Analisis Terhadap Pertimbangan dan Dasar Hukum Hasil Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Mengenai Keharaman Bunga Bank*. Diss. Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Salam, Abdul. "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 3.1 (2016): 77-108.
- Zainul Arifin, M. B. A. *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Pustaka Alvabet, 2012.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- ‘Amarah, Muhammad, *Al-A'mal al-Kamilah li alImam Muhammad Abduh*, op. cit., Jilid. IV.
- Aminadin, Encang, and Khoirussoleh Al Bahri. "Penerapan Hukum Islam Terhadap Proses Transaksi di Perbankan Syari'ah." *AL MUNAZHZHARAH* 1.1 (2017): 56-75.
- Abdad, M. Zaini, *Analisis dan Pemetaan Pemikiran Fikih Moderat di Timur Tengah dan Relasinya dengan Gerakan Fikih Formalis*, Jurnal Esensia, Vol. XII, No. 1, Januari 2011.
- Amar, Abu. "Pendidikan Islam Wasathiyah ke-Indonesia-an." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 2.1 (2018): 18-37.
- Azra, Azyumardi, *Islam Indonesia Inklusif Vs Eksklusif: Dinamika Keberagaman Umat Muslimin*, Makalah Makalah untuk Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta 6 Juni 2017.

- Bangsawan, Moh. Indra, *Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia)*, Jurnal Law and Justice Vol. 2, No. 1 April 2017.
- Bank Indonesia, *Sistem Perbankan dan Peranan Perbankan, dan Dampaknya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi, makalah dalam lokakarya bunga bank dan perbankan*, Bogor, tahun. 1990
- Fahriyyah, Asma Nur Lailal. *Bunga bank dalam perspektif DR. KH MA Sahal Mahfudh*. Diss. UIN Walisongo, 2018.
- Hasyim, Muhammad Syarif, *Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*, Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 1, April 2008.
- Hasyim, Muhammad Syarif, *Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*, Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 1, April 2008.
- Himim, Abdul, *“Menimbang Paradigma Kontemporer Metode Pemikiran Hukum Islam”* Makalah, 2004.
- Kalsum, Ummi, *Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)*, Jurnal Al-‘Adl Vol. 7, No. 2, Juli 2014.
- Kalsum, Ummi, *Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)*, Jurnal Al-‘Adl Vol. 7, No. 2, Juli 2014.
- Langputeh, Syukree & Depi Fitriani. "Implementasi Pendidikan Perdamaian (Peace Education) Dalam Rangka Transformasi Konflik Di Thailand Selatan." (2017).
- Marwini, *Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Jurnal Az Zarka’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017.
- Mujib, Abdul, *Realitas Sistem Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2, No. 1, 2017.
- Nur, Afrizal, dan Mukhlis, *Konsep Wasathiyah dalam Alquran: (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir wa At-Tanwir dan Aisar At-Tafasir)*, Jurnal An-Nur, Vol. 4, No. 2, 2015.
- Salam, Abdul, *Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)*, Dosen Ekonomi Syariah STIA Alma Ata Yogyakarta. Dalam Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. III, No. 1 Juni 2013.

Sehani, *Analisis Persepsi dan Preferensi Masyarakat Pesantren Terhadap Bank Syariah (Studi pada Masyarakat Pesantren di Kota Pekanbaru)*, Jurnal Al-Iqtishad, Edisi 13 Vol. 1 tahun 2017.

Sutjipto, Hady. "TEORI BUNGA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU." *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 1.1 (2017). H. 82.

Yusuf, Muhammad Yasir, *Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama*, Jurnal Media Syariah, Vol. XIV, No. 2, Juli-Desember 2012.

C. Websites

Bayu Imantoro, "hukum riba dan bunga bank antara pendapat yang mengharamkan dan membolehkan-serta-solusi berpegang pada pendapat jumhur ulama" dalam <https://www.kompasiana.com/bayuimantoro/54fff46ca3331152635100d2/hukum-riba-dan-bunga-bank-antara-pendapat-yang-mengharamkan-dan-membolehkan-serta-solusi-berpegang-pada-pendapat-jumhur-ulama>

<https://www.antaranews.com/berita/722751/perry-ekonomi-syariah-kurangi-gangguan-nilai-tukar>.

<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/06/30/pb3syk377-perry-ekonomi-syariah-kurangi-gangguan-nilai-tukar>

Husnul Haq, "Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bunga Bank" dalam <https://islam.nu.or.id/post/read/92420/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank>.

Quraish Shihab, "Soal riba: Gaji karyawan bank tidak halal," dalam <https://makassar.tribunnews.com/2015/06/12/soal-riba-gaji-karyawan-bank-tidak-halal-ini-kata-quraish-shihab?page=2>.

Rifka Abadi, "pegawai bank merupakan pemakan riba dan fasik benarkah?," dalam <https://www.kompasiana.com/rifkadejavu/55920c8baa23bd482aaa2299/pegawai-bank-merupakan-pemakan-riba-dan-fasik-benarkah?page=all>

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. PALANGKARAYA 73000

109320229

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 14-12-2019 12:38:34
No.Resi : 73000-05/2019/813303 Petugas : 992486580

Tanggal Buku : 16-12-2019
Kode Cabang Pos : 073000

NTP : 942827753842
NTPN : C77942LPSOH2STIR
STAN : 753842

Kode Billing : 019122064389723
NPWP : 001418797711000
Nama : BENDAHARA INSTITUT AGAMA ISLAM
Alamat : JALAN G.OBOS/KOMP.ISLAMIC CENTR,KOTA PALANGKA RAYA
Akun : 411124
Jenis Setoran : 100
Masa Pajak : 12122019
No SK : 0000000000000000
NDP :
Jumlah Setoran : Rp. 511.291 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Lima ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. PALANGKARAYA 73000

109320230

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 14-12-2019 12:38:35
No.Resi : 73000-05/2019/813304 Petugas : 992486580

Tanggal Buku : 16-12-2019
Kode Cabang Pos : 073000

NTP : 942828753843
NTPN : 1DCBF317ER3FCS9Q
STAN : 753843

Kode Billing : 019122064486714
NPWP : 001418797711000
Nama : BENDAHARA INSTITUT AGAMA ISLAM
Alamat : JALAN G.OBOS/KOMP.ISLAMIC CENTR,KOTA PALANGKA RAYA
Akun : 411121
Jenis Setoran : 402
Masa Pajak : 12122019
No SK : 0000000000000000
NDP :
Jumlah Setoran : Rp. 22.500 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. PALANGKARAYA 73000

109320217

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 14-12-2019 12:38:29

No.Resi : 73000-05/2019/813291 Petugas : 992486580

Tanggal Buku : 16-12-2019
Kode Cabang Pos : 073000

NTP : 942810753829
NTPN : 657E45B2B6600MTE
STAN : 753829

Kode Billing : 019122014814126
NPWP : 001418797711000
Nama : BENDAHARA INSTITUT AGAMA ISLAM
Alamat : JALAN G.OBOS/KOMP.ISLAMIC CENTR,KOTA PALANGKA RAYA
Akun : 411211
Jenis Setoran : 910
Masa Pajak : 12122019
No SK : 0000000000000000
NOP :
Jumlah Setoran : Rp. 96.364 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. PALANGKARAYA 73000

109320218

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 14-12-2019 12:38:29

No.Resi : 73000-05/2019/813292 Petugas : 992486580

Tanggal Buku : 16-12-2019
Kode Cabang Pos : 073000

NTP : 942811753830
NTPN : BA6364EKLKCDTR7
STAN : 753830

Kode Billing : 019122015172455
NPWP : 001418797711000
Nama : BENDAHARA INSTITUT AGAMA ISLAM
Alamat : JALAN G.OBOS/KOMP.ISLAMIC CENTR,KOTA PALANGKA RAYA
Akun : 411211
Jenis Setoran : 910
Masa Pajak : 12122019
No SK : 0000000000000000
NOP :
Jumlah Setoran : Rp. 103.818 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

109320223

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. PALANGKARAYA 73000

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 14-12-2019 12:38:33

No.Resi : 73000-05/2019/813277

Petugas : 992486580

Tanggal Buku : 14-12-2019

Kode Cabang Pos : 073000

NTP : 94281775333

NTPN : EB04331782240AI

STAH : 753335

Kode Billing : 019122017023314

NTPN : 001418777711000

Nama : BEMBAWA INSTITUT AGAMA ISLAM

Alamat : JALAN G.GEOS/KOMP. ISLAMIC CENTR, KOTA PALANGKARAYA

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122019

No SK : 0000000000000000

NTP :

Jumlah Setoran : Rp. 181.818 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>



109320224

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. PALANGKARAYA 73000

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 14-12-2019 12:38:33

No.Resi : 73000-05/2019/813278

Petugas : 992486580

Tanggal Buku : 14-12-2019

Kode Cabang Pos : 073000

NTP : 94282075333

NTPN : 334FFB040W88MTH

STAH : 753336

Kode Billing : 019122059074129

NTPN : 001418777711000

Nama : BEMBAWA INSTITUT AGAMA ISLAM

Alamat : JALAN G.GEOS/KOMP. ISLAMIC CENTR, KOTA PALANGKARAYA

Akun : 411122

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122019

No SK : 0000000000000000

NTP :

Jumlah Setoran : Rp. 54.545 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. PALANGKARAYA 73000

109320225

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 14-12-2019 12:38:33
No.Resi : 73000-05/2019/813299 Petugas : 992486580

Tanggal Buku : 16-12-2019 NTP : 942821753837
Kode Cabang Pos : 073000 NTPN : 2424A1PCC5ULI4KO
STAN : 753837

Kode Billing : 019122063413912
NPWP : 001418797711000
Nama : BENDAHARA INSTITUT AGAMA ISLAM
Alamat : JALAN G.OBOS/KOMP.ISLAMIC CENTR,KOTA PALANGKA RAYA
Akun : 411211
Jenis Setoran : 910
Masa Pajak : 12122019
No SK : 0000000000000000
NDP :

Jumlah Setoran : Rp. 239.636 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. PALANGKARAYA 73000

109320226

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 14-12-2019 12:38:34
No.Resi : 73000-05/2019/813300 Petugas : 992486580

Tanggal Buku : 16-12-2019 NTP : 942822753838
Kode Cabang Pos : 073000 NTPN : F86335B2B687000E
STAN : 753838

Kode Billing : 019122063633166
NPWP : 001418797711000
Nama : BENDAHARA INSTITUT AGAMA ISLAM
Alamat : JALAN G.OBOS/KOMP.ISLAMIC CENTR,KOTA PALANGKA RAYA
Akun : 411122
Jenis Setoran : 100
Masa Pajak : 12122019
No SK : 0000000000000000
NDP :

Jumlah Setoran : Rp. 71.891 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

109320227

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. PALANGKARAYA 73000

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 14-12-2019 12:38:34
No.Resi : 73000-05/2019/813301 Petugas : 992486580

Tanggal Buku : 16-12-2019 NTP : 942824753839
Kode Cabang Pos : 073000 NTFN : 161D20SUSBC9KMB
STAN : 753839

Kode Billing : 019122063933131
NPWP : 001418797711000
Nama : BENDAHARA INSTITUT AGAMA ISLAM
Alamat : JALAN G.OBOS/KOMP.ISLAMIC CENTR,KOTA PALANGKA RAYA
Akun : 411124
Jenis Setoran : 104
Masa Pajak : 12122019
No SK : 0000000000000000
NOP :
Jumlah Setoran : Rp. 98.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. PALANGKARAYA 73000

109320228

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 14-12-2019 12:38:34
No.Resi : 73000-05/2019/813302 Petugas : 992486580

Tanggal Buku : 16-12-2019 NTP : 942825753840
Kode Cabang Pos : 073000 NTFN : 841710SUSBC9UPLH
STAN : 753840

Kode Billing : 019122064254641
NPWP : 001418797711000
Nama : BENDAHARA INSTITUT AGAMA ISLAM
Alamat : JALAN G.OBOS/KOMP.ISLAMIC CENTR,KOTA PALANGKA RAYA
Akun : 411211
Jenis Setoran : 910
Masa Pajak : 12122019
No SK : 0000000000000000
NOP :
Jumlah Setoran : Rp. 1.278.227 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)

KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. PALANGKARAYA 73000

109320231

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 14-12-2019 12:38:35
No.Resi : 73000-05/2019/813305 Petugas : 992486500

Tanggal Buku : 16-12-2019
Kode Cabang Pos : 073000
NTP : 942009753044
NTPN : F12213170001001
STAN : 753044

Kode Billing : 019122064674414
NPNP : 001418797711000
Nama : BENIHARA INSTITUT AGAMA ISLAM
Alamat : JALAN G.ORBOS/KOMP. ISLAMIC CENTR, KOTA PALANGKA RAYA
Akun : 411121
Jenis Setoran : 402
Masa Pajak : 12122019
No SK : 0000000000000000
NDP :
Jumlah Setoran : Rp. 127.500 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. PALANGKARAYA 73000

109320232

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 14-12-2019 12:38:35
No.Resi : 73000-05/2019/813306 Petugas : 992486500

Tanggal Buku : 16-12-2019
Kode Cabang Pos : 073000
NTP : 942009753045
NTPN : 9420000000000000
STAN : 753045

Kode Billing : 019122064751171
NPNP : 001418797711000
Nama : BENIHARA INSTITUT AGAMA ISLAM
Alamat : JALAN G.ORBOS/KOMP. ISLAMIC CENTR, KOTA PALANGKA RAYA
Akun : 411121
Jenis Setoran : 402
Masa Pajak : 12122019
No SK : 0000000000000000
NDP :
Jumlah Setoran : Rp. 22.500 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. PALANGKARAYA 73000

109320221

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 14-12-2019 12:38:29

No.Resi : 73000-05/2019/813295 Petugas : 992486580

Tanggal Buku : 16-12-2019
Kode Cabang Pos : 073000

NTP : 942815753833
NTPN : EAEBB0SUSBAS012H
STAN : 753833

Kode Billing : 019122016077911

NPWP : 001418797711000

Nama : BENDAHARA INSTITUT AGAMA ISLAM

Alamat : JALAN G.OBOS/KOMP.ISLAMIC CENTR,KOTA PALANGKA RAYA

Akun : 411122

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122019

No SK : 0000000000000000

NOP :

Jumlah Setoran : Rp. 114.545 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus empat belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. PALANGKARAYA 73000

109320222

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 14-12-2019 12:38:30

No.Resi : 73000-05/2019/813296 Petugas : 992486580

Tanggal Buku : 16-12-2019
Kode Cabang Pos : 073000

NTP : 942816753834
NTPN : 548774EKRLKE/DCF
STAN : 753834

Kode Billing : 019122016695695

NPWP : 001418797711000

Nama : BENDAHARA INSTITUT AGAMA ISLAM

Alamat : JALAN G.OBOS/KOMP.ISLAMIC CENTR,KOTA PALANGKA RAYA

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122019

No SK : 0000000000000000

NOP :

Jumlah Setoran : Rp. 109.091 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. PALANGKARAYA 73000

109320219

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 14-12-2019 12:38:29
No.Resi : 73000-05/2019/813293 Petugas : 992486580

Tanggal Buku : 16-12-2019
Kode Cabang Pos : 073000

NTP : 942813753B31
NTPN : 32B050SUSBAFEK37
STAN : 753831

Kode Billing : 019122015490151

NPM : 001418797711000

Nama : BENDAHARA INSTITUT AGAMA ISLAM

Alamat : JALAN G. OBOS/KOMP. ISLAMIC CENTR, KOTA PALANGKA RAYA

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122019

No SK : 0000000000000000

NOP :

Jumlah Setoran : Rp. 127.255 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. PALANGKARAYA 73000

109320220

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 14-12-2019 12:38:29
No.Resi : 73000-05/2019/813294 Petugas : 992486580

Tanggal Buku : 16-12-2019
Kode Cabang Pos : 073000

NTP : 942814753B32
NTPN : 31B670SUSBAROCT7
STAN : 753832

Kode Billing : 019122015810471

NPM : 001418797711000

Nama : BENDAHARA INSTITUT AGAMA ISLAM

Alamat : JALAN G. OBOS/KOMP. ISLAMIC CENTR, KOTA PALANGKA RAYA

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122019

No SK : 0000000000000000

NOP :

Jumlah Setoran : Rp. 381.818 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah)

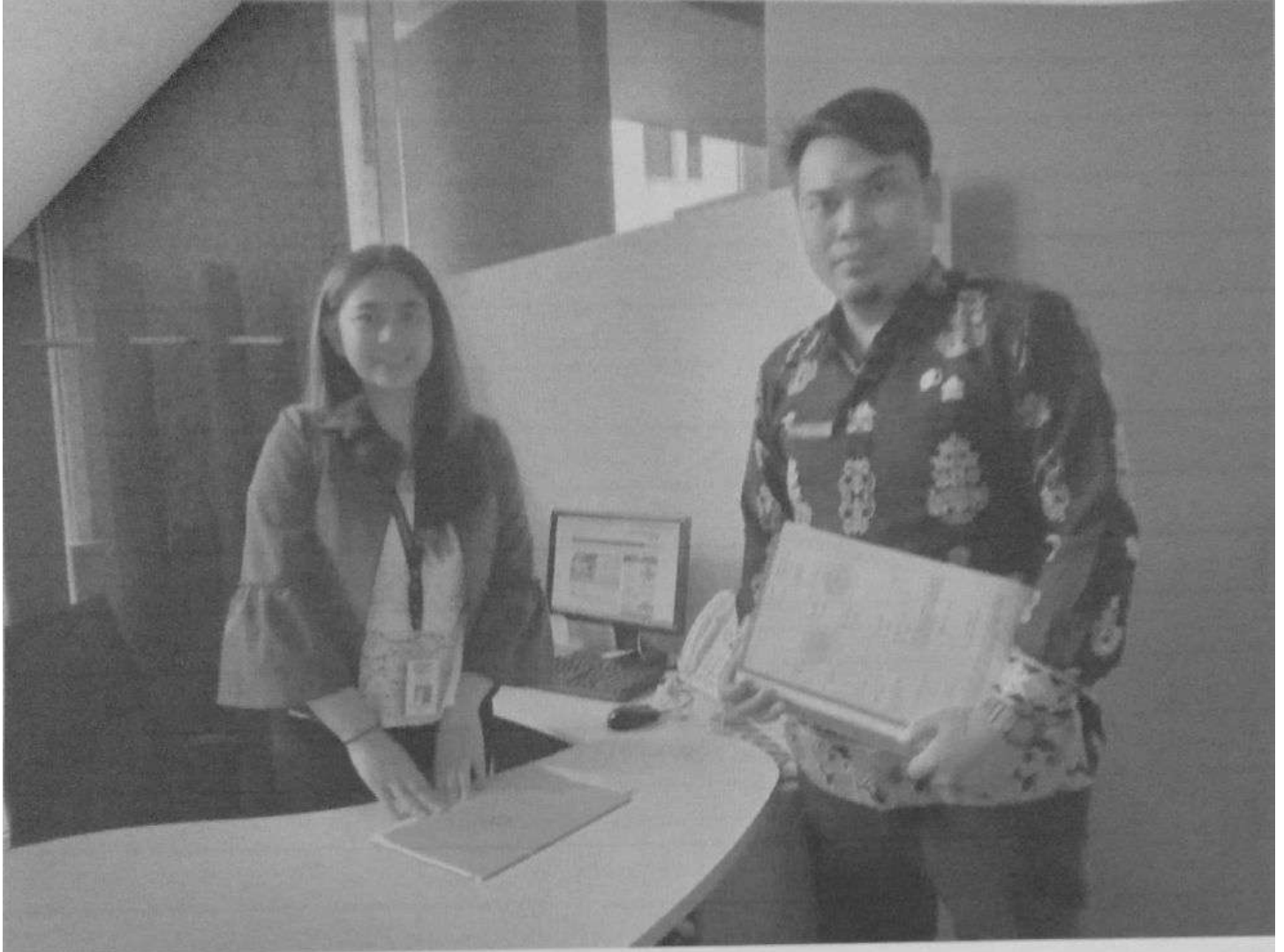
Syarat dan ketentuan berlaku

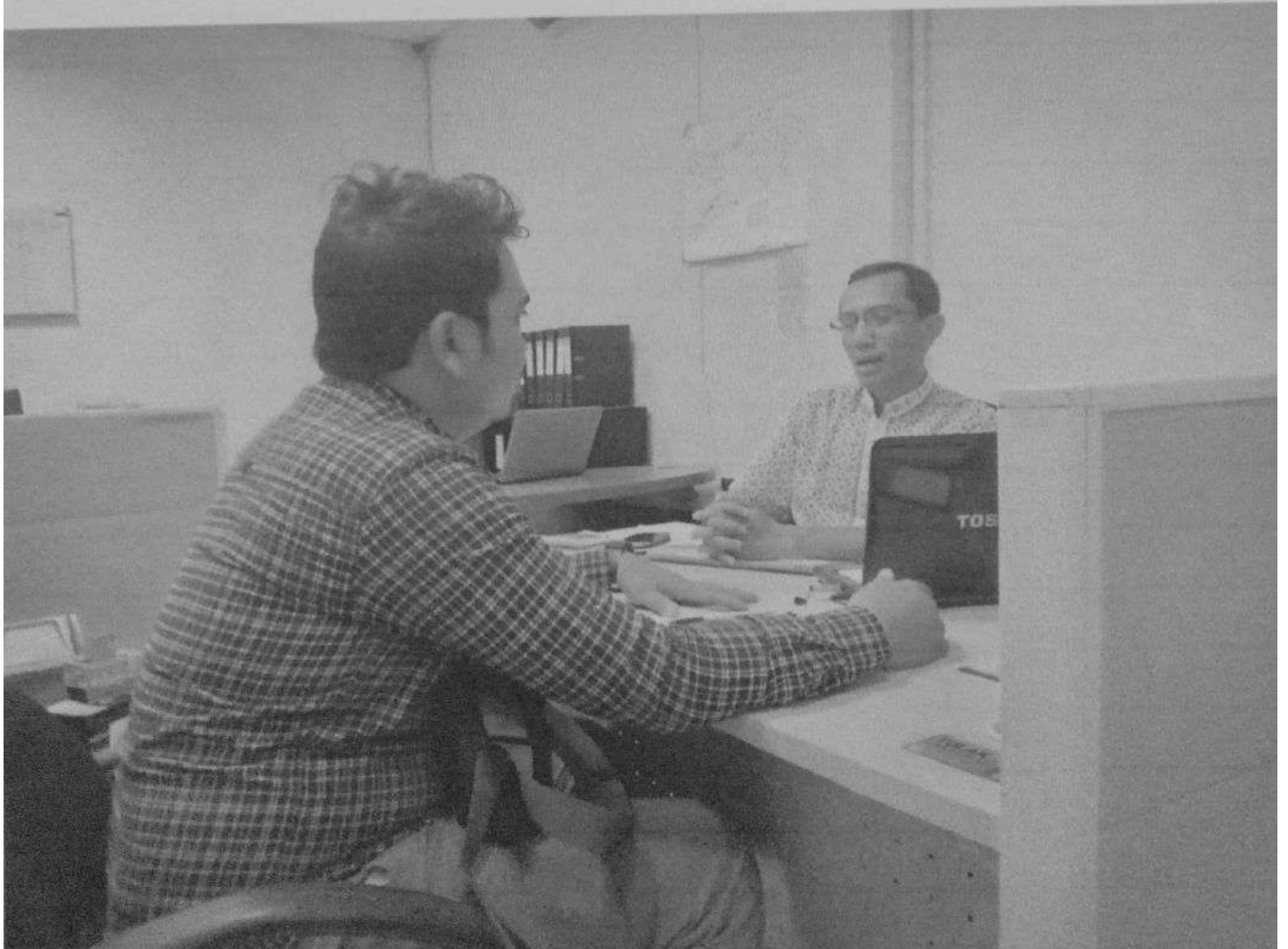
Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

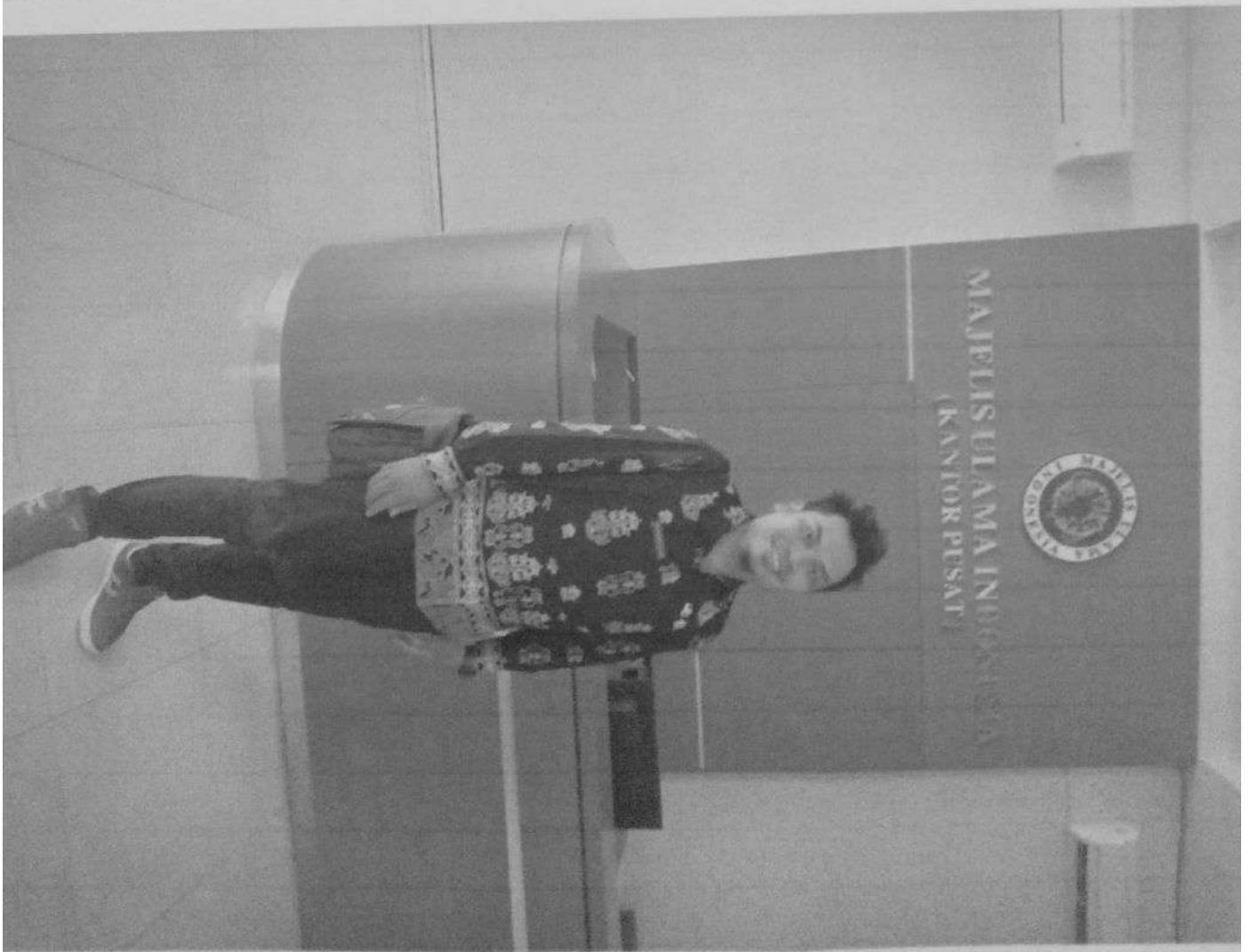




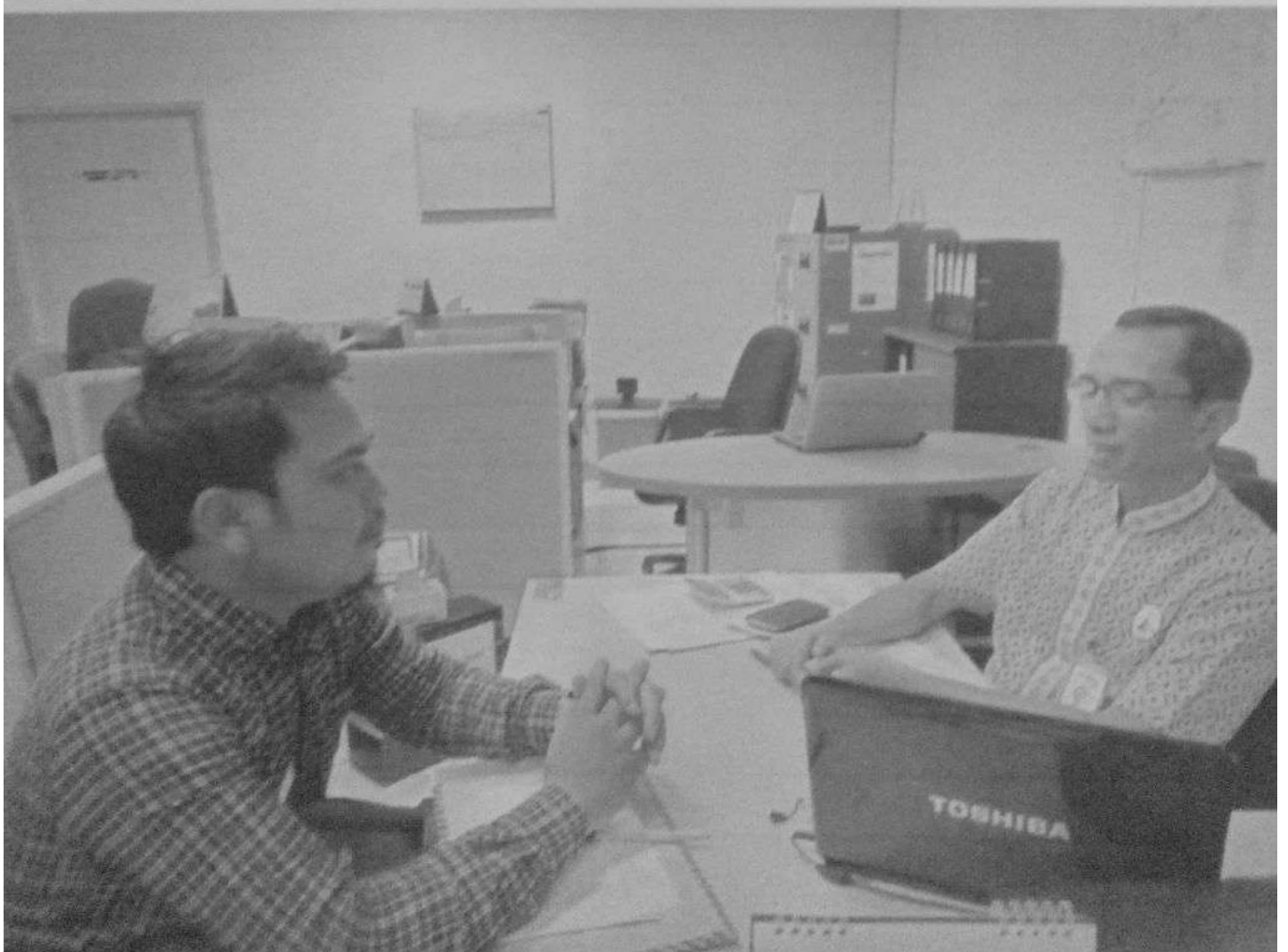
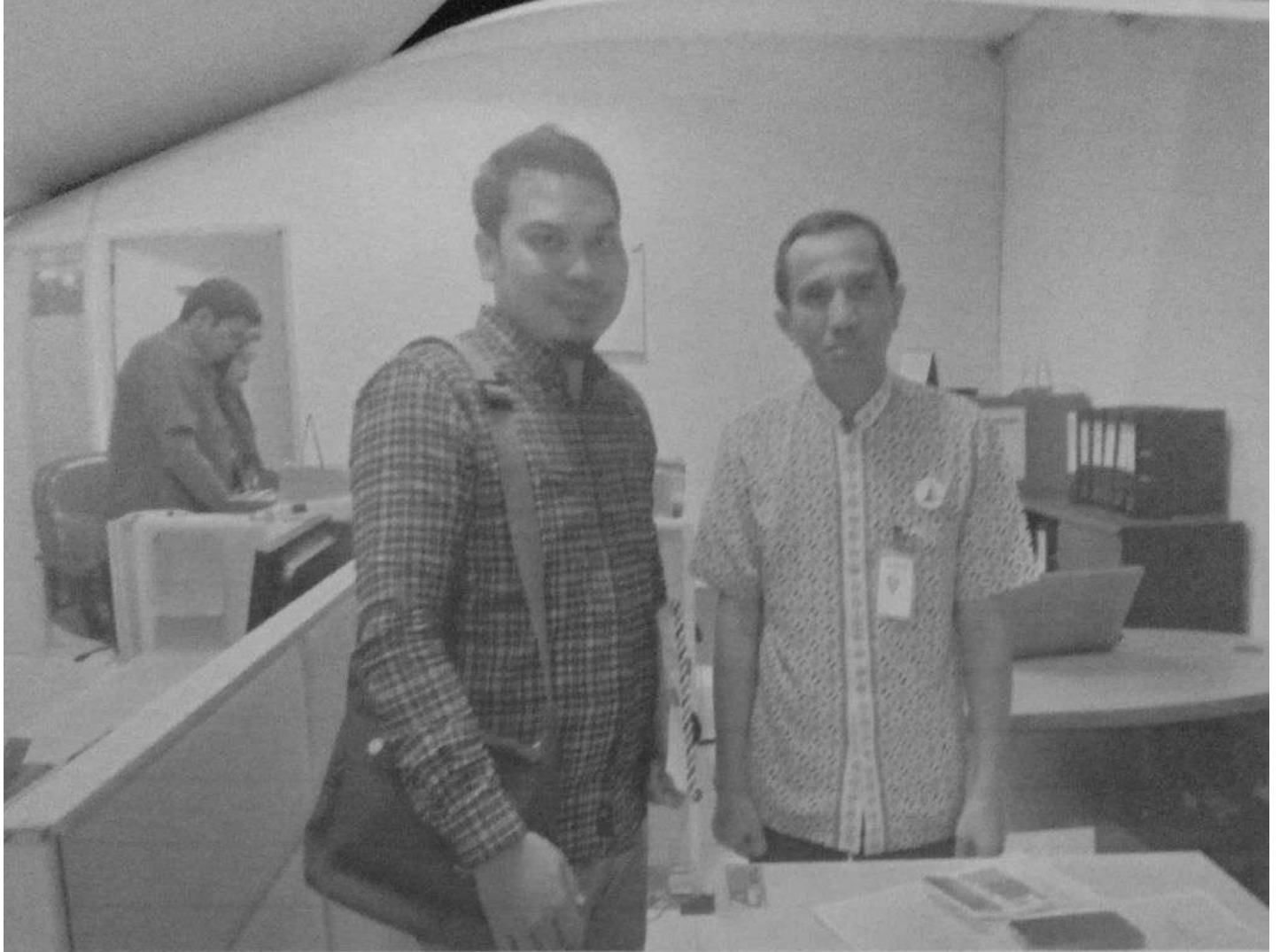
















KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
TIM PENGELOLA PENELITIAN TAHUN 2019



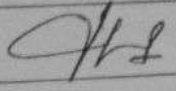
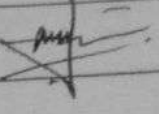
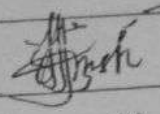

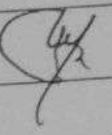



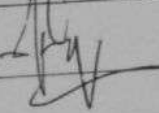
Jl. G.Obos Komplek Islamic Center Telp. (0536) 3239447 Fax. 3222105 Palangka Raya 73112 Website :
www.iain-palangkaraya.ac.id, email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id, info@iain-palangkaraya.ac.id

Daftar Hadir Seminar Hasil Penelitian Dosen
IAIN Palangka Raya Tahun 2019

Hari/Tanggal : Minggu/ 29 September 2019
Pukul : 10.00 - 11.30 WIB
Tempat : Hotel Aquarius Palangka Raya (Ruang B)

Peneliti : Dr. Dakhoir, MHI dkk.
Kluster : Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
Judul : Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. AHMAD SYARI	Peneliti	1
2	Subandi: Alim	—	2
3	M. LUTHFI S.P.	Peneliti	3
4	Suci Agriani Dwi S	Mahasiswa	4
5	Maimunah	Peneliti	5
6	Wahyu Akbar	"	6
7	Y. Mulpurno		7
8	Hadma Yuliani		8
9	Muhammad Asri		9
10	Jasich		10
11	M. Syahin	"	11
12	Yuliani Khalifah		12
13	Usman		13
14	Mam Qalybi		14

15	Novi Angga Sapitri		15	
16	Muhammad Iqbal		16	
17	Ahr Fudr Rahman		17	
18	Rafik Pratadaya		18	
19	Sharrifah		19	
20	Yulia Rahmah		20	
21	Ely Purwanto		21	
22	Ridwan Ariyadi		22	
23	Nanik L		23	
24	Dara Maulina		24	
25	Nur Inayah Syar		25	

Palangka Raya, 29 September 2019
Ketua Tim Pengelola,

Sri Fatmawati, M.Pd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
TIM PENGELOLA PENELITIAN TAHUN 2019

Jl. G. Obes Komplek Islamic Center Telp. (0536) 3259447 Fax. 3222105 Palangka Raya 73112 Website :
www.iain-palangkaraya.ac.id, email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id, info@iain-palangkaraya.ac.id

Blanko Catatan Moderator Seminar Hasil Penelitian Dosen
IAIN Palangka Raya Tahun 2019

Hari/Tanggal : Minggu/ 29 September 2019
Pukul : 10.00 - 11.30 WIB
Tempat : Hotel Aquarius Palangka Raya (Ruang B)

Peneliti : Dr. Dakhoir, MHI Gkk.
Kluster : Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
Judul : Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)
Penanggung Utama : Dr. Miftahul Huda, M.Ag
Moderator : Abdul Azis, M.Pd / Sri Fatmawati, M.Pd

Catatan :

- 1) Bagaimana penerapan ayat Al-Qur'an dalam perbankan Syariah.
- 2) Perlu Model perbankan Syariah yang dapat daya - rasi Al-Qur'an
- 3) Model ~~td~~ Ekshimis → Fundamentalis.
- 4) Identifikasi ⇒ perlu hati-hati
- 5) Perlu menelaah pustaka untuk mengidentifikasi.
- 6) Setelah mengidentifikasi → Menentukan teori / mengidentifikasi.
- 7) Wasathiyah - / Gerakan / ^{td} Muhammadiyah - Amaliyah > perlu & tindak lanjut
- 8) Fikrah

Palangka Raya, 29 September 2019
Moderator,

SRI FATMAWATI
Abdul Azis, M.Pd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
TIM PENGELOLA PENELITIAN TAHUN 2019

Jl. G. Obos Komplek Islamic Center Telp. (0536) 3239447 Fax. 3222105 Palangka Raya 73112 Website :
www.iain-palangkaraya.ac.id, email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id, info@iain-palangkaraya.ac.id

Blanko Catatan Penanggap Utama Seminar Hasil Penelitian Dosen
IAIN Palangka Raya Tahun 2019

Hari/Tanggal : Minggu/ 29 September 2019
Pukul : 10.00 - 11.30 WIB
Tempat : Hotel Aquarius Palangka Raya (Ruang B)

Peneliti : **Dr. Dakhoir, MHI dkk.**
Kluster : Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
Judul : Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)
Penanggap Utama : **Dr. Miftahul Huda, M.Ag**
Moderator : Abdul Azis, M.Pd

Catatan :

Dr. Huda

① pastie justifikasi terhadap
gibai spiritual yg luas.

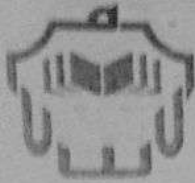
② murell para. 1 analisis
para Rikht.

③ bngg. Saas musty & cit
kan foreleut.

④ Trend

Palangka Raya, 29 September 2019
Penanggap Utama,

Dr. Miftahul Huda, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TIM PENGELOLA PENELITIAN TAHUN 2019

Jl. G. Obos Komplek Islamic Center Telp. (0536) 5259447 Fax. 5222105 Palangkaraya 73112 Website:
www.iainpalangkaraya.ac.id, email: iainpalangkaraya@kemendag.go.id, info@iain-palangkaraya.ac.id

Blanko Catatan Moderator Seminar Proposal Penelitian Dosen
IAIN Palangka Raya Tahun 2019

Hari/Tanggal : Sabtu/30 Maret 2019
Pukul : 13.20 - 14.30 WIB
Tempat : Meeting Room Hotel Fovore Palangka Raya / Ruang ID
Peneliti : Dr. Ahmad Dakhoir, MHI dkk.
Kluster : Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
Judul : Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)
Penanggung Utama : Dr. Miftahul Huda, M. Ag
Moderator : Sabarudin, MHI

Catatan :

1. Data penelitian, antara persepsi bankir tentang bunga bank dengan penerapan bunga bank di suatu lembaga
2. Rumusan
 - Bagaimana pemahaman bankir
 - Apa alasan pemahaman bankir
3. Pendekatan tidak mesti menggunakan pendekatan fikih wasathiyah
4. Fikih wasathiyah dapat menjadi wacana kedepan tentang ekonomi
5. Outcome → Jurnal → Min 2

Palangka Raya, 30 Maret 2019
Moderator,

Sabarudin, MHI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TIM PENGELOLA PENELITIAN TAHUN 2019

Jl. G. Obos Komplek Islamic Center Telp. (0536) 3239447 Fax. 3222105 Palangkaraya 73112 Website :
www.iain-palangkaraya.ac.id, email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id, info@iain-palangkaraya.ac.id

Blanko Catatan Penanggap Utama Seminar Proposal Penelitian Dosen
IAIN Palangka Raya Tahun 2019

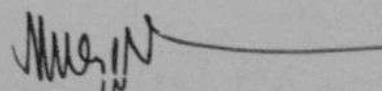
Hari/Tanggal : Sabtu/30 Maret 2019
Pukul : 13.20 – 14.30 WIB
Tempat : Meeting Room Hotel Fovere Palangka Raya (Ruang II)

Peneliti : Dr. Ahmad Dakhoir, MHI dkk.
Kluster : Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
Judul : Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (*Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah*)
Penanggap Utama : Dr. Miftahul Huda, M.Ag
Moderator : Rahmiad Kurniawan, M.E

Catatan :

1. Harus & penjelasan ini peneliti thd hukum
riba di perband → fikih wasathiyah.
2. atau persepsi bankir. Data?
3. fikih wasathiyah ??? analisis?
4. Daftar pustaka terlalu banyak
frase amir dengan. kuyak dengan.
DP.
5. metode.

Palangka Raya, 30 Maret 2019
Penanggap Utama,


Dr. Miftahul Huda, M.Ag



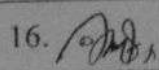


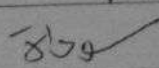



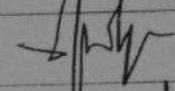
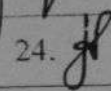
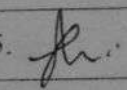
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TIM PENGELOLA PENELITIAN TAHUN 2019

Jl. G.Obos Komplek Islamic Center Telp. (0536) 3239447 Fax. 3222105 Palangkaraya 73112 Website :
www.iain-palangkaraya.ac.id, email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id, info@iain-palangkaraya.ac.id

Daftar Hadir Seminar Proposal Penelitian Dosen
IAIN Palangka Raya Tahun 2019

Hari/Tanggal : Sabtu/30 Maret 2019
Pukul : 13.20 – 14.30 WIB
Tempat : Meeting Room Hotel Fovere Palangka Raya (Ruang II)
Peneliti : Dr. Ahmad Dakhoir, MHI dkk.
Kluster : Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
Judul : Persepsi Bankir Terhadap Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fikih Wasathiyah)

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. im hudi	Dosen	1.
2.	Meimunah	Dosen	2.
3.	Khairil Anwar	Dosen	3.
4.	M. LUTHFI S.P.	Dosen	4.
5.	Subandi A	Dosen	5.
6.	Imam Qalybi	Dosen	6.
7.	ABUBAKAR HIR	Dosen	7.
8.	SADIANI	Dosen	8.
9.	Erry Fitrya	Dosen	9.
10.	Nurul Wahid	—	10.
11.	Sabir Umar	—	11.
12.	Abdul Khair	—	12.
13.	RAHMAD KURNIAWAN	—	13.
14.	Wahyu Kurni	—	14.
15.	M. Riza Hafizi	—	15.

16.	Dara Maulana	Mahasiswa TFS	16. 
17.	Ridwan Ariyadi	Mahasiswa TFS	17. 
18.	Saiful Azis	Mahasiswa	18. 
19.	Saudah		19. 
20.	Luvia Pangsi N		20. 
21.	Muhammad Syarif	Dosen	21. 
22.	Sri Fatmawati	TFS	22. 
23.	Nur Inayah Syar	PGMI	23. 
24.	Susilawati		24. 
25.	Ayubus n' er 202	TFS	25. 

Palangka Raya, 30 Maret 2019
Ketua Tim Pengelola,

Dr. Desi Erawati, M.Ag

NO. 013

KUITANSI

Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2019

Uang sejumlah : Rp 12,000,000

Terbilang : Dua Belas Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Penelitian Dosen Tahap II sebesar 30% dari total bantuan
Rp. 40.000.000 kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
atas nama Dr. Dakhoir, M.HI dkk.Berdasarkan : 1. Surat Keputusan Rektor Nomor 171 Tanggal 12 April 2019
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor B-90/In.22/V.1/HM.01/4/2019

Palangkaraya, /10/2019

Setuju dibayar
Pejabat Pembuat Komitmen,Dr. H. Sardimi, M.Ag
NIP. 19680108 199402 1 001

Pihak Kedua,

Dr. Dakhoir, M.HI
NIP. 19820707 200604 1 003

NO. 013

KUITANSI

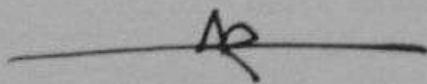
Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2019

Uang sejumlah : Rp 12,000,000

Terbilang : Dua Belas Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Penelitian Dosen Tahap II sebesar 30% dari total bantuan
Rp. 40.000.000 kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
atas nama Dr. Dakhoir, M.HI dkk.Berdasarkan : 1. Surat Keputusan Rektor Nomor 171 Tanggal 12 April 2019
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor B-90/In.22/V.1/HM.01/4/2019

Palangkaraya, /10/2019

Setuju dibayar
Pejabat Pembuat Komitmen,Dr. H. Sardimi, M.Ag
NIP. 19680108 199402 1 001

Pihak Kedua,

Dr. Dakhoir, M.HI
NIP. 19820707 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Jalan. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah
Telp/Fax (0536) 3222105, 3226356 Email: iainpalangkaraya@kemenag.go.id
Website: <http://iain-palangkaraya.ac.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN OPERASIONAL PENELITIAN DOSEN TAHAP II
IAIN PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Sardimi, M.Ag
NIP : 19680108 199402 1 001
Selaku : Pejabat Pembuat Komitmen

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA:

Nama : Dr. Dakhoir, M.HI
NIP : 19820707 200604 1 003
Selaku : Ketua Tim Peneliti

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA:

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA bantuan dana operasional Penelitian Dosen Tahap II sebesar 30% dari total bantuan Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) yakni **Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah)** untuk kegiatan Bantuan Operasional Penelitian Dosen kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional dengan judul **"Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)"** Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Palangkaraya Nomor 171 Tanggal 12 April 2019.

PIHAK KEDUA agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam Juknis dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor B-90/In.22/V.1/HM.01/4/2019 yang telah diterbitkan dan ditanda tangani oleh Rektor IAIN Palangka Raya dan juga peneliti.

Palangka Raya, Oktober 2019

PIHAK PERTAMA

Dr. H. Sardimi, M.Ag
NIP. 19680108 199402 1 001

PIHAK KEDUA

METERAI
TEMPEL
10A60AHF062611474

6000
ENAM RIBURUPIAH

Dr. Dakhoir, M.HI
NIP. 19820707 200604 1 003

NO. 013

KUITANSI

Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2019

Uang sejumlah : Rp 28,000,000

Terbilang : Dua Puluh Delapan Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Penelitian Dosen Tahap I sebesar 70% dari total bantuan
Rp. 40.000.000 kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional atas nama
Dr. Dakhoir, M.HI dkk.

Berdasarkan : 1. Surat Keputusan Rektor Nomor 171 Tanggal 12 April 2019
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor B-90/In.22/V.1/HM.01/4/2019

Palangkaraya, /05/2019

Setuju dibayar
Pejabat Pembuat Komitmen,

Hj. Sri Rahmawaty
NIP. 19610806 198203 2 002

Pihak Kedua,



Dr. Dakhoir, M.HI
NIP. 19820707 200604 1 003

NO. 013

KUITANSI

Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2019

Uang sejumlah : Rp 28,000,000

Terbilang : Dua Puluh Delapan Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Penelitian Dosen Tahap I sebesar 70% dari total bantuan
Rp. 40.000.000 kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional atas nama
Dr. Dakhoir, M.HI dkk.

Berdasarkan : 1. Surat Keputusan Rektor Nomor 171 Tanggal 12 April 2019
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor B-90/In.22/V.1/HM.01/4/2019

Palangkaraya, /05/2019

Setuju dibayar
Pejabat Pembuat Komitmen,

Hj. Sri Rahmawaty
NIP. 19610806 198203 2 002

Pihak Kedua,



Dr. Dakhoir, M.HI
NIP. 19820707 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Jalan. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah
Telp/Fax (0536) 3222105, 3226356 Email: iainpalangkaraya@kemenag.go.id
Website: <http://iain-palangkaraya.ac.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN OPERASIONAL PENELITIAN DOSEN TAHAP I
IAIN PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Sri Rahmawaty
NIP : 19610806 198203 2 002
Selaku : Pejabat Pembuat Komitmen

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA:

Nama : Dr. Dakhoir, M.HI
NIP : 19820707 200604 1 003
Selaku : Ketua Tim Peneliti

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA:

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA bantuan dana operasional Penelitian Dosen Tahap I sebesar 70% dari total bantuan Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) yakni **Rp. 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah)** untuk kegiatan Bantuan Operasional Penelitian Dosen kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional dengan judul **"Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)"** Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Palangkaraya Nomor 171 Tanggal 12 April 2019.

PIHAK KEDUA agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam Juknis dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor B-90/In.22/V.1/HM.01/4/2019 yang telah diterbitkan dan ditanda tangani oleh Rektor IAIN Palangka Raya dan juga peneliti.

Palangka Raya, Juni 2019

PIHAK PERTAMA

Hj. Sri Rahmawaty
NIP. 19610806 198203 2 002

PIHAK KEDUA



Dr. Dakhoir, M.HI
NIP. 19820707 200604 1 003

**SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGI NASIONAL
IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2019**

Nomor : B- 30 /In.22/V.1/HM.01/4/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ajahari, M,Ag : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor : 066 Tahun 2015 Tanggal 09 Maret 2015, bertindak untuk dan atas nama Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Dakhoir, MHI : Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional dengan judul penelitian "Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)" yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor: 171, tanggal 12 April 2019 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan penelitian kelompok tentang "Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)" PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan PERJANJIAN KERJA dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan tugas pelaksanaan kegiatan penelitian kelompok tentang "Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)" kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut.

Pasal 2

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA wajib mengalokasikan dana kegiatan penelitian kelompok tentang "Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)" kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan SP DIPA IAIN Palangka Raya - 025.04.2.426273/2019 tanggal 05 Desember 2018 yang didasarkan pada Surat Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor: 171, tanggal 12 April 2019 yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluha Juta Rupiah).
2. PIHAK PERTAMA wajib memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA menyajikan atau memaparkan proposal dan hasil penelitiannya dalam forum seminar dosen IAIN Palangka Raya yang dihadiri Dosen IAIN Palangka Raya sejak bulan Pebruari sampai dengan September 2019 penelitian tahun 2019.

Pasal 3

HAK DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak dan berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian kelompok tentang "Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)" yang dilakukan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA berhak memberikan pandangan dan pertimbangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian kelompok tentang "Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)" yang dilakukan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengatur secara teknis tentang pelaksanaan kegiatan seminar baik seminar proposal maupun seminar hasil penelitian.

Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA wajib merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan penelitian kelompok tentang "Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)" sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. PIHAK KEDUA wajib melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan penelitian kelompok tentang "Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)" sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
3. PIHAK KEDUA wajib mengelola keuangan sesuai dengan petunjuk operasional DIPA IAIN Palangka Raya Tahun 2019 dan arahan Rektor IAIN Palangka Raya dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dan menyerahkan bukti penggunaan keuangan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA wajib mempresentasikan proposal penelitian dalam forum seminar dosen IAIN Palangka Raya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk mendapatkan saran, kritik dan masukan dari penanggung utama serta memperbaiki proposal penelitiannya sesuai dengan saran dan masukan dari penanggung utama dan lainnya.
5. PIHAK KEDUA wajib membuat surat pernyataan pada revisi proposal dan hasil penelitian, sesuai dengan saran tim reviewer/penaggap utama di buktikan dengan tanda tangan persetujuan dari tim reviewer/penaggap.
6. PIHAK KEDUA wajib menghadiri seminar proposal minimal 75% dari jumlah kehadiran seminar yang diselenggarakan.
7. PIHAK KEDUA wajib menyajikan laporan hasil penelitiannya dalam forum seminar dosen IAIN Palangka Raya yang diselenggarakan LP2M mulai bulan Pebruari s.d. September 2019.

Pasal 5
HAK DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak dan berwenang mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan penelitian kelompok tentang "Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)" di lapangan sesuai dengan rencana, situasi, dan kondisi yang ada.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan dana penelitian dengan judul "Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)" dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan SP DIPA IAIN Palangka Raya - 025.04.2.426273/2019 05 Desember 2018 yang didasarkan pada Surat Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor: 171, tanggal 12 April 2019 yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
2. Apabila PIHAK KEDUA berhalangan maka hak dan wewenangnya diserahkan kepada Rektor IAIN Palangka Raya dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor I (Bidang Akademik) IAIN Palangka Raya.

Pasal 6
KETENTUAN PENCAIRAN DANA

1. Sistem pembayaran dibayarkan secara langsung oleh bendahara penyelenggara ke rekening penerima bantuan penelitian atau dalam hal ini adalah PIHAK KEDUA.
2. Pencairan dana bantuan operasional penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 5 ayat (2) dilaksanakan dengan dua kali tahapan:
 - a. tahap pertama 70% dari jumlah keseluruhan dana bantuan penelitian akan dicairkan setelah seminar proposal dan ditandatanganinya MOU/kontrak bantuan penelitian,
 - b. tahap kedua 30% akan dibayarkan setelah peneliti menyerahkan laporan kemajuan penelitian, yang dibuktikan dengan penyerahan laporan dalam bentuk :

- a) Log Book Penelitian lengkap beserta bundel lampirannya; dan
- b) Laporan penggunaan anggaran sebesar 70% dan sisanya rencana realisasi keuangan 30% dari total dana kegiatan penelitian Kelompok dosen tentang "Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)". Segala hal yang berkaitan dengan pajak menjadi tanggung jawab pihak kedua sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Sebelum pencairan tahap kedua tentunya PIHAK KEDUA telah menyerahkan laporan hasil penelitian dimaksud selengkapnya (tahap final) dan berbentuk artikel jurnal minimal pada jurnal nasional terindeks sinta 2 dengan bukti *screenshot submission* atau bukti LOA (*Letter Of Acceptance dari pihak pengelola jurnal*) atau Prosiding Internasional Terindeks Scopus kepada PIHAK PERTAMA dan hasil penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar dan copy file laporan penelitian beserta artikel pada CD. Pihak KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian pada Bendahara, LPM, Perpustakaan, Fakultas dan Prodi masing-masing sebanyak 1 eksemplar.

Pasal 7 DANA PELAKSANAAN SEMINAR

Mengingat dana pelaksanaan seminar proposal dan hasil penelitian tidak dianggarkan dalam DIPA IAIN Tahun 2019, maka seluruh kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tersebut sejak kegiatan persiapan, seminar proposal (moderator, penanggung utama, penggandaan, konsumsi) dan seminar hasil penelitian menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. PIHAK KEDUA menindaklanjuti hasil penelitian bagi pengusulan HKI/paten.
2. HKI/Paten yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian akan dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. PIHAK PERTAMA memberikan pelayanan kepada PIHAK KEDUA bagi pengusulan pencatatan HKI/Paten dalam bentuk manajemen satu pintu melalui akun sentra HKI/Paten LP2M IAIN Palangka Raya;
4. PIHAK KEDUA diarahkan untuk mengupayakan kerjasama bagi bantuan sponsor dari dunia usaha/industri dalam pengusulan HKI/Paten;
5. Hasil penelitian berupa peralatan seperti TTG (Teknologi Tepat Guna) yang dibiayai dari DIPA IAIN Palangka Raya adalah menjadi milik Negara.

Pasal 9 PERTANGGUNGJAWABAN

1. Segala jenis laporan penelitian, baik laporan substansi akademik maupun laporan non-akademik administrasi penggunaan biaya penelitian merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Jika di kemudian hari dilakukan pemeriksaan dan audit terhadap laporan penelitian oleh lembaga yang berwenang baik pemeriksa internal maupun pemeriksa eksternal dan terdapat temuan yang tidak wajar, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 10 INGKAR JANJI (WANPRESTASI)

1. PIHAK KEDUA yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan maka akan dinyatakan gugur oleh PIHAK PERTAMA dalam pengusulan pendanaan penelitian;
2. Jika PIHAK KEDUA memutuskan untuk mengundurkan diri karena alasan tertentu; PIHAK KEDUA harus membuat surat pernyataan diatas materai 6000. Semua biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan tidak dapat diusulkan kembali;
3. Apabila PIHAK KEDUA ingkar janji (*wanprestasi*) menyangkut keterlambatan penyerahan laporan *output* penelitian setelah batas akhir masa kontrak yang telah ditetapkan, maka PIHAK PERTAMA mengenakan sanksi berupa penghapusan kelompok peneliti tidak boleh mengajukan


- pendanaan penelitian pada kegiatan penelitian tahun berikutnya;
4. PIHAK KEDUA yang telah ditetapkan sebagai penerima dana penelitian yang tidak menyerahkan laporan *output* penelitian sebagian atau seluruh satuan laporan *output* penelitian diberikan dan tidak dapat mengakses dana penelitian tahun selanjutnya;
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaporkan tagihan *outcome* publikasi paper hasil penelitian pada masa waktu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya masa kontrak, maka PIHAK PERTAMA mengunci peneliti atau kelompok peneliti yang bersangkutan tidak dapat dipenuhinya tagihan *outcome* penelitian selama 2 (*dua*) tahun berturut-turut sampai sasaran jumlah yang ditetapkan dalam pedoman penelitian dan publikasi ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M IAIN Palangka Raya.

Pasal 11
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini akan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palangka Raya, 25 April 2019

PIHAK PERTAMA,


Ajahari, M.Ag
NIP. 19710302 199803 1 004

PIHAK KEDUA,


A6308AFF700644254

Dr. Dakhoir, MHI
NIP. 19820707 200604 1 003

Mengetahui:
Rektor IAIN Palangka Raya,



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 19630118 199103 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Jalan. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah

Telpon/Faksimili (0536) 3226356

Email: iainpalangkaraya@kemenag.go.id Website: <http://iain-palangkaraya.ac.id>

Nomor : P-165/In.22/V.1/KP.01.21/07/2019

Palangka Raya 05 Juli 2019

Sifat : Penting

Lampiran : Proposal dan SK

Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Ketua Majelis Ulama Indonesia

Di –

Jakarta

Teriring salam dan doa semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan penelitian kelompok oleh Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan izin sebagaimana perihal di atas dengan rincian sebagai berikut:

Judul Penelitian : Persepsi Bankir Terhadap Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fikih Wasathiyah)

Ketua Peneliti : Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI

Anggota : Jefry Tarantang, S.Sy., SH., MH

Jenis Penelitian : Kualitatif Deskriptif

Tempat Penelitian : Jakarta dan Mataram

Waktu Penelitian : Juli – Agustus 2019

Adapun proposal dan SK peneliti sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah
Telpon/Faksimili (0536) 3226356
Email: iainpalangkaraya@kemenag.go.id Website: <http://iain-palangkaraya.ac.id>

Nomor : P-64/In.22/V.1/KP.01.21/07/2019
Sifat : Penting
Lampiran : Proposal dan SK
Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

Palangka Raya 05 Juli 2019

Kepada Yth.
Pimpinan Bank Indonesia
Di –
Jakarta

Teriring salam dan doa semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan penelitian kelompok oleh Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan izin sebagaimana perihal di atas dengan rincian sebagai berikut:

Judul Penelitian : Persepsi Bankir Terhadap Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fikih Wasathiyah)
Ketua Peneliti : Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI
Anggota : Jefry Tarantang, S.Sy., SH., MH
Jenis Penelitian : Kualitatif Deskriptif
Tempat Penelitian : Jakarta dan Mataram
Waktu Penelitian : Juli – Agustus 2019
Adapun proposal dan SK peneliti sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Ajahari, M.Ag
NIP. 19710302 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jalan. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah

Telpon/Faksimili (0536) 3226356

Email: lainpalangkaraya@kemenag.go.id Website: <http://lain-palangkaraya.ac.id>

Nomor : P- 166/In.22/V.1/KP.01.21/07/2019

Palangka Raya 05 Juli 2019

Sifat : Penting

Lampiran : Proposal dan SK

Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Pimpinan BNI Syariah

Di –

Mataram

Teriring salam dan doa semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan penelitian kelompok oleh Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan izin sebagaimana perihal di atas dengan rincian sebagai berikut:

Judul Penelitian : Persepsi Bankir Terhadap Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fikih Wasathiyah)
Ketua Peneliti : Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI
Anggota : Jefry Tarantang, S.Sy., SH., MH
Jenis Penelitian : Kualitatif Deskriptif
Tempat Penelitian : Jakarta dan Mataram
Waktu Penelitian : Juli – Agustus 2019

Adapun proposal dan SK peneliti sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.




Lion Air eTicket Itinerary / Receipt

This is an eTicket Itinerary. To enter the airport and for check-in, you must present this Itinerary receipt along with Official Government issued photo identification such as passport, identity card or Indonesians KTP.

Booking Details

Booking Reference (PNR): EBZYLQ Purchased From: Pt. Jagat Danum Pambelum
 Issued Date: Jumat, 05 Jul, 2019

Passenger Details

1.	Tarantang/Jefry Mr	9902194256436	
----	--------------------	---------------	--

Itinerary Details

Flight	Depart	Arrive	Stops	Class	Fare Basis	Status	Baggage
JT 682	Surabaya (SUB) 12 Jul 2019 18.40 hrs	Palangkaraya (PKY) 12 Jul 2019 19.50 hrs	0	Economy - S	SOW	Confirmed	NIL

CABIN-ECONOMY
 Operated by Lion Air

Fare Details (Includes Base Fare, Taxes, Fees and Surcharges)

Published Fare:	IDR 927.000
Total Taxes:	IDR 187.700
TOTAL TICKET	IDR 1.114.700
Others:	
Total Amount:	IDR 1.114.700

5000YRI 90000D5 90200ID

Legend : YR/ID = Surcharge / Value Added Tax (PPN)
 SG/D5 = Passenger Service Charge
 OO = Passenger Security Service Charge, OP= Aviation Levy, SG = Passenger Service Charge

Fare Rules

Booking Class S: Ticket Refund and Exchanges are permitted with payment of fee and fare difference (if any) and within a defined deadline. Name Change is not permitted.

Do not put valuable items (cameras, laptops, phones, jewelleryes, documents and cash) in checked baggage.

Dilarang memasukkan barang-barang berharga (kamera, laptop, ponsel, perhiasan, dokumen berharga dan uang) ke dalam bagasi yang diserahkan.

Tour Code

ITIDPKY009352

Important Notes

* Please arrive at the airport for check-in 2 hours prior to departure.


Lion Air eTicket Itinerary / Receipt

This is an eTicket itinerary. To enter the airport and for check-in, you must present this itinerary receipt along with Official Government issued photo identification such as passport, identity card or Indonesians KTP.

Booking Details

Booking Reference (PNR): FFQVGZ Purchased From: Pt. Jagat Danum Pambelum
 Issued Date: Jumat, 05 Jul, 2019

Passenger Details

1.	Tarantang/Jefry Mr	9902194256405	
----	--------------------	---------------	--

Itinerary Details

Flight	Depart	Arrive	Stops	Class	Fare Basis	Status	Baggage
JT 177	Lombok, Mataram (LOP) 11 Jul 2019 12.15 hrs	Surabaya (SUB) 11 Jul 2019 12.10 hrs	0	Economy - S	SOW	Confirmed	NIL

CABIN-ECONOMY
 Operated by Lion Air

Fare Details (Includes Base Fare, Taxes, Fees and Surcharges)

Published Fare:	IDR 656.000
Total Taxes:	IDR 130.600
TOTAL TICKET	IDR 786.600
Others:	
Total Amount:	IDR 786.600

5000YRI 6000D5 63900ID

Legend : YR/ID = Surcharge / Value Added Tax (PPN)

SG/D5 = Passenger Service Charge

OO = Passenger Security Service Charge, OP= Aviation Levy, SG = Passenger Service Charge

Fare Rules

Booking Class S: Ticket Refund and Exchanges are permitted with payment of fee and fare difference (if any) and within a defined deadline. Name Change is not permitted.

Do not put valuable items (cameras, laptops, phones, jewellerys, documents and cash) in checked baggage.

Dilarang memasukkan barang-barang berharga (kamera, laptop, ponsel, perhiasan, dokumen berharga dan uang) ke dalam bagasi yang diserahkan.

Tour Code

ITIDPKY009352

Important Notes

* Please arrive at the airport for check-in 2 hours prior to departure.


Lion Air eTicket Itinerary / Receipt

This is an eTicket itinerary. To enter the airport and for check-in, you must present this itinerary receipt along with Official Government issued photo identification such as passport, identity card or Indonesians KTP.

Booking Details

Booking Reference (PNR): AJIIH Purchased From: Pt. Jagat Danum Pabelum
Issued Date: Jumat, 05 Jul, 2019

Passenger Details

1.	Tarantang/Jefry Mr	9902194254037	
----	--------------------	---------------	--

Itinerary Details

Flight	Depart	Arrive	Stops	Class	Fare Basis	Status	Baggage
JT 652	Jakarta Soekarno Hatta (CGK)	Lombok, Mataram (LOP)	0	Economy - S	SOW	Confirmed	NIL
	09 Jul 2019 17.35 hrs	09 Jul 2019 20.35 hrs					

CGK-LOP CHECK-IN WITH LION AIR KEBERANGKATAN DARI TERMINAL 1A
Operated by Lion Air

Fare Details (Includes Base Fare, Taxes, Fees and Surcharges)

Published Fare:	IDR 1.112.000
Total Taxes:	IDR 181.200
TOTAL TICKET	IDR 1.293.200
Others:	
Total Amount:	IDR 1.293.200

5000YRI 65000D5 108200ID

Legend : YR/ID = Surcharge / Value Added Tax (PPN)
SG/D5 = Passenger Service Charge
OO = Passenger Security Service Charge, OP= Aviation Levy, SG = Passenger Service Charge

Fare Rules

Booking Class S: Ticket Refund and Exchanges are permitted with payment of fee and fare difference (if any) and within a defined deadline. Name Change is not permitted.

Do not put valuable items (cameras, laptops, phones, jewelleries, documents and cash) in checked baggage.

Dilarang memasukkan barang-barang berharga (kamera, laptop, ponsel, perhiasan, dokumen berharga dan uang) ke dalam bagasi yang diserahkan.

Tour Code

ITIDPKY009352

Important Notes

* Please arrive at the airport for check-in 2 hours prior to departure.


Lion Air eTicket Itinerary / Receipt

This is an eTicket itinerary. To enter the airport and for check-in, you must present this itinerary receipt along with Official Government issued photo identification such as passport, identity card or Indonesian KTP.

Booking Details

Booking Reference (PNR): AJGCXI Purchased From: Pt. Jagat Danum Pambelum
 Issued Date: Jumat, 05 Jul, 2019

Passenger Details

1.	Tarantang/Jefry Mr	9902194253653	
----	--------------------	---------------	--

Itinerary Details

Flight	Depart	Arrive	Stops	Class	Fare Basis	Status	Baggage
JT 671	Palangkaraya (PKY)	Jakarta Soekarno Hatta0 (CGK)		Economy - B	BOW	Confirmed	NIL
	08 Jul 2019 06.50 hrs	08 Jul 2019 08.30 hrs					

PKY-CGK CHECK-IN WITH LION AIR KEDATANGAN DI TERMINAL 1A
 Operated by Lion Air

Fare Details (Includes Base Fare, Taxes, Fees and Surcharges)

Published Fare:	IDR 1.052.000
Total Taxes:	IDR 140.200
TOTAL TICKET	IDR 1.192.200
Others:	
Total Amount:	IDR 1.192.200

5000YRI 30000D5 102400ID

Legend : YR/ID = Surcharge / Value Added Tax (PPN)
 SG/D5 = Passenger Service Charge
 OO = Passenger Security Service Charge, OP= Aviation Levy, SG = Passenger Service Charge

Fare Rules

Booking Class B: Ticket Refund and Exchanges are permitted with payment of fee and fare difference (if any) and within a defined deadline. Name Change is not permitted.

Do not put valuable items (cameras, laptops, phones, jewelleryes, documents and cash) in checked baggage.

Dilarang memasukkan barang-barang berharga (kamera, laptop, ponsel, perhiasan, dokumen berharga dan uang) ke dalam bagasi yang diserahkan.

Tour Code

ITIDPKY009352

Important Notes

* Please arrive at the airport for check-in 2 hours prior to departure.

Lion Air Wings Air Batik

Lion Air Wings Air Batik

TARANTANG
PRAYU LOMBOK
SURABAYA
BOARD TIME-1145

E-TKT

BOARDING GATE CLOSING 10 MINUTES BEFORE DEPARTURE
RUANG TANGGAS TUTUP 10 MENIT SEBELUM JALAN KEBERANGKATAN

ECONOMY

Lion Air

09 JUL 19

17:05

JT 652

TARANTANG

PRAYU LOMBOK

BOARDING PASS

Lion Air

TARANTANG/JEFFRY MR

SURABAYA

PALANGKA RAYA

EBZYLQ

Class: S

Boarding Pass

JT 0682
12 JUL 19
18:10
1-2
8E
092

10 MINUTES BEFORE DEPARTURE
10 MENIT SEBELUM JALAN KEBERANGKATAN

HOTEL INVOICE



Date :	08 July 2019	Code Booking :	YCL57864
Booking name :	Mr. Jefry tarantang		
OYO stays name :	OYO Townhouse 1 Hotel Salemba		
City :	Jakarta		
No of rooms :	334		
Rate/night :	Rp. 400.000		
Check In date :	08 July 2019		
Check out date :	09 July 2019		
Duration of stay :	1 night		

Particulars	total
Room's Rate :	Rp. 400.000
Discount :	0
Early check in :	
Late check in :	
Room services :	
Nett Paid :	

Best Regard,

Dicky Ariaguna
(Hotel Manager)

Hotel Phone : 0813388015708

Citilike^{Hotel}

INVOICE

Citilike hotel : Jl. Balam No. 7 Cakranegara – Mataram – Lombok
Nusa Tenggara Barat

P : +6285954461991/+62821440019090 | e : reservation@citilikehotel.com
www.citilikehotel.com

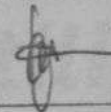
INVOICE NO :

NAME : Mr. JEFRY TARANTANG
ADDRES : -
PHONE : -

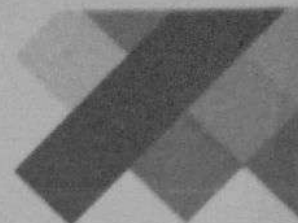
ARV DATE	DEPT DATE	ROOM TYPE	NITE	QTY	PRICE	TOTAL
09-Jul	10-Jul	SUPERIOR	1	1	IDR 400.000	IDR 400.000
REKENING A CITILIKE HOTEL MANDIRI : 161-00-0534358-2 a/n : Ni Ketut Laksmi Sulistiawati					SUB TOTAL	IDR 400.000
					DEPOSIT	IDR 400.000
					TOTAL	IDR -

GUEST

ISSUED BY



Thank you for staying with us and looking forward to welcome you again!



Hotel Voucher

No. 10152490

HOTEL : BEKIZAAR BUSINESS HOTEL SURABAYA
 JL. BASUKI RAHMAD NO 15 SURABAYA
 60271
 KOTA SURABAYA
 Telp. 031-5312296
 Email. reservation@bekizaarhotel.com

DATE OF ISSUED : 11-JUL-19
BOOKING CODE : RG07K4N
CONFIRMED HTL BY : CINTYA
BOOKED BY : SINTA
ISSUED BY : SINTA

GUEST / GROUP NAME (S)	NUMBER OF ROOM (S)	NUMBER OF PAX (S)	ROOM TYPE
JEFRI TARANTANG MR	1	2 Pax	BUSINESS ROOM
TOTAL	1		

DETAIL VOUCHER :

Check In : 11-JUL-19
 Check Out : 12-JUL-19
 Total Room / Night (s) : 1

Market : ALL MARKET
 Meal : BREAKFAST
 Total Compulsory : 0 Pax (ADULT)
 0 Pax (CHILD)

REQUEST (Subject to Availability upon check in) :

CNFRM KING SIZE BED,NO SMOKING

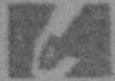
Attention :

1. This hotel voucher also valid as invoice
2. Non refundable after 7 days check out date from hotel & remarks from hotel must be attached
3. This hotel voucher is valid for room only, unless other services is specified
4. Reservation and payment by KAH

Detail Price Per Room:

IN - OUT	PRICE	NIGHT	SUB TOTAL
11 Jul-12 Jul	415.000	1	415.000
TOTAL / ROOM		1	IDR 415.000

TOTAL ROOM (S)	1	IDR 415.000
COMPULSORY DINNER		IDR 0
EXTRA BED		IDR 0
DISCOUNT		(IDR 0)
TOTAL AMOUNT		IDR 415.000



LOMBOK RAYA

HOTEL

Jl. Panca Usaha No. 11, Mataram - Lombok - Indonesia
Tel. (0370) 632305 (Hunting), Fax. (0370) 636478
E-mail : reservation@lombokrayahotel.com
Website : www.lombokrayahotel.com

Room : E674

Guest Name : JERRY FARANTANG

Pax : 2

Arrival : 10-Jul-2019

Departure : 11-Jul-2019

DATE	REF. #	DESCRIPTION	AMOUNT	PAYMENT	BALANCE
10-Jul-19	NA0J701948	RM# E674 NEW SUPER DELUXE DOUBLE	850.000	0	850.000
11-Jul-19	CASH#RP	CLOSED	0	850.000	0

TOTAL

850.000

PRINTED : 11-Jul-19 09:35 By SAMSUDIN

CLOSED : 11-Jul-19 09:34 By SAMSUDIN

CASH

REMARKS : PA-P/A IBI

Please make sure you have cleared your Safety Deposit Box
Pastikan anda telah mengosongkan Safety Deposit Box

Please do not forget to leave your room key at our Cashier
Jangan lupa tinggalkan kunci kamar anda di kasir

COMPANY WALK IN

SIGNATURE: _____

Thank you
for staying
with us
Please come
again





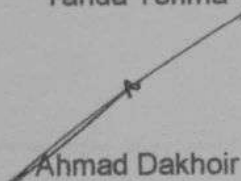
Penerbit K-Media
Perum Pondok Indah Banguntapan
Blok B-15, Banguntapan
Bantul 55196
Yogyakarta

No. : 025/K-Media/10/2019
Tanggal : 29 Oktober 2019
Nama : Ahmad Dakhoir
Alamat : IAIN Palangka Raya

No	Keterangan	Jumlah	Harga	Total
1	Biaya Cetak Buku " <i>Hukum Bunga Bank</i> <i>(Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)</i> "	250	Rp 56.242,-	Rp 14.060.500,-
Total Harga				Rp 14.060.500,-
Uang Muka				-
Kurang				-

Catatan:

Tanda Terima


Ahmad Dakhoir

Hormat Kami


K-Media
Nasir

Perhatian!!!

Barang yang sudah diterima harap diperiksa kembali, komplain maksimal 3 hari setelah barang diterima.
Lebih dari 3 hari bukan tanggung jawab kami

FADARA CORP

PALANGKA RAYA 11. Oktober 2019

FOTO COPY, ATK, PENGETIKAN, SCAN, PRINT & BUKU REFERENSI
JL. GLOBOS IX (0813 3141 8281)

Nota No: _____

No.	Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
1.	1 Buah	Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya		158.000
2.	1 Buah	Perbankan Syariah : Produk - produk dan Aspek Hukumnya		150.000
3.	1 Buah	Aspek-aspek Hukum Perbankan Pada Bank		186.000
4.	1 Buah	Hukum Keuangan Syariah		160.000
5.	1 Buah	Kaidah-kaidah Fikih Keuangan		160.000
6.	1 Buah	Akuntansi Perbankan Syariah		220.000
7.	1 Buah	Perbankan Syariah di Indonesia		186.000
8.				
9.				
10.				
*) Terima kasih atas kepercayaan Anda pada kami.			JUMLAH Rp.	1.166.000

Tanda Terima

Normal Kami
(Kawan Kawan M.)

FADARA CORP

PALANGKA RAYA 11. Oktober 2019

FOTO COPY, ATK, PENGETIKAN, SCAN, PRINT & BUKU REFERENSI
JL. GLOBOS IX (0813 3141 8281)

Nota No: _____

No.	Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
1.	1 Buah	Ekonomi Pembangunan Syariah		150.000
2.	1 Buah	Segarah Pemikiran Ekonomi Islam		120.000
3.	1 Buah	Teori Hukum Ekonomi Syariah		115.000
4.	1 Buah	Lembaga Keuangan Syariah		125.000
5.	1 Buah	Menyoal Bank Syariah		110.000
6.	1 Buah	Buku Islamic Banking and Finance		260.000
7.	1 Buah	Fikih Sunnah Jilid 1-5		590.000
8.				
9.				
10.				
*) Terima kasih atas kepercayaan Anda pada kami.			JUMLAH Rp.	1.470.000

Tanda Terima

Normal Kami
(Kawan Kawan M.)

Catering, Makanan & Minuman
Jln Kapten Piere Tendean No.17
Telp. 081254793736/ 081348755696

11. Oktober 2019

JURIAHATI

No. _____

Telah terima dari

Jefry Tarantans

Uang sejumlah

Enam Ratus Pulu Rupiah

Untuk pembayaran

Biaya pengurusan Hake Cipta Laporan

Hasil Penelitian Kelampayan Tahun 2019

Palangkaraya, 3/12/2019

Rp. 600.000,-

TP1 HIPA-ATI, M4



Dibayar ke : _____

Dibayar dan dibukukan :

Pada tanggal : _____

Bukti Kas No. : _____

Jenis Pengeluaran : _____

Rekening Nomor : _____

KWITANSI

Terima dari : Jefry Tarantang, SHL, SH, MH

Uang sebanyak : Enam Ratus Ribu Rupiah

Yaitu :

Biaya Pengurusan pendaftaran Hak Cipta Laporan Hasil Penelitian Kelompok tahun 2019

Terbilang Rp.

600.000,-

Setuju dibayar
Pengguna Anggaran,

Lunas Dibayar
Tgl.
Bendahara Pengeluaran,

Palangka Raya, 03-12-2019



Barang-barang tsb. telah diterima dengan
cukup dan dalam keadaan baik oleh :

Barang-barang tsb. telah dimasukkan
dalam daftar Inventaris / Pemakaian :

Uang tsb. telah dibayar lunas kepada
yang berhak menerimanya oleh :

Nama : _____

Tgl. _____

Jabatan : _____

No. Inv. _____

(_____)

Tuan
Tokong

[illegible]

4
Jeffrey

Hormat kami,
Toko "TRIO BARU INDAH"
PERCETAKAN & ATK
Jl. Patih Rumbih Perbekaan No. 20 P. Raya
Telp. 0812 5152 5355

Tuan
Toko

[illegible]

14
Jany

Hormat kami,
Toko "TRIA BARU INDAH"
PERCETAKAN & ATK
Jl. Patih Rumbin Perbekaan No. 20 P. Raya
Telp. 0812 5132 5355

PALANGKA RAYA 27-10-19

ATK, PENGETIKAN, SCAN, PRINT & BUKU REFERENSI
Jl. G.060S IX (0813 3141 8281)

Nota No: _____

No.	Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
1.	8 buah	Batrij	250.000	2.000.000
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
			JUMLAH Rp.	2.000.000

*) Terima kasih atas kepercayaan Anda pada kami.

Tanda Terima

4
[4]

Hormat Kami

Hormat Kami

U. G. Das & P. Raha

P. Rays, 13-10-2019

Tuan
Toko

NOTA No. 2 :

[illegible]

Tanda Trima

Hormat kami,

KEY FINDING

IL BANGARIP. 083 4669 8396

TOKO JAYA BERSAMA

MELAYANI FOTO COPY, PENJUALAN ATK, PENJUALAN, DLL
JL. G. OBOS IX HP. 082255481671

Palangka Raya
Kepada Yth.

12/10/2019

Nota no	Banyak	Nama barang	Harga Satuan	Jumlah
	10 mm	Kertas Quarto	35.000	350.000
	2 tobak	Rulpen	75.000	150.000
	6 lbr	Materai	7.000	42.000
	6 bh	Buku Kerja	50.000	300.000
	10 bh	Tinta Printer	30.000	300.000
		Jumlah		1.42.000

Di terima Oleh

Harmat[†] kami

217

Handwritten signature: *Handwritten signature*

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PENELITIAN DOSEN IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2019
PERSEPSI BANKIR TERHADAP HUKUM BUNGA BANK
(PENDEKATAN FIKIH WASATHIYAH IQTISHADIIYAH)

No	Uraian	Volume		Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Honor				1.000.000	1.000.000
	a Penanggap Utama Proposal	1	OK	150.000	150.000	150.000
	b Penanggap Utama Seminar Hasil	1	OK	850.000	850.000	850.000
2	Belanja Bahan dan Konsumsi				16.087.800	16.087.800
	a Kertas kuarto	10	rim	35.000	350.000	350.000
	b Flashdisk 8 GB	10	buah	106.000	1.060.000	1.060.000
	c katrij	8	buah	250.000	2.000.000	2.000.000
	d Fotokopi bahan referensi	6999	lbr	200	1.399.800	1.399.800
	e Pulpen	2	kotak	75.000	150.000	150.000
	f Materai	6	lbr	7.000	42.000	42.000
	g Penggandaan bahan seminar	60	eks	70.000	4.200.000	4.200.000
	h Laporan/penjilidan	6	eks	200.000	1.200.000	1.200.000
	i Konsumsi seminar	70	Kotak	35.000	2.450.000	2.450.000
	k Buku Bahan Referensi	1	Paket	2.636.000	2.636.000	2.636.000
	l Buku kerja	6	Buah	50.000	300.000	300.000
	m Tinta printer	10	buah	30.000	300.000	300.000
3	Belanja Perjalanan				8.251.700	8.251.700
	a. Tiket Pesawat PP	1	OK	4.386.700	4.386.700	4.386.700
	b. Uang Harian	5	OH	400.000	2.000.000	2.000.000
	c. Hotel	4	OH	1.865.000	1.865.000	1.865.000
4	Publikasi Penelitian				14.660.500	14.660.500
	a Cetak Buku	250	eks	56.242	14.060.500	14.060.500
	b Penerbitan HAKI	1	Paket	600.000	600.000	600.000
	Jumlah 1+2+3+4				40.000.000	40.000.000

**SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGI NASIONAL
IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2019**

Nomor : B-90 /In.22/V.1/HM.01/4/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Ajahari, M,Ag : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor : 066 Tahun 2015 Tanggal 09 Maret 2015, bertindak untuk dan atas nama Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 Dr. Dakhoir, MHI : Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional dengan judul penelitian "Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)" yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor:171, tanggal 12 April 2019 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan penelitian kelompok tentang "Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)" PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan PERJANJIAN KERJA dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan tugas pelaksanaan kegiatan penelitian kelompok tentang "Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)" kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut.

Pasal 2

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA wajib mengalokasikan dana kegiatan penelitian kelompok tentang "Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)" kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan SP DIPA IAIN Palangka Raya - 025.04.2.426273/2019 tanggal 05 Desember 2018 yang didasarkan pada Surat Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor:171, tanggal 12 April 2019 yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
2. PIHAK PERTAMA wajib memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA menyajikan atau memaparkan proposal dan hasil penelitiannya dalam forum seminar dosen IAIN Palangka Raya yang dihadiri Dosen IAIN Palangka Raya sejak bulan Pebruari sampai dengan September 2019 penelitian tahun 2019.

Pasal 3

HAK DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak dan berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian tentang "Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)" yang dilakukan PIHAK KEDUA.

2. PIHAK PERTAMA berhak memberikan pandangan dan pertimbangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian kelompok tentang "Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)" yang dilakukan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengatur secara teknis tentang pelaksanaan kegiatan seminar baik seminar proposal maupun seminar hasil penelitian.

Pasal 4 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA wajib merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan penelitian kelompok tentang "Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)" sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. PIHAK KEDUA wajib melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan penelitian kelompok tentang "Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)" sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
3. PIHAK KEDUA wajib mengelola keuangan sesuai dengan petunjuk operasional DIPA IAIN Palangka Raya Tahun 2019 dan arahan Rektor IAIN Palangka Raya dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dan menyerahkan bukti penggunaan keuangan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA wajib mempresentasikan proposal penelitian dalam forum seminar dosen IAIN Palangka Raya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk mendapatkan saran, kritik dan masukan dari penaggap utama serta memperbaiki proposal penelitiannya sesuai dengan saran dan masukan dari penaggap utama dan lainnya.
5. PIHAK KEDUA wajib membuat surat pernyataan pada revisi proposal dan hasil penelitian, sesuai dengan saran tim reviewer/penaggap utama di buktikan dengan tanda iangan persetujuan dari tim reviewer/penaggap.
6. PIHAK KEDUA wajib menghadiri seminar proposal minimal 75% dari jumlah kehadiran seminar yang diselenggarakan.
7. PIHAK KEDUA wajib menyajikan laporan hasil penelitiannya dalam forum seminar dosen IAIN Palangka Raya yang diselenggarakan LP2M mulai bulan Pebruaris.d.September 2019.

Pasal 5 HAK DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak dan berwenang mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan penelitian kelompok tentang "Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)" di lapangan sesuai dengan rencana, situasi, dankondisi yang ada.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan dana penelitian dengan judul "Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)" dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan SP DIPA IAIN Palangka Raya- 025.04.2.426273/2019 05 Desember 2018 yang didasarkan pada Surat Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor:171, tanggal12 April 2019 yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).

2. Apabila PIHAK KEDUA berhalangan maka hak dan wewenangnya diserahkan kepada Rektor IAIN Palangka Raya dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor I (Bidang Akademik) IAIN Palangka Raya.

Pasal 6 KETENTUAN PENCAIRAN DANA

1. Sistem pembayaran dibayarkan secara langsung oleh bendahara penyelenggara ke rekening penerima bantuan penelitian atau dalam hal ini adalah PIHAK KEDUA.
2. Pencairan dana bantuan operasional penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 5 ayat (2) dilaksanakan dengan dua kali tahapan:
 - a. tahap pertama 70% dari jumlah keseluruhan dana bantuan penelitian akan dicairkan setelah seminar proposal dan ditanda tanginya MOU/kontrak bantuan penelitian.
 - b. tahap kedua 30% akan dibayarkan setelah peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya dalam forum seminar yang diselenggarakan oleh LP2M IAIN Palangka Raya dan menyerahkan laporan kemajuan penelitian, yang dibuktikan dengan penyerahan laporan dalam bentuk :
 - a) Log Book Penelitian lengkap beserta bundle lampirannya, dan
 - b) Menyerahkan laporan naratif dan laporan penggunaan keuangan 70 % dalam bentuk rekapitulasi penggunaan keuangan (cash flow sheet) dan dana kegiatan penelitian kelompok dosen tentang "Persepsi Bankir Terhadap Hukum Riba (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)". Segala hal yang berkaitan dengan pajak menjadi tanggung jawab pihak kedua sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Setelah pencairan tahap kedua tentunya PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil akhir (final report) penelitian secara lengkap seperti log book lengkap, laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan, disertai dengan bukti-bukti pengeluarannya dan, bukti perjalanan, Rab dan Realisasinya serta artikel jurnal minimal pada jurnal nasional terindeks sinta 2 dengan bukti screenshot submission atau bukti LOA (Letter Of Acceptance dari pihak pengelola jurnal) atau Prosiding Internasional Terindeks Scopus kepada PIHAK PERTAMA dan hasil penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar dan copy file laporan penelitian beserta artikel pada CD. Pihak KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian pada Bendahara, LPM, Perpustakaan, SPI dan Prodi masing-masing sebanyak 1 eksemplar.
4. Penyerahan laporan akhir (Final Report), yang menyertakan log book, laporan naratif penggunaan keuangan dan bukti-bukti pengeluaran keuangan, draf artikel diserahkan Paling lambat tanggal 15 Desember 2019.

Pasal 7 DANA PELAKSANAAN SEMINAR

Mengingat dana pelaksanaan seminar proposal dan hasil penelitian tidak dianggarkan dalam DIPA IAIN Tahun 2019, maka seluruh kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tersebut sejak kegiatan persiapan, seminar proposal (moderator, penanggap utama, penggandaan, konsumsi) dan seminar hasil penelitian menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. PIHAK KEDUA menindak lanjuti hasil penelitian bagi pengusulan HKI/paten.
2. HKI/Paten yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian akan di kelola sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. PIHAK PERTAMA memberikan pelayanan kepada PIHAK KEDUA bagi pengusulan pencatatan HKI/Paten dalam bentuk manajemen satu pintu melalui akun sentra HKI/Paten LP2M IAIN Palangka Raya;
4. PIHAK KEDUA diarahkan untuk mengupayakan kerjasama bagi bantuan sponsor dari dunia usaha/industri dalam pengusulan HKI/Paten;
5. Hasil penelitian berupa peralatan seperti TTG (Teknologi Tepat Guna) yang dibiayai dari DIPA IAIN Palangka Raya adalah menjadi milik Negara.

Pasal 9 PERTANGGUNGJAWABAN

1. Segala jenis laporan penelitian, baik laporan substansi akademik maupun laporan non-akademik administrasi penggunaan biaya penelitian merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Jika di kemudian hari dilakukan pemeriksaan dan audit terhadap laporan penelitian oleh lembaga yang berwenang baik pemeriksa internal maupun pemeriksa eksternal dan terdapat temuan yang tidak wajar, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 10 INGKAR JANJI (WANPRESTASI)

1. PIHAK KEDUA yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan maka akan dinyatakan gugur oleh PIHAK PERTAMA dalam pengusulan pendanaan penelitian;
2. Jika PIHAK KEDUA memutuskan untuk mengundurkan diri karena alasan tertentu, PIHAK KEDUA harus membuat surat pernyataan di atas materai 6000. Semua biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan tidak dapat diusulkan kembali;
3. Apabila PIHAK KEDUA ingkar janji (*wanprestasi*) menyangkut keterlambatan penyerahan laporan *output* penelitian setelah batas akhir masa kontrak yang telah ditetapkan, maka PIHAK PERTAMA mengenakan sanksi bahwa peneliti atau kelompok peneliti tidak boleh mengajukan pendanaan penelitian pada kegiatan penelitian tahun berikutnya;
4. PIHAK KEDUA yang telah ditetapkan sebagai penerima dana penelitian yang tidak menyerahkan laporan *output* penelitian sebagian atau seluruh satuan laporan *output* penelitian melampaui tahun anggaran berjalan maka harus mengembalikan dana penelitian yang diberikan dan tidak dapat mengakses dana penelitian tahun selanjutnya;
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaporkan tagihan *outcome* publikasi paper hasil penelitian pada masa waktu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya masa kontrak, maka PIHAK PERTAMA mengunci peneliti atau kelompok peneliti yang bersangkutan tidak dapat mengakses sistem pendanaan penelitian selama 2 (*dua*) tahun berturut-turut sampai dipenuhinya tagihan *outcome* penelitian tersebut yang berupa publikasi hasil penelitian sesuai sasaran jurnal yang ditetapkan dalam pedoman penelitian dan publikasi ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M IAIN Palangka Raya.

Pasal 11 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini akan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palangka Raya, 25 April 2019

PIHAK PERTAMA,



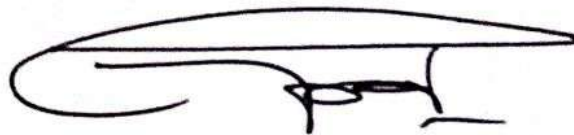
Ajahari, M.Ag
NIP. 19710302 199803 1 004

PIHAK KEDUA.



Dr. Dakhoir, MHI
NIP. 19820707 200604 1 003

Mengetahui:
Rektor IAIN Palangka Raya.



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 19630118 199103 1 002

Nomor : 171 Tahun 2019
Tanggal : 12 April 2019
Tentang : Penunjukan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional di Lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2019

No	Nama	Judul / Penanggap Utama dan Moderator	Gol	Vol	Satuan	Jumlah Dana
1.	Dr. Dakhoir, MHI Jefry Tarantang, MHI	Persepsi bankir terhadap hukum riba (pendekatan fikih wasathiyah iqtishadiyah)	IV III	1 Penelitian	Rp. 38.850.000,-	Rp. 38.850.000,-
2.	Dr. Miftahul Huda, M.Ag	Penanggap seminar proposal Penanggap seminar hasil Coaching Clinic	IV	1 Proposal 1 Laporan 1 Laporan	Rp. 150.000 Rp. 850.000 Rp. 150.000	Rp 150.000 Rp. 850.000 Rp. 150.000
3.	Sabarudin Ahmad, MH	Moderator	Non pns	1 OK	-	-
4.	Hj.Puspita, M.Si	Moderator	III	1 OK	-	-
TOTAL						Rp. 40.000.000

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 12 APRIL 2019

Rektor,

Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 196301181991031002